



LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2006

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun dan meyajikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2006 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai amanat pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

.....

Demikian laporan ini disajikan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekaligus bahan evaluasi dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan disampaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Pemerintah terhadap upaya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN I-1
	1. Dasar Hukum I-1
	2. Gambaran Umum Daerah..... I-6
	2.1 Kondisi Geografis..... I-6
	2.2 Gambaran Umum Demografis I-7
	2.3 Kondisi Ekonomi I-9
BAB II	KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH II-1
	1. Visi dan Misi II-1
	2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah II-6
	3. Prioritas Daerah II-13
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III-1
	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah..... III-1
	1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi III-1
	1.2 Target dan Realisasi Pendapatan..... III-3
	1.3 Permasalahan dan Solusi..... III-48
	2. Pengelolaan Belanja Daerah..... III-53
	2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah III-53
	2.2 Target dan Realisasi Belanja III-53
	2.3 Permasalahan dan Solusi..... III-53
BAB IV	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-1
	1. Bidang Hukum, ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa IV-1
	2. Bidang Pemerintahan IV-6
	3. Bidang Ekonomi IV-16
	4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan IV-30

	5. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	IV-36
	6. Bidang Sosial Budaya	IV-38
	7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	IV-44
	8. Bidang Sarana dan Prasarana Kota	IV-48
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
	1. Tugas Pembantuan Yang Diterima	V-1
	2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	V-1
BAB VI	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
	1. Kerjasama Antar Daerah	VI-1
	1.1 Kebijakan dan Kegiatan	VI-1
	1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-1
	1.3 Permasalahan dan Solusi.....	VI-1
	2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	VI-1
	2.1 Kebijakan dan Kegiatan	VI-1
	2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-2
	2.3 Permasalahan dan Solusi.....	VI-2
	3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah ...	VI-3
	3.1 Kebijakan dan Kegiatan	VI-3
	3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-3
	3.3 Permasalahan dan Solusi.....	VI-3
	4. Pembinaan Batas Wilayah	VI-4
	4.1 Kebijakan dan Kegiatan	VI-4
	4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-4
	4.3 Permasalahan dan Solusi.....	VI-5
	5. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	VI-5
	5.1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	VI-5
	5.2 Status Bencana	VI-5
	5.3 Sumber Dan Jumlah Anggaran	VI-5
	5.4 Antisipasi Daerah Dalam menghadapi Kemungkinan Bencana	VI-6

5.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana	
5.6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	
5.7 Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana	
5.8 Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi	VI-6
6. Pengelolaan Kawasan Khusus	VI-6
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	VI-7
7.1 Gangguan Yang Terjadi	VI-7
7.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani	VI-7
7.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	VI-7
7.4 Penanggulangan Dan Kendalanya	VI-7
7.5 Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan	VI-9
7.6 Sumber Dan Jumlah Anggaran	VI-9
BAB VII PENUTUP	VII-1
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1 Dasar Hukum

1.1 Sejarah dan Dasar Hukum Laporan Kepala Daerah

Pada Tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada Tahun 2000 dikeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya. Dari beberapa Peraturan Pemerintah tersebut terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Berdasar kedua Peraturan Pemerintah tersebut Gubernur menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Perhitungan APBD. Hasil dari pembahasan ini adalah DPRD bisa menolak atau menerima LPJ Gubernur.

Pada Tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Implikasi dari pergantian Undang-Undang tersebut adalah adanya penggantian pada beberapa Peraturan Pemerintah dimana pada Tahun 2005 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000. Namun karena Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 secara teknis belum bisa dilaksanakan maka pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Pada masa transisi inilah dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan secara sistem pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan Peraturan pemerintah Nomor 105, pada Tahun 2006 Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2005 yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah yang belum diperiksa BPK untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Perhitungan APBD. Hasil dari pembahasan

berupa catatan/rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan pelaksanaan tahun berikutnya.

Kemudian pada Tahun 2007, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Masyarakat sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 maka pada Tahun 2007 Gubernur harus menyampaikan 2 (dua) laporan ke DPRD yaitu LKPJ Tahun 2006 yang diatur dalam PP 3/2007 dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan Keuangan) yang diatur dalam PP 58/2005 dengan penjelasan sebagai berikut :

1.1.1 Laporan Keuangan Tahun 2006

- a) Laporan Keuangan Tahun 2006 seharusnya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, namun karena sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP 58/2005 dan sistem akuntansi yang digunakan pada tahun 2006 belum menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah maka Laporan Keuangan 2006 masih dalam bentuk Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.
- b) Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah akan disampaikan ke DPRD setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil dari pembahasan Laporan ini adalah Catatan/Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keuangan hasil Pemeriksaan BPK untuk menjadi perhatian pada pelaksanaan APBD tahun berikutnya.

1.1.2 LKPJ Tahun 2006

- a) LKPJ Tahun 2006 disampaikan langsung kepada DPRD pada rapat Paripurna DPRD untuk kemudian dibahas secara internal oleh Panitia Khusus yang dibentuk DPRD dan hasil dari pembahasan tersebut berupa Keputusan DPRD yang memuat catatan/rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.
- b) LKPJ Tahun 2006 tidak diaudit oleh BPK karena fokus LKPJ adalah pada *progress report* realisasi program dan kegiatan serta permasalahan dan solusinya berdasar RKPD Tahun 2006. LKPJ Tahun 2006 juga di bahas secara internal DPRD, tidak melibatkan Eksekutif (tidak ada mekanisme pertanyaan Fraksi maupun Komisi) karena kapasitas DPRD dalam hal ini adalah menjalankan fungsi pengawasan DPRD sebagai mitra eksekutif (hubungan *checks and balances*) dalam upaya membangun daerah.

1.2 Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan

Sejarah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup panjang mulai tahun 1527 hingga sekarang. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada tahun 1527, Kota Jakarta bernama Sunda Kelapa, merupakan sebuah kota kecil Bandar Pelabuhan yang ramai lalu-lintas perdagangan.

Strategisnya letak Sunda Kelapa yang saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran, menjadi ajang pertempuran antara balatentara Faletehan melawan Portugis. Pada pertempuran tersebut kemenangan ada di pihak Faletehan, yang kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi *fathan mubina* (Jayakarta) yang artinya kemenangan akhir.

Pada tahun 1602 seorang pegawai VOC yaitu *Van Raay* mendirikan Benteng di Teluk Jakarta, dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi "Batavia". Benteng ini menjadi pusat persekutuan dagang VOC untuk wilayah Hindia Timur. Sejak itulah Belanda memulai penjajahannya di seluruh nusantara.

Berdasarkan Ordonansi (Undang-Undang), tanggal 18 Maret Tahun 1905 Batavia ditetapkan sebagai daerah lokal yang mempunyai kewenangan mengatur keuangan sendiri, berikut dengan nama "*Gemeente Batavia*". Inilah gemeente pertama yang dibentuk di Hindia Belanda. Luasnya ketika itu kurang lebih 125 km², belum termasuk pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908, untuk keperluan menjalankan pemerintahan Pamongpraja, *Afdeling Stad en Voorsteden van Batavia* dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan *Wetevreden*, serta 6 *onderdistrik* (Mangga Besar, Penjaringan, Tanjung Priuk, Gambir, Senen, Tanah Abang).

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda abad ke-19, *Stad* (kota) Batavia dengan daerah-daerah sekitarnya merupakan satu karesidenan, yang dipimpin oleh seorang residen. Daerah administratif Karesidenan Batavia dibagi pula secara administratif dalam wilayah yang lebih kecil, yang disebut "*afdeling*". Sampai dengan abad 20. Karesidenan tersebut terdiri dari lima wilayah, yaitu: (1) *Afdeling "Stad en Voorsteden van Batavia"* (kota dan pinggiran kota Batavia), (2) *Afdeling Meester Cornelis* (sekarang Jatinegara). (3) *Afdeling Tangerang*. (4) *Afdeling Buitenzorg* (Bogor), (5) *Afdeling Karawang*.

Pada tahun 1922 keluar Undang-undang tentang Pembaharuan Pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini berturut-turut terbit Undang-Undang (UU) Provinsi (1924), Undang-Undang Regentschap (Kabupaten, 1924) dan Undang-Undang *Stadsgemeente* (*Stadsgemeente Ordonnantie*, disingkat: S.G.O, 1926).

Selanjutnya "*Gemeente Batavia*" ditetapkan menjadi "*Stadsgemeente Batavia*", yang kemudian menyelenggarakan pemerintah daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O. *Stadsgemeente Ordonnantie* menetapkan susunan Pemerintah suatu *stadsgemeente* terdiri dari: (1) *Raad* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); (2) *College van Burgemeester en Wethouders* (Dewan Pemerintah Daerah); (3) *Burgemeester* (Walikota),

Tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang. Dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah itu, pihak Jepang mengeluarkan Undang-undang No. 42 tentang "Perubahan Tata Pemerintahan Daerah". Menurut Undang-Undang tersebut, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut "*Syuu*"

(Keresidenan), “Syuu” dibagi dalam beberapa “Ken” (Kabupaten) dan “Shi” (*stadsgemeente*).

Kalau dalam *stadsgemeente* hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja, tanpa melaksanakan urusan pamongpraja, maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah masa Pemerintahan Jepang, “shi” (*stadsgemeente*) mengerjakan segala urusan pemerintahan (pamongpraja) dalam lingkungan daerahnya. Urusan pemerintah (pamongpraja) di dalam ‘*stadsgemeente*’ yang diurus oleh *regent* (Bupati), Wedana, Asisten-Wedana, Kepala Kampung atau *wijkmeester*, sekarang termasuk dalam kekuasaan “*Shichoo*” (Walikota). Mereka itu mejadi pegawai *shi* dan menjalankan urusan pemerintahan *shi* dibawah pemerintahan dan pimpinan “*shichoo*”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, “*Gunseikani*” (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang) dapat membentuk “*tokubetsu shi*” (*stadsgemeente* luar biasa). Bedanya antara “*tokubetsu shi*” (*stadsgemeente* luar biasa). Bedanya antara “*tokubetsu shi*” dan “*shi*” adalah, bahwa *tokubetsu* tidak merupakan daerah otonom dibawah syuu, melainkan langsung dibawah *gunseikan*. Dengan demikian, kedudukan pemerintahan kota Jakarta telah meningkat lagi, “*Jakaruta Tokubetsu Shi*” dipimpin oleh “*tokubetsu Shichoo*” dan beberapa orang “*Zyoyaku*” (pegawai tinggi), yang masing-masing diangkat pula oleh *Gunseikan*.

Sampai berakhirnya pendudukan Jepang di tahun 1945, kota Jakarta adalah satu-satunya “*tokubetsu Shi*” di Indonesia. **Jakarta Tokubetsu Shichoo yang pertama adalah Tsukamoto, dan yang terakhir adalah Hasegawa.**

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Kota Jakarta diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 jo Undang-Undang No.2 PNS 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Secara singkat, sejarah Kota Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggal 24 Januari 1950 dari Stad Gemeente Batavia menjadi Kota Praja Jakarta;
2. Tanggal 18 Januari 1958 Kedudukan Jakarta sebagai Daerah Swatantra dinamakan Kota Praja Jakarta Raya;
3. Tahun 1961 dengan PP Nomor 2 Tahun 1961 jo Undang-Undang No.2 PNS 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Sejak zaman pemerintahan Belanda, Jepang dan Pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta selalu menjadi Pusat Pemerintahan dengan corak dan fungsinya menurut kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang, Jakarta menjadi pusat pemerintahan dalam rangka mengendalikan daerah-daerah jajahan di seluruh Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang Jakarta menjadi **pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

2 Gambaran Umum Daerah.

2.1 Kondisi Geografis;

Batas administrasi Jakarta di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Provinsi Banten. Di sebelah utara Kota Jakarta membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal.

Kota Jakarta terletak pada posisi 6 12' Lintang Selatan dan 106 48" Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 661,52 km² dan berupa lautan 6.977,5 km². Wilayah DKI Jakarta memiliki sekitar 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Ketinggian maksimum Kota Jakarta 7 meter di atas permukaan laut, sedangkan sebagian wilayah khususnya di sekitar pantai laut Jawa terdapat beberapa

tempat yang berada di bawah permukaan air laut pasang sehingga rawan genangan.

Dengan kondisi geografis seperti itu, Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus lima tahunan, Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada bulan Februari tahun 2002 dan 2007 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan yang sangat besar untuk pembebasan lahan milik warga.

2.2 Gambaran Umum Demografis.

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2006 menurut data statistik sebanyak 8.961.680 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.483.001 dan perempuan 4.478.679 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan usia produktif yaitu 82,71 % sebagaimana terlihat pada struktur usia pada tabel 1.1

Tabel 1.1. Struktur Usia Penduduk Kota Jakarta Tahun 2006

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0 - 4	391.269	369.685	760.954
2	5 - 9	372.557	338.778	711.335
3	10 - 14	345.315	313.516	658.831
4	15 - 19	370.022	414.841	784.863
5	20 - 24	474.407	538.526	1.012.933
6	25 - 29	509.407	524.597	1.034.004
7	30 - 34	449.077	443.455	892.532
8	35 - 39	395.128	385.114	780.242
9	40 - 44	318.036	299.248	617.284
10	45 - 49	245.515	248.786	494.301
11	50 - 54	217.825	213.025	430.850
12	55 - 59	141.852	135.777	277.629

13	60 - 64	108.283	108.232	216.515
14	65 - 69	73.344	65.914	139.258
15	70 - 74	36.624	36.339	72.963
16	75 +	34.340	42.846	77.186
	Jumlah	4.483.001	4.478.679	8.961.680

Sumber : Susenas 2006

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,53 juta orang, terdiri atas laki-laki 2,39 juta orang dan perempuan sebanyak 1,14 juta orang. Menurut lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap pekerja adalah bidang perdagangan, restoran dan hotel (39,78%); kemudian jasa-jasa (23,63%); dan industri pengolahan (15,75%). Dengan demikian, bidang jasa-jasa atau sektor tersier menyerap tenaga kerja sebanyak 79,01 persen.

Tabel 1.2. Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2006

Lapangan Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	22,54	0,94	0,00	0,00	22,54	0,64
2. Industri Pengolahan	376,32	15,72	179,77	15,80	556,09	15,75
3. Bangunan	152,67	6,38	10,04	0,88	162,72	4,61
4. Perdagangan, Restoran & Hotel	903,35	37,73	501,51	44,09	1.404,85	39,78
5. Pengangkutan dan Komunikasi	268,68	11,22	27,04	2,38	295,72	8,37
6. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	168,08	7,02	65,16	5,73	233,24	6,60
7. Jasa-jasa	482,95	20,17	351,54	30,91	834,49	23,63
8. Lainnya	19,80	0,83	2,35	0,21	22,14	0,63
Jumlah	2.394,39	100,00	1.137,41	100,00	3.531,80	100,00

Sumber : Sakernas, 2006

Menurut tingkat pendidikan (khususnya bagi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 2.638.626 jiwa atau 35,23 persen dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas berhasil menyelesaikan pendidikan dari tingkatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Bahkan yang menyelesaikan pendidikan tinggi mencapai sebanyak 923.632 orang yang terdiri atas sebanyak 355.756 orang pada level DI hingga DIII, dan bahkan sebanyak 567.876 orang atau sebesar 7,58 persen berpendidikan sarjana.

Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2006 (10 tahun ke atas)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	365.717 (9,83)	526.436 (13,96)	892.153 (11,91)
2	SD	687.108 (18,47)	876.321 (23,24)	1.563.429 (20,88)
3	SMTp	703.530 (18,92)	768.021 (20,37)	1.471.551 (19,65)
4	SMTA	1.445.172 (38,86)	1.193.454 (31,65)	2.638.626 (35,23)
5	Diplomal I - III	179.865 (4,84)	175.891 (4,67)	355.756 (4,75)
6	Universitas	337.783 (9,08)	230.093 (6,11)	567.876 (7,58)
	Jumlah	3.719.175 (100,00)	3.770.216 (100,00)	7.489.391 (100,00)

Sumber : Susenas 2006

3 Kondisi ekonomi

3.1 Potensi Unggulan Daerah

Pada dasarnya potensi unggulan perekonomian daerah dapat dilihat dari struktur perekonomian daerah. Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2006 didominasi oleh tiga sektor utama, yang dilihat dari nilai tambah sektoral menurut harga berlaku. Nilai tambah sektoral tahun 2006 menunjukkan sebesar 66,44 persen kontribusi ekonomi berasal dari sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan;

perdagangan, hotel dan restoran; serta industri pengolahan. Ketiga sektor ini, masing-masing memberikan kontribusi yaitu 30,41 persen untuk sektor keuangan, persewaan & jasa; sebesar 20,10 persen dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sebesar 15,93 persen dari sektor industri pengolahan.

**Tabel 1.4 Struktur Perekonomian DKI Jakarta menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006**

Lapangan Usaha	Persentase	
	2005	2006*)
1. Pertanian	0,10	0,10
2. Pertambangan dan Penggalian	0,45	0,48
3. Industri Pengolahan	15,88	15,93
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,10	1,04
5. Bangunan	10,45	11,18
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,09	20,10
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,13	8,19
8. Keuangan, Perseroan dan Perusahaan	31,09	30,41
9. Jasa-jasa	12,70	12,58
PDRB DKI Jakarta	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Keterangan : *) angka sementara

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kota Jakarta tahun 2006 ditunjukkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, meningkat sebesar 5,90 persen dibanding tahun 2005. Semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi (12,31%) dan terendah di sektor pertanian (0,72%). Adatiga sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan agregat, yakni sektor bangunan yang tumbuh sebesar 7,12 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,59 persen; dan sektor transportasi dan komunikasi sebesar 12,31 persen. Dari pertumbuhan tersebut, peranan tiga sektor ekonomi utama yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan, dan

jasa perusahaan; serta sektor industri pengolahan tentu akan sangat berpengaruh terhadap struktur perekonomian DKI Jakarta.

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional untuk tahun yang sama yang mencapai sebesar 5,48 persen, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI masih sedikit lebih tinggi.

Walaupun pada awal tahun 2007 terdapat sejumlah bencana alam, namun dengan penanganan dan recovery sektor riil khususnya UKM, gambaran ekonomi makro DKI Jakarta tahun 2007 diharapkan semakin stabil dan mantap. Nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2006 juga stabil berkisar Rp. 9.020/US \$, laju inflasi yang terkendali, membaiknya kondisi perekonomian, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi karena didukung oleh keamanan yang semakin mantap, sehingga kedepan diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

**Tabel 1.5 PDRB menurut Lapangan Usaha DKI Jakarta tahun 2006
(Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000)
(miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha/Sektor	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan		Laju Pertumbuhan
	2005	2006)*	2005	2006)*	
1. Pertanian	438,24	490,49	290,39	292,46	0,72
2. Pertambangan dan Penggalian	1.959,33	2.417,63	915,98	933,06	1,87
3. Industri Pengolahan	69.293,54	79.886,69	51.177,80	53.646,72	4,82
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4.802,94	5.207,73	1.977,20	2.075,80	4,99
5. Bangunan	45.570,84	56.071,98	29.094,58	31.166,11	7,12
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	87.659,98	100.831,03	63.492,89	67.676,54	6,59
7. Pengangkutan dan Komunikasi	35.477,72	41.085,72	23.286,74	26.158,47	12,31
8. Keuangan, Perseroan dan Perusahaan	135.624,63	152.501,80	90.874,27	94.722,76	4,23
9. Jasa-jasa	55.423,50	63.073,27	34.160,47	36.012,17	5,42
PDRB DKI Jakarta	436.250,72	501.566,33	295.270,32	312.684,13	5,90

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Keterangan :) * angka sementara

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-

faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter.

Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan dan kerjasama harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata. Inflasi juga dapat diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus.

Laju inflasi Tahun 2006 dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta adalah sebesar 6,03 persen, sedangkan di tingkat nasional sebesar 6,60 persen.

Tabel 1.6 Laju Inflasi Kota Jakarta dan Nasional Tahun 2006 (%)

Bulan	Inflasi	
	Jakarta ^{*)}	Nasional ^{*)}
Januari	1,75	1,36
Februari	0,50	0,58
Maret	0,04	0,03
April	-0,08	0,05
Mei	0,30	0,37
Juni	0,12	0,45
Juli	0,17	0,14
Agustus	0,65	0,33
September	0,38	0,38
Oktober	0,56	0,86
Nopember	0,19	0,34
Desember ^{*)}	0,06	-0,04
Januari - Desember ^{**)}	6,03	6,60

Sumber BPS Provinsi DKI Jakarta

Keterangan :

^{*)} Persentase perubahan IHK Desember 2006 terhadap Nopember 2006

^{**)} Persentase perubahan IHK Desember 2006 terhadap Desember 2005

Selama bulan Januari–Desember 2006, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 1,75 persen. Tingginya inflasi bulan Januari merupakan akibat kenaikan harga-harga kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 6,42

persen. Pada bulan Januari 2006, dari tujuh kelompok pengeluaran, sebanyak enam kelompok mengalami inflasi, sedangkan satu kelompok yakni transportasi, komunikasi dan jasa keuangan justru mengalami deflasi sebesar 0,07 persen.

Tingginya inflasi pada awal tahun 2006, ternyata secara signifikan mengalami penurunan pada bulan berikutnya. Sebelas bulan terakhir pada tahun 2006 semenjak Februari, angka inflasi sangat rendah, bahkan pada bulan April terjadi deflasi sebesar 0,08 persen. Rendahnya inflasi pada tahun 2006, dipengaruhi oleh kebijakan yang membatalkan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di tingkat pemerintah pusat maupun pembatalan kenaikan tarif air minum PAM oleh Gubernur.

Dibandingkan dengan inflasi nasional, pada periode 12 bulan, hanya dalam 5 bulan inflasi Jakarta lebih tinggi dari nasional. Sisanya untuk 7 bulan, inflasi kota Jakarta justru lebih rendah.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1. Visi dan Misi

1.1 Visi

Berdasarkan Renstra tahun 2002-2007, Visi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta, adalah :

“Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”.

Pemahaman lebih dalam terhadap visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Jakarta sebagai Ibukota Negara dan kota perdagangan dan jasa, hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional, (2) Jakarta hendaknya dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya, dan (3) Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

1.2 Misi

Adapun misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai penjabaran visi tersebut di atas adalah:

- a) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau;
- b) Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat;
- c) Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota;
- d) Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota;
- e) Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik;

Pemahaman lebih dalam terhadap misi pembangunan Jakarta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif; (2) pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya; (3) kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis; (4) keamanan, ketentraman dan ketertiban kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif, (5) pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparatur yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi, serta didukung sistem informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.

1.3 Arah Kebijakan

Menurut Renstrada 2002-2007, periode 2005-2007 adalah tahap pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi untuk mendukung stabilitas pembangunan nasional (stabilization) serta peningkatan kualitas SDM, penegakan supremasi hukum, peningkatan ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, fokus pembangunan pada tahun 2006 merupakan kelanjutan dari program pemantapan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2005.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 secara umum diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas keamanan dan ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam hal pemerintahan, arah kebijakan dititik beratkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil dan

demokratis (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan demikian harapan masyarakat akan adanya perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik dapat terwujud.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung *good governance*, juga diperlukan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan di masa mendatang. Dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam membangun kotanya.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan di atas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana ini akan memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Arah Kebijakan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 memuat 12 (duabelas) hal pokok, yaitu :

- a) Penegakan hukum dan HAM dengan fokus pada peningkatan peran dan profesionalisme aparat penegak hukum, pencegahan pelanggaran HAM, serta penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk.
- b) Peningkatan konsistensi hukum dalam upaya mensinergikan peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.
- c) Penegakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan fokus pada peningkatan sumber daya aparatur yang lebih profesional untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk menutup peluang KKN
- d) Peningkatan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis serta bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan akar budaya bangsa.

- e) Perbaikan ekonomi dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan berorientasi pada pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
- f) Peningkatan kepedulian terhadap kelompok miskin melalui kebijakan pemerintah yang sinergis dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat.
- g) Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan untuk segenap warga kota dengan kualitas yang lebih baik. Untuk bidang kesehatan, difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan dengan prioritas pada keluarga miskin (Gakin), sedang untuk bidang pendidikan selain peningkatan layanan dasar pendidikan juga layanan mutu pendidikan dengan meningkatkan bantuan Biaya Operasional Pendidikan dan Sekolah (BOPS) pada jenjang pendidikan dasar.
- h) Peningkatan kualitas kehidupan pemuda dan prestasi olah raga, serta kualitas kehidupan beragama dan kerukunan sosial.
- i) Peningkatan kecintaan terhadap budaya bangsa pada semua aspek kehidupan masyarakat dan pelestarian peninggalan sejarah.
- j) Optimalisasi potensi ekonomi Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai sosial budaya dan agama.
- k) Penataan ruang kota yang sehat, seimbang, dinamis dan berkelanjutan, serta perluasan fasilitas pelayanan kota yang lebih adil dan menyeluruh dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu kebijakan ini juga ditujukan bagi terlaksananya *program dedicated* (Banjir Kanal Timur, transportasi massal, rumah susun, dan lain-lain).
- l) Peningkatan peranan IPTEK dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan ditetapkan Arah Kebijakan Umum APBD Provinsi DKI Jakarta, maka sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum, dengan indikator menurunnya angka kriminal dan gangguan kamtibmas.
- b) Meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum di DKI Jakarta.
- c) Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik (*cepat, impartial, terjangkau*).
- d) Meningkatnya kesadaran masyarakat pada kehidupan berdemokrasi yang terbuka dan bertanggung jawab.
- e) Meningkatnya perekonomian daerah dengan sasaran tercapainya pertumbuhan ekonomi 6,0 persen dan inflasi 9,9 persen, menurunnya angka pengangguran menjadi 13,36 persen dan menekan jumlah penduduk miskin di bawah 5 persen.
- f) Meningkatnya pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha.
- h) Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan dan kesehatan dengan tercapainya mutu SDM yang lebih baik yang ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun = 99,10; 13-15 tahun = 92,80 dan 16-18 tahun = 72,90; angka kematian bayi = 16, angka harapan hidup 74,13 tahun. Pada tahun 2006 diharapkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan semakin baik, antara lain memberikan bantuan biaya operasional kepada Rumah Sakit/Puskesmas, revitalisasi Posyandu/gizi, serta memberikan kartu Gakin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), untuk memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK-Gakin). Sedangkan dibidang pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin bagi siswa tidak mampu untuk tetap bersekolah.
- i) Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, serta berkurangnya konflik horizontal antar kelompok pemuda.
- j) Meningkatnya kesadaran masyarakat Jakarta akan nilai budaya bangsa yang ada di masyarakat.

- k) Meningkatnya sarana dan prasarana kota dengan terlaksananya program dedicated (Banjir Kanal Timur, Busway, Perumahan/Rusun, Kali dan Situ, Waste-to-Energy (WTE), Pelabuhan Laut, *Fly Over* dan *Underpass*, *Subway* dan Ijo Royo-Royo).
- l) Meningkatnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Strategi

Untuk mencapai sasaran ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

- a) Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tenteram.
- b) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance* untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- c) Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah guna peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat.
- d) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, pedagang kaki lima dan lain-lain.

- e) Mengembalikan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi DKI Jakarta dengan mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang memadai, menekan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), dan menciptakan sistem pelayanan investasi yang lebih sederhana untuk mencapai peningkatan investasi.
- f) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- g) Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor non unggulan, dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja.
- h) Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi program pendidikan 9 tahun, dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/non fisik pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta.
- i) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar setidaknya mencapai standar minimum pelayanan kesehatan.
- j) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- k) Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta

mengendalikan arus perpindahan penduduk (urbanisasi) ke Provinsi DKI Jakarta.

- l) Meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam.
- m) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, pedagang kaki lima dan lain-lain.

3. Prioritas Daerah

Berdasarkan kebijakan umum APBD disusun prioritas APBD untuk tahun 2006, prioritas pengalokasian APBD diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, prioritas pengalokasian APBD juga diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata, dan untuk kepentingan masyarakat luas (program dedicated).
- b) Prioritas pengalokasian pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.
- c) Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
- d) Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja di tingkat wilayah (Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- e) Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.

Lebih lanjut , prioritas APBD dijabarkan ke dalam Dedicated Program dan Prioritas SKPD

3.1 Program Dedicated

Terdapat 15 jenis program kegiatan yang dikategorikan ke dalam *program dedicated*, antara lain :

- 3.1.1 **Banjir Kanal Timur (BKT)**, Kebutuhan pembebasan tanah adalah 401,2 ha, diantaranya terdiri dari 101 ha lahan fasum yang merupakan kewajiban pengembang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3.1.2 **Normalisasi Sungai, Situ dan Saluran**, kegiatan ini didasarkan pada keinginan kuat Pemda untuk mewujudkan sungai dan situ yang tertata baik dan sehat, serta mampu menjalankan fungsinya bagi lingkungan kehidupan kota. Pada tahun 2006 telah dilakukan penataan situ di DKI Jakarta, yaitu situ Mangga Bolong, Babakan, Munjul, Sunter Hulu dan Cilangkap. Selanjutnya untuk situ-situ di luar DKI Jakarta, dilakukan inventarisasi, antara lain situ Ciawi dan situ Limau. Untuk penanganan sungai/kali pada tahun 2006 meliputi 6 lokasi antara lain Taman Sari, Bekasi Tengah, Kali Cakung lama dan Banglio. Kemudian akan dilakukan perbaikan turap Banjir Kanal Barat pada 3 segmen, dari KS Tubun sampai Tomang dan sebagian segmen PIK hingga Muara Angke serta penataan sistem saluran di kawasan Kebon Sirih dan Medan Merdeka Selatan.
- 3.1.3 **Pelabuhan Laut**, kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan akan sarana transportasi yang memadai bagi warga Jakarta dan diversifikasi sumber penerimaan daerah. Kegiatan ini meliputi pengerukan dan pembangunan dermaga Muara Angke dan koordinasi Pelabuhan Muara Angke dan Jakarta serta *New Port* dengan Pemerintah Pusat.
- 3.1.4 **Busway**, kegiatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan terhadap tersedianya angkutan massal yang aman, nyaman dan terjangkau sudah sangat mendesak mengingat semakin menurunnya daya dukung dan kondisi lalu lintas Kota Jakarta. Sesuai pola transportasi makro yang

telah direncanakan secara terintegrasi yaitu Busway, Monorail dan Subway, tahun 2003-2004 telah diselesaikan koridor I Busway (Blok M-Kota) dari rencana keseluruhan 13 koridor. Tahun 2005 telah diselesaikan koridor II (Pulo Gadung-Harmoni) dan koridor III (Harmoni-Kali Deres), Tahun 2006 direncanakan pembangunan koridor IV (Pulogadung-HI), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), koridor VI (Warung Jati/Ragunan-Imam Bonjol) dan koridor VII (Kampung Rambutan-Kampung Melayu). Kegiatannya meliputi pembangunan Jembatan Penyeberang Orang, halte, separator, pool dan ticketing sistem, struktur jalan, simpang, penyusunan AMDAL, trase, penataan taman dan pohon, relokasi utilitas dan penataan lampu Penerangan Jalan Umum, penertiban PKL dan penghuni liar, serta koordinasi penertiban di 5 wilayah.

- 3.1.5 **Mass Rapid Transit (MRT)/Subway**, didasarkan pada kebutuhan akan angkutan massal yang cepat dan nyaman, serta terintegrasi dengan pola transportasi lainnya. Untuk tahun 2006 akan dilaksanakan kegiatan *traffic management prakonstruksi*, pembebasan tanah sekitar terminal Lebak Bulus pembebasan lahan Jl. Tb. Simatupang dan Jl. Fatmawati serta penyempurnaan jalan alternatif pra-konstruksi.
- 3.1.6 **Fly-over dan Underpass (FO/UP)** didasarkan pada rencana penyelesaian pembangunan *Fly-over* Martadinata, *Fly-over* Roxi, dan *Underpass* Kebayoran Lama. Untuk *Fly-over* dan *Underpass* yang mendukung jalur kereta api lingkaran Jakarta (*loop line*) akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2007 (multi year) yang meliputi pembangunan *Underpass* Jl. Angkasa Raya/Rel Kereta Api.
- 3.1.7 **Perumahan**, Kegiatan ini didasarkan pada tujuan untuk menyediakan rumah susun bagi penduduk miskin yang tinggal di bantaran kali dan kolong jalan TOL, buruh dengan penghasilan tetap, pekerja lepas dan karyawan berpenghasilan rendah sebanyak 3.000 unit. Serta perbaikan kampung di 5 kawasan Kotamadya.
- 3.1.8 **Kaki Lima dan Pembangunan Terminal Agribisnis**, Untuk Kaki Lima kegiatannya berupa perbaikan dan peningkatan kualitas secara komprehensif penanganan pedagang kaki lima yang masih perlu

pendalaman lebih cermat. kebutuhan tiga terminal agribisnis di Jabodetabek yang masih perlu koordinasi dan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan Banten.

- 3.1.9 **Ijo Royo-royo**, kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan pembangunan hutan kota di setiap wilayah Kotamadya yang meliputi taman kota, taman interaktif dan menambah areal terbuka hijau (termasuk pembebasan tanah).
- 3.1.10 **Waste-To-Energy (WTE)**, kegiatan ini meliputi pengadaan tanah di Marunda, penyusunan desain, penyusunan program dan pelaksanaan sosialisasi, persiapan pembangunan, pembangunan WTE tahap I, operasional WTE, serta kegiatan pendukung WTE (*transporting*).
- 3.1.11 **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)**, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan sosial ekonominya secara mandiri melalui pengalokasian dana *blockgrant*. Pada tahun 2002 alokasi dana PPMK sebesar Rp 250 juta per kelurahan, tahun 2003 sebesar Rp 500 juta per kelurahan, tahun 2004 sebesar Rp 700 juta per kelurahan dan tahun 2005 sebesar Rp 1 milyar per kelurahan. Total anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 624,15 milyar. Dengan pertimbangan bahwa jabatan Dekel akan berakhir pada tahun 2006, perlu dilakukan audit keuangan dan evaluasi menyeluruh terhadap program PPMK tahun 2002-2005, Pada tahun 2006 alokasi PPMK setiap Kelurahan rata-rata sebesar Rp 500 juta.
- 3.1.12 **Peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan**. Dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan beberapa kewenangannya ke tingkat Kelurahan yang meliputi kebersihan, ketertiban/keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- 3.1.13 **Peningkatan kualitas layanan publik**, kegiatan ini dimaksudkan untuk pendelegasian kewenangan dari Sudin Teknis Kotamadya/Kabupaten ke Pemerintahan Kecamatan di bidang Pekerjaan Umum Jalan, Pekerjaan Umum Tata Air, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan dan Penerangan Jalan Umum.

3.1.14 **Pendidikan**, Kegiatan ini meliputi rehab berat dan rehab total gedung SDN/SMPN didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat sejumlah gedung SDN/SMPN yang dikategorikan rusak berat. Pembangunan gedung SMA baru sebesar, dengan pertimbangan daya tampung SMA Negeri saat ini masih sangat terbatas. Pembangunan SMA unggulan, dengan pertimbangan DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan sampai saat ini belum memiliki Sekolah Negeri yang mempunyai fasilitas lengkap seperti Gymnasium, kolam renang, gedung serbaguna dan lain-lain. Pembangunan SMK Kelautan di Kepulauan Seribu, dengan pertimbangan bahwa potensi Kepulauan Seribu yang cukup besar di bidang kebaharian serta sebagian besar penduduknya merupakan nelayan.

3.1.15 **Kesehatan**, peningkatan pelayanan keluarga miskin melalui Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin).

3.2 Prioritas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

Program yang dikelola oleh SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja unit (*performance-based budgeting*) serta menurut fungsinya, digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan dan program yang ditetapkan/ditargetkan masing-masing SKPD sesuai dengan delapan bidang pembangunan. Program SKPD antara lain :

- a) Pengembangan Pantai Publik, meliputi pembebasan tanah untuk jalan dan pembentukan kelembagaan.
- b) Pembangunan *show room* dan laboratorium ikan hias
- c) Pengadaan alat kesehatan Puskesmas plus Kepulauan Seribu
- d) Pengadaan meubelair kantor Kelurahan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan.
- e) Rehab gedung Balaikota.
- f) Pengadaan meubelair kantor Kelurahan, Kecamatan dan Walikota Jakarta Pusat
- g) Rehab berat Panti Laras Cipayung.
- h) Pembangunan gedung serbaguna Pulau Tidung
- i) Pembangunan SLB Panti Cacat Terpadu.

- j) Rehab total dan rehab berat 52 kantor Kelurahan sebesar
- k) Biaya operasional sekolah dan pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN
- l) Penertiban izin mendirikan bangunan di 5 wilayah Kotamadya (Penegakan hukum)
- m) Pengawasan izin mendirikan bangunan (kontrol penertiban bangunan)/
- n) Pembebasan tanah Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut.
- o) Pembebasan tanah Perkampungan Budaya Betawi di Jakarta Selatan.
- p) Pembangunan kompleks Dinas Kesehatan.
- q) Penyelesaian kantor Walikotamadya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
- r) Pembangunan eks kantor Dispenda
- s) Operasional 143 Sasana Krida Karang Taruna
- t) Bantuan kesejahteraan kepada 5.000 guru agama di bawah koordinasi Kanwil Depag termasuk didalamnya guru madrasah diniyah
- u) Pengiriman tugas belajar S2 ke luar negeri
- v) Pengiriman tugas belajar S2 di dalam negeri.
- w) Rehab berat dan total 54 Puskesmas.
- x) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun yang akan digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan DKI Jakarta dalam jangka panjang dan menengah,

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006, kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terus berupaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Untuk itu, telah dilakukan langkah-langkah antara lain: (1) mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah

yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan, (2) meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan, dan (3) meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah serta peningkatan kontribusi Laba BUMD, serta (4) meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Untuk mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

1.1.1 Intensifikasi Pajak/Retribusi

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1). Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 2). Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- 3). Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 4). Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- 5). Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait.
- 6). Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat.

1.1.2 Ekstensifikasi Pajak/Retribusi

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1). Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
- 2). Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus
- 3). Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target group baru.
- 4). Peningkatan bagi hasil pajak

1.1.3 Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif.

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- 1). Perbaikan manajemen menuju Jakarta Incorporated (Holding Company)
- 2). Pembentukan subholding ;
- 3). Percepatan divestasi saham-saham Pemda pada PT Patungan yang merugi;
- 4). Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi

1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan Daerah dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp8.457.213.596.714,81 atau 97,58 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp8.666.795.967.748,00. Dari realisasi ini terlihat target PAD yang tidak dapat dicapai sebesar Rp.209.582.371,033,19. Untuk Dana Perimbangan, dari anggaran Rp6.661.000.000.000,00 realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar Rp6.515.284.274.637,00 atau 97,81 persen. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.4.532.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1

TABEL 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah pada Perhitungan APBD
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

Jenis	Tahun Anggaran 2006			Δ%
	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Pendapatan Asli Daerah	8.666.795.967.748,00	8.457.213.596.714,81	(209.582.371.033,19)	97,58
▪ Dana Perimbangan	6.661.000.000.000,00	6.515.284.274.637,00	(287.923.550.726,00)	97,81
▪ Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	4.532.000.000,00	4.532.000.000,00	-
JUMLAH	15.327.795.967.748,00	14.977.029.871.351,81	(492.973.921.759,19)	97,71

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, Realisasi PAD mencapai Rp8.457.213.596.714,81 atau 97,58 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp8.666.795.967.748,00. Dari realisasi ini terlihat target PAD yang belum dapat dicapai adalah sebesar Rp.209.582.371.033,19 atau 2,42 persen sedangkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 56,54 persen. Walaupun realisasi PAD tidak mencapai target, namun upaya-upaya terus dilakukan secara optimal seperti; intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; serta kerja keras untuk meningkatkan PAD yang dilaksanakan petugas-petugas pemungut di lapangan.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD dapat dilihat pada tabel 3.2

TABEL 3.2
Realisasi PAD pada Perhitungan APBD
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2006			Δ%
	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Pajak Daerah	7.149.000.000.000,00	6.482.312.414.672,00	(666.687.585.328,00)	90,67
▪ Retribusi Daerah	472.531.996.600,00	444.246.390.913,00	(28.285.605.687,00)	94,01
▪ Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	132.335.966.854,00	131.448.689.490,00	(887.277.364,00)	99,33
▪ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	912.928.004.294,00	1.399.206.101.639,81	486.278.097.345,81	153,27
JUMLAH	8.666.795.967.748,00	8.457.213.596.714,81	(209.582.371.033,19)	97,58

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini.

a. Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 seperti nampak pada tabel tersebut **diatas tidak dapat mencapai target sesuai anggaran yang ditetapkan** Rp7.149.000.000.000,00, realisasinya hanya mencapai Rp.6.482.312.414.672,00 atau 90,67 persen. Dengan demikian target

yang tidak dicapai adalah sebesar Rp.666.687.585.328,00 atau 9,33 persen. Dari realisasi tersebut kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 41,47 persen.

Penerimaan pajak yang realisasinya sampai dengan akhir tahun 2006 tersebut diperoleh dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor, mencapai Rp2.247.581.506.366,00 atau 96,38 persen;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mencapai Rp1.809.282.164.353,00 atau 73,85 persen;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, mencapai Rp632.724.670.698,00 atau 100,91 persen;
- Pajak Hotel, mencapai Rp474.268.230.915,00 atau 97,79 persen;
- Pajak Restoran, mencapai Rp431.118.845.910,00 atau 103,88 persen;
- Pajak Hiburan, mencapai Rp169.018.949.547,00 atau 112,68 persen;
- Pajak Reklame, mencapai Rp234.242.366.130,00 atau 104,11 persen;
- Pajak Penerangan Jalan, mencapai Rp341.076.464.056,00 atau 104,95 persen;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, mencapai Rp59.129.567.846,00 atau 98,55 persen;
- Pajak Parkir, mencapai Rp84.206.407.517,00 atau 105,26 persen.

Gambaran realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat pada tabel 3.3

TABEL 3.3

**Realisasi pendapatan Pajak Daerah pada Perhitungan
APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)**

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	2.332.000.000.000,00	2.247.581.506.366,00	(84.418.493.634,00)	96,38
2.	BBN Kendaraan Bermotor	2.450.000.000.000,00	1.809.582.164.353,00	(640.717.835.647,00)	73,85
3.	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	627.000.000.000,00	632.724.670.698,00	5.724.670.698,00	100,91
4.	Pajak Hotel	485.000.000.000,00	474.268.230.915,00	(10.731.769.085,00)	97,79
5.	Pajak Restoran	415.000.000.000,00	431.118.845.910,0	16.118.845.910,00	103,88
6.	Pajak Hiburan	150.000.000.000,00	169.018.949.547,00	19.018.949.547,00	112,68
7.	Pajak Reklame	225.000.000.000,00	234.242.366.130,00	9.242.366.130,00	104,11
8.	Pajak Penerangan Jalan	325.000.000.000,00	341.706.464.056,00	16.706.464.056,00	104,95
9.	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	60.000.000.000,00	59.129.567.846,00	(870.432.154,00)	98,55
10.	Pajak Parkir	80.000.000.000,00	84.206.407.517,00	4.206.407.517,00	105,26
	JUMLAH	7.149.000.000.000,00	6.482.649.173.338,00	(666.350.826.662,00)	90,68

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan jenis-jenis Pajak Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 diuraikan sebagai berikut;

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp2.247.581.506.366,00 atau 96,38 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.332.000.000.000,00. Sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan PKB yang targetnya tidak tercapai Rp84.418.493.634,00 atau 3,62 persen. Dari realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00, terlihat kontribusi pendapatan PKB terhadap Pajak Daerah mencapai 34,67 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan, kondisi pertumbuhan jumlah kendaraan

negatif,menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif, disamping konsumsi otomotif tidak menjadi obyek pilihan utama bagi masyarakat dan menurunnya produksi dalam negeri.

Dengan tidak tercapainya target realisasi penerimaan PKB di Tahun Anggaran 2006 berbagai langkah dan upaya dilakukan secara optimal seperti :

- Penyampaian Surat pemberitahuan (Super) PKB secara intensif.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait maupun pihak swasta seperti Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), pengusaha/pemilik showroom dan Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor dan Gaikindo.
- Peningkatan pendataan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di kawasan tertentu.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak, seperti pelayanan samsat keliling.
- Penelitian dan pendataan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang.
- Koordinasi pengawasan pembayaran PKB dilakukan lebih intensif melalui operasi/razia bekerja sama dengan pihak kepolisian.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Realisasi penerimaan BBN-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.809.282.164.353,00 atau 73,85 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.450.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 target penerimaan yang tidak dapat dicapai Rp640.717.835.647,00 atau 26,15 persen. Apabila realisasi BBN-KB tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00 maka terlihat kontribusi BBN-KB terhadap Pajak Daerah jumlahnya mencapai 27,90 persen.

Sebagaimana kondisi Tidak tercapainya target penerimaan BBN-KB Tahun Anggaran 2006 juga disebabkan : kondisi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor negatif, menurunnya daya beli masyarakat karena konsumsi otomotif

tidak menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat, menurunnya produksi dalam negeri dan import pada sektor otomotif.

Meskipun realisasi penerimaan BBN-KB dalam Tahun Anggaran 2006 tidak mencapai target namun berbagai langkah dan upaya telah dilakukan antara lain :

- Peningkatan pelayanan pada masyarakat wajib pajak;
- Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta seperti; pengusaha Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), pemilik show room dan asosiasi impotir kendaraan bermotor;
- Peningkatan Pendataan kendaraan bermotor bekas pakai yang diperjualbelikan melalui showroom;
- Peningkatan pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan nilai jual kendaraan bermotor;
- Peningkatan survey dilapangan dan pengumpulan data lainnya untuk menentukan Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta;
- Peningkatan pengawasan pembayaran BBN-I (kendaraan baru) yang tidak dibayar melalui modus ganti nama, ganti nomor chasis dan lainnya.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Realisasi penerimaan PBB-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp632.724.670.698,00 atau 100,91 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp627.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi pajak ini terlihat melampaui target proyeksi Rp5.724.670.698,00 atau 0,91 persen. Apabila realisasi PBB-KB tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00 maka kontribusi PBB-KB terhadap Pajak Daerah mencapai 0,09 persen. Peningkatan penerimaan PBB-KB karena dilakukan upaya yang lebih intensif seperti; koordinasi dengan PT. Pertamina sebagai wajib pajak dan penyalur Bahan Bakar Kendaraan bermotor lainnya baik melalui kegiatan rekonsiliasi jumlah penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan kaitannya dengan kewajiban yang harus disetorkan maupun peningkatan survey data potensi objek PBB-KB dan koordinasi dengan instansi terkait pada

stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah DKI Jakarta, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak utamanya dibidang administrasi perpajakan. Disamping itu, pelampauan pencapaian target penerimaan tersebut disebabkan antara lain :

- Adanya peningkatan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor akibat regulasi kebijakan pemerintah.
- Adanya penambahan penyalur bahan bakar kendaraan bermotor selain PT.Pertamina di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Adanya penambahan jumlah SPBU sebagai dampak dari kemudahan dan peluang yang diberikan oleh Pemerintah untuk berinvestasi pada usaha SPBU.
- Dampak positif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua.

4. Pajak Hotel

Pajak Hotel dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Ketentuan lebih lanjut pemungutan Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

Realisasi penerimaan Pajak Hotel dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 Rp474.268.230.915,00 atau 97,79 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp485.000.000.000,00. Dari realisasi tersebut terlihat penerimaan pajak ini tidak mencapai target Rp10.731.769.085,00 atau 2,21 persen. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan totalitas realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya Rp6.482.649.173.338,00 maka kontribusi Pajak Hotel mencapai 7,31 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan ; menurunnya jumlah hunian kamar hotel bintang lima dan hotel bintang lima berlian sebagai dampak berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara sebagai pengguna jasa hotel dan tidak menjadi objek pilihan utama bagi sebagian masyarakat. Namun demikian dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak ini berbagai langkah dan upaya yang optimal telah dilakukan seperti :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa pajak hotel;
- Penagihan secara intensif atas tunggakan Pajak Hotel termasuk penagihan dengan surat paksa;
- Pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan di lapangan, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar;
- Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Pajak Restoran

Realisasi penerimaan Pajak Restoran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp431.118.845.910,00 atau 103,88 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp415.000.000.000,00. Dengan demikian, pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terjadi pelampauan target penerimaan sebesar Rp16.118.845.910,00 atau 3,88 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,38 maka terlihat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah mencapai 6,65 persen.

Keberhasilan pencapaian target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2006, didorong oleh beberapa hal antara lain :

- Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat;
- Kondisi sosial politik Indonesia ditahun 2006 berjalan lebih kondusif sehingga dapat mendukung pertumbuhan disektor pariwisata;
- Adanya peningkatan jumlah kunjungan ke rumah-rumah makan / restoran masih merupakan pilihan sebagai objek konsumtif untuk keperluan keluarga;
- Adanya peningkatan jumlah objek rumah makan/restoran di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Keberhasilan pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2006 karena upaya-upaya yang dilakukan, antara lain :

- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem *self assesment* sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Peningkatan pendataan dilapangan untuk menjaring wajib pajak yang belum mendaftar (belum mempunyai NPWPD);
- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran massa Pajak Restoran.
- Peningkatan Pengawasan melalui *law enforcement*, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey dan observasi dilapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak sehingga dapat data pembanding.

6) Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp169.018.949.547,00 atau 112,68 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp150.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi pajak ini targetnya mengalami peningkatan Rp19.018.949.547,00 atau 12,68 persen. Dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00 maka kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah mencapai 2,60 persen.

Pelampauan target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2006, didorong antara lain oleh :

- Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat;
- Adanya peningkatan jumlah kunjungan ke tempat-tempat hiburan dan rekreasi;
- Adanya peningkatan jumlah objek Pajak Hiburan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Disamping itu, keberhasilan pelampauan pencapaian target penerimaan pajak hiburan pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan, seperti :

- Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey atau persuasif di lapangan guna mendapatkan data atau informasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembayaran setoran massa Pajak Hiburan serta mengupayakan perbaikan terhadap setoran massa yang tidak wajar;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak melalui sistem *self assesment* sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Penagihan yang lebih intensif dengan surat paksa;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak.

7. Pajak Reklame

Realisasi penerimaan Pajak Reklame sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp234.242.366.130,00 atau 104,11 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp225.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi Pajak Reklame dapat melampaui target yang ditetapkan Rp9.242.366.130,00 atau 4,11 persen.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00 maka kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah mencapai 3,61 persen.

Pelampauan pencapaian target penerimaan pajak reklame pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan, yaitu :

- Peningkatan pengawasan pembayaran/setoran Pajak Reklame;
- Peningkatan pengawasan dilapangan melalui *law enforcement* berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;

- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban baik terhadap reklame liar maupun reklame yang telah habis masa berlaku izinnya;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem *self assesment*, sehingga tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat.

8. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp341.076.464.056,00 atau 104,95 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp305.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi penerimaan pajak ini terjadi pelampauan Rp16.676.464.056,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00 maka kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah mencapai 5,26 persen.

Upaya-upaya intensif untuk pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah dilakukan dengan;

- Peningkatan jumlah konsumen pengguna tenaga listrik dari PT PLN akibat dari pertumbuhan sentra-sentra bisnis dan bidang properti;
- Peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan PT. PLN sebagai mitra kerja dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Adanya kenaikan tarif dasar listrik, yang turut mendorong peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- Peningkatan pengawasan terhadap penyetoran Pajak Penerangan Jalan.

9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Realisasi penerimaan pajak ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp59.129.567.846,00 atau 98,55 persen dari proyeksi yang ditetapkan

Rp60.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, target penerimaan yang tidak dapat dicapai Rp870.432.154,00 atau 1,45 persen.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00 maka terlihat kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pajak Daerah mencapai 0,91 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebabkan :

- Pajak ini bersifat regulasi sehingga pemungutan pajaknya lebih diarahkan kepada pengaturan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
- Adanya pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, seperti menjamurnya bisnis pencucian kendaraan yang tidak diikuti dengan pengaturan kebijakan tentang pemungutan pajaknya.

Walaupun pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tidak dapat dicapai namun tetap dilakukan berbagai langkah dan upaya seperti :

- Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan terhadap titik-titik sumur air bawah tanah bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, untuk menjaring wajib pajak yang belum terdaftar(belum mempunyai NPWPD);
- Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Peningkatan kegiatan survey/observasi di lapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak.

10. Pajak Parkir

Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp84.206.407.517,00 atau 105,26 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp80.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi Pajak Parkir terjadi pelampauan target penerimaan Rp4.206.407.517,00 atau 5,26 persen.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.173.338,00, maka kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak daerah mencapai 1,29 persen.

Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Parkir disebabkan oleh adanya pertumbuhan positif dari sektor properti khususnya bagi sentra-sentra bisnis, seperti pembangunan apartemen, mall, plaza yang mendorong para investor untuk membuka usaha perparkiran swasta.

Disamping itu, keberhasilan pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Parkir disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan, seperti :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran Pajak Parkir;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey/observasi dilapangan guna diperoleh data wajib pajak;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistim *self assesment* sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat.

1.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dipungut berdasarkan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, untuk kepentingan pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp444.246.390.913,00 atau 94,01 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp472.531.996.600,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target penerimaan Rp28.285.605.687,00 atau 5,99 persen.

Dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya Rp 8.457.213.596.714,81 maka kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah mencapai 5,25 persen.

Walaupun realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target namun berbagai upaya terus dilakukan secara lebih intensif dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat;
- Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- Peningkatan pengawasan di lapangan;
- Peningkatan koordinasi antara unit pemungut dengan unit satuan kerja terkait.

Berikut disajikan rincian realisasi Retribusi-retribusi Daerah pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tergambar pada tabel 3.4

TABEL 3.4
Realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada Perhitungan
APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
01	Pelayanan Kesehatan	145.074.706.600,00	108.913.252.123,00	(36.161.454.477,00)	75,07
02	Pelayanan Persampahan	6.793.040.000,00	7.760.634.700,00	967.594.700,00	114,24
03	Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Catatan Sipil	1.171.425.000,00	2.980.510.000,00	1.2809.085.000	254,43
04	Penggantian Akte Catatan Sipil	1.748.410.000,00	2.140.178.200,00	391.768.200,00	122,41
05	Pemakaman	6.234.035.000,00	7.063.877.000,00	829.842.000,00	113,31
06	Parkir di Tepi Jalan Umum	20.500.000.000,00	14.407.552.462,00	(6.092.447.538)	70,28
07	Pengujian Kendaraan Bermotor	26.720.000.000,00	23.030.849.000,00	(3.689.151.00,000)	86,19
08	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	947.859.000,00	992.128.322,00	44.269.322,00	104,67
09	Penggantian Biaya Cetak Peta	475.000.000,00	925.128.009,00	450.128.009,00	194,76
10	Pengujian Kapal Perikanan	850.000,00	568.000,00	(282.000,00)	66,82

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
11	Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	26.271.152.000,00	21.707.487.481,00	(4.563.664.519)	82,63
12	Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	2.340.000.000,00	2.317.203.994,00	(22.796.006)	99,03
13	Jasa Usaha Terminal	10.800.487.500,00	8.311.627.097	(2.488.860.403,00)	76,96
14	Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	6.450.000.000,00	3.178.581.745,00	(3.271.418.225)	49,28
15	Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangg./Villa	1.900.000.000,00	2.319.175.000,00	419.175.000,00	122,06
16	Jasa Usaha Penyedotan Kakus	1.175.760.000,00	1.405.417.000	229.657.000	119,53
17	Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	1.305.500.000,00	1.265.346.176,00	(40.153.824)	967,92
18	Jasa Usaha Tempat Pendaratan Kapal	19.650.000,00	21.986.950,00	2.336.950,00	111,89
19	Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.873.973.000,00	14.078.352.450,00	(4.795.623.550)	74,59
20	Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.120.500.000,00	104.703.300,00	(2.015.796.700,00)	4,94
21	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	10.000.000.000,00	16.663.703.186,00	6.663.703.186,00	166,64
22	Izin Mendirikan Bangunan	159.800.000.500,00	190.482.946.007,00	30.682.945.507,00	119,20
23	Izin Gangguan	2.800.000.000,00	3.415.378.621,00	615.378.621,00	121,98
24	Izin Trayek	1.800.000.000,00	1.531.050.000,00	(268.950.000,00)	85,06
25	Retribusi UKM	9.841.425.000,00	2.135.620.500,00	(7.705.804.500,00)	21,70
26	Retribusi Lain-lain	2.656.600.000,00	956.763.590,00	(1.699.836.410,00)	36,01
27	Perizinan dibidang Perindag	4.711.620.000,00	6.022.180.000,00	1.310.560.000,00	127,81
28	Pelayanan Ketenagakerjaan	-	114.190.000,00	114.190.000,00	-
	Jumlah	472.531.996.600,00	444.246.390.913,00	(28.285.605.687,00)	94,01

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp108.913.252.123,00 atau 75,07 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp145.074.706.600,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target sebesar Rp36.161.454.477,00 atau 24,93 persen.

Selanjutnya realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih rinci pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 disajikan pada tabel 3.5

TABEL 3.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

NO	Unit Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Rawat Jalan Kesehatan Dasar	31.211.737.700,00	18.972.136.058,00	(112.239.601.642,00)	60,79
2	Rawat Jalan Semi Spesialis	4.035.802.000,00	2.014.450.725,00	(2.021.351.275,00)	49,91
3	Rawat Jalan Tindakan Khusus	8.877.888.000,00	5.809.032.343,00	(3.068.855.657,00)	65,43
4	Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana	8.975.876.000,00	3.374.376.276,00	(5.241.499.724,00)	41,60
5	Rawat Inap	7.843.741.000,00	5.221.619.575	(2.622.121.425,00)	66,57
6	Poliklinik Spesialis Pagi	7.412.625.000,00	10.462.105.688,00	3.049.480.688,00	141,14
7.	Kamar Gawat Darurat	5.217.985.340,00	5.718.967.239,00	500.981.899,00	109,60
8.	Perawatan	24.236.677.736,00	20.151.945.428,00	(4.084.732.308,00)	83,15
9.	Perawatan Isolasi Perhari	1.666.250.000,00	157.895.192,00	(1.508.354.808,00)	9,48
10.	Perawatan Neonatus Perhari	396.250.000,00	59.003.271,00	(337.246.729,00)	14,89
11.	Perawatan Neonatus dengan Blue Light Per hari	888.000.000,00	252.776.142,00	(635.223.858,00)	29,47
12.	Adm Perawatan Perhari/Setiap perawatan	1.542.031.000,00	837.298.789,00	(704.732.211,00)	54,30
13.	Patologi Klinik	11.971.702.468,00	9.709.384.794,00	(2.262.317.674,00)	81,10
14.	Patologi Klinik Anatomi	73.831.000,00	183.503.247,00	109.672.247,00	248,54
15.	Pemeriksaan Radio Diagnostik	3.858.707.233,00	2.596.293.703,00	(1.262.413.530,00)	67,28
16.	Pemeriksaan Elektromedik	3.538.899.000,00	1.805.952.915,00	(1.732.946.085,00)	51,03

NO	Unit Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
17.	Kamar bersalin/ Rawat Jalan/ Inap/ Tindakan Ringan	6.567.432.760,00	5.351.370.671,00	(1.216.062.089,00)	81,48
18.	Kamar Operasi	8.970.466.000,00	9.907.381.962,00	936.915.962,00	110,44
19.	Kamar bersalin kls III	940.050.000,00	483.545.960,00	(456.504.040,00)	51,44
20.	Tindakan Gigi/Mulut	2.597.778.622,00	1.834.947.990,00	(762.830.632,00)	70,64
21.	Rehabilitasi Medik	1.109.285.735,00	714.547.026,00	(394.738.709,00)	64,42
22.	Perawatan Jenazah	109.615.000,00	74.289.842,00	(35.325.158,00)	67,77
23.	Bedah Rawat Jalan	1.681.400.000,00	2.191.477.639,00	510.077.639,00	130,34
24.	Tindakan Medik Khusus/ Kosmetik	-	-	-	-
25.	Lain-lain Pelayanan Kesehatan	-	272.362.954,00	272.362.954,00	-
	Jumlah	145.074.706.600,00	108.913.252.123,00	(36.161.454.477,00)	75,07

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Target realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak tercapai antara lain disebabkan pelayanan kesehatan dari poliklinik spesialis tidak dapat dibuka setiap hari di Puskesmas Swadana, sehingga berdampak kepada penurunan realisasi pendapatan. Langkah dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi ini, secara intensif antara lain; dengan melakukan Peningkatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp7.760.634.700,00 atau 114,24 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp6.793.1040.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terjadi peningkatan Rp967.594.700,00 atau 14,24 persen.

Tercapainya target realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didukung oleh berbagai upaya antara lain :

- Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi;

- Peningkatan koordinasi dengan unit terkait, dalam upaya pemberdayaan RT/RW dalam pemungutan retribusi sampah.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp2.980.510.000,00 atau 254,43 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.171.425.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, target penerimaan retribusi ini terjadi peningkatan Rp1.809.085.000,00 atau 154,43 persen.

Pelampauan penerimaan retribusi yang signifikan ini utamanya diperoleh dari penggantian biaya cetak kartu keluarga (KK), biaya cetak KTP dan biaya cetak pencatatan mutasi data.

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP antara lain :

- Sosialisasi intensif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai peraturan-peraturan kependudukan. Dengan sosialisasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kependudukan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp7.063.877.000,00 atau 113,31 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp6.234.035.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terdapat pelampauan target penerimaan Rp829.842.000,00 atau 13,31 persen.

Pelampauan target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, diperoleh dari sewa tanah makam dan perpanjangan sewa tanah makam. Peningkatan realisasi tersebut dicapai melalui upaya antara lain, penyuluhan yang intensif kepada masyarakat dan bekerjasama dengan Yayasan yang bergerak dibidang Pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkan tingkat kesadaran

masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

e. Retribusi Parkir

Realisasi penerimaan Retribusi Parkir sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp14.407.552.462,00 atau 70,28 persen dari proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp20.500.000.000,00. Dengan demikian realisasi Retribusi Parkir tidak mencapai target sebesar Rp6.092.447.538,00 atau 29.72 persen.

Walaupun terjadi penurunan penerimaan Retribusi Parkir, namun upaya-upaya yang intensif tetap dilakukan seperti :

- Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan perparkiran.
- Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Survey potensi parkir yang intensif sebagai tolok ukur pengawasan.

Pendapatan retribusi parkir tersebut di atas, bersumber dari Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Realisasi pendapatan terhadap 2 (dua) jenis Retribusi Parkir disajikan pada tabel 3.6

TABEL 3.6
Realisasi pendapatan Retribusi Parkir pada Perhitungan
APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Parkir di Tepi Jalan Umum	10.250.000.000,00	10.429.539.862,00	179.539.862,00	38,81
2	Tempat Khusus Parkir	10.250.000.000,00	3.978.012.600,00	(6.271.987.400,00)	38,81
	Jumlah	20.500.000.000,00	14.407.552.462,00	(6.092.447.538,00)	70,28

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp23.030.849.000,00 atau 86,19 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 Rp26.720.000.000,00.

Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target Rp3.689.151.000,00 atau 13,81 persen.

Walaupun target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak tercapai, namun berbagai upaya terus dilakukan seperti :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- Peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan umum bekerja sama dengan instansi terkait.

g. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp21.707.487.481,00 atau 82,63 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp26.271.152.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp4.563.664.519,00 atau 17,37 persen.

Realisasi pendapatan retribusi tersebut, bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja.

Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 disajikan lebih rinci pada tabel 3.7

TABEL 3.7
Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada
Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Dinas Pertamanan	400.000.000,00	368.061.700,00	(31.938.300,00)	92,02
2.	Dinas Pekerjaan Umum	2.400.000.000,00	1.638.306.843,00	(761.693.157,00)	68,26
3.	Dinas Perhubungan	680.000.000,00	539.739.500,00	(140.260.500,00)	79,37
4.	Dinas Perumahan	5.200.000.000,00	1.998.060.067,00	(3.201.939.933,00)	38,42
5.	Pemakaian gedung milik pmda	150.000.000,00	168.750.000,00	18.750.000,00	112,50

No	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	52.141.000,00	34.400.000,00	(17.741.000,00)	65,97
7.	Dinas Kebersihan	31.200.000,00	28.925.000,00	(2.275.000,00)	92,71
8.	Bapedalda	1.050.000.000,00	853.187.000,00	(196.813.000,00)	81,26
9.	Dinas Olah Raga	522.199.000,00	775.329.600,00	253.130.600,00	148,47
10.	Dinas PJU dan SJU	3.000.000.000,00	806.899.854,00	(2.193.100.146,00)	26,90
11.	Kantor Tm. Ragunan	5.129.825.000,00	4.032.240.500,00	(1.097.584.500,00)	78,60
12.	Dinas Museum dan Kebudayaan	74.000.000,00	65.017.800,00	(8.982.200,00)	87,86
13.	Dinas Tata Pemakaman Umum	515.965.000,00	324.964.000,00	(191.001.000,00)	62,98
14.	Dinas Perindustrian	1.826.600.000,00	1.659.654.100,00	(166.945.900,00)	90,86
15.	Dinas Peternakan Perikanan & Kelautan	3.030.780.000,00	3.016.850.696,00	(13.929.304,00)	99,54
16.	Dinas Kependudukan	80.165.000,00	42.081.000,00	(38.084.000,00)	52,49
17.	Dinas Pertanian & Kehutanan	644.500.000,00	4.231.676.290,00	3.587.176.290,00	656,58
18.	RSUD Koja	115.277.000,00	-	(115.277.000,00)	-
19.	RSUD Pasar Rebo	-	-	-	-
20.	RSUD Budhi Asih	52.500.000,00	-	(52.500.000,00)	-
21.	RSUD Tarakan	19.125.000,00	-	(19.125.000,00)	-
22.	RSUD Duren Sawit	10.000.000,00	4.556.983,00	(5.443.017,00)	45,57
23.	Labkesda	1.286.875.000,00	1.118.786.548,00	(168.088.452,00)	86,94
	J u m l a h	26.271.152.000,00	21.707.487.481,00	(4.563.664.519,00)	82,63

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

h. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp2.317.203.994,00 atau 99,03 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.340.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan tidak dapat mencapai target Rp22.796.006,00 atau sebesar 0,97 persen.

Walaupun target realisasi pendapatan retribusi ini terjadi penurunan, namun tetap dilakukan upaya-upaya seperti; peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penambahan sarana dan prasarana yang disewakan kepada masyarakat, dan intensifikasi pemungutan retribusi.

i. Retribusi Jasa Usaha Terminal

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp8.331.627.097,00 atau 76,96 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp10.800.487.500,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.488.860.403,00 atau sebesar 23,04 persen.

Dengan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Terminal, berbagai upaya dilakukan secara intensif seperti :

- Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal.

j. Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.405.417.000,00 atau 119,53 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.175.760.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terdapat pelampauan target realisasi penerimaan Rp229.657.000,00 atau 19,53 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target realisasi retribusi ini antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui intensifikasi jangka waktu pelayanan;
- Penempatan pos pelayanan ditempat-tempat tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - o Pelayanan untuk konsumen rumah tinggal dilayani dengan kendaraan tangki kecil berkapasitas 3 m3 oleh masing-masing Suku Dinas Kebersihan
 - o Pelayanan untuk konsumen industri dilayani dengan kendaraan besar berkapasitas 6 m3 oleh Dinas Kebersihan.

k. Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.265.346.176,00 atau 96,92 persen dari

proyeksi yang ditetapkan Rp1.305.500.000,00. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp40.153.824,00 atau 3,08 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan retribusi ini antara lain adalah :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan ternak potong di rumah potong hewan.
- Peningkatan pengawasan di lapangan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

I. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp14.078.352.450,00 atau 74,59 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp18.873.976.000,00. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi retribusi yang tidak mencapai target Rp4.795.623.550,00 atau 25,41 persen.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana disajikan pada tabel 3.8

TABEL 3.8
Realisasi pendapatan Retribusi Rekreasi dan Olah raga pada
Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pelayanan Museum Daerah	140.000.000,00	157.535.950,00	17.535.950,00	112,53
2.	Pelayanan Monas	2.086.000.000,00	2.196.716.625,00	110.716.625,00	105,31
3.	Pelayanan Planetarium & Obsv	992.000.000,00	736.771.500,00	(255.288.500,00)	74,27
4.	Citraganda/Multimedia	8.000.000,00	19.580.000,00	11.580.000,00	244,75
5.	Pelayanan Keolahragaan	2.077.801.000,00	2.249.149.375,00	171.348.375,00	108,25
6.	Pelayanan Tm. Ragunan	13.570.175.000,00	8.718.539.000,00	(4.851.636.000,00)	64,25
7.	Sanksi Keterlambatan	-	60.000,00	60.000,00	-
	JUMLAH	18.873.976.000,00	14.078.352.450,00	(4.795.623.550,00)	74,59

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Walaupun Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak mencapai target, upaya-upaya dalam rangka pencapaian target tetap dilakukan seperti :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi;
- Peningkatan pelayanan keolahragaan kepada masyarakat;
- Peningkatan pemantauan dan penyuluhan tempat rekreasi dan olah raga secara periodik kepada masyarakat.

m. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp16.663.703.186,00 atau 166,64 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp10.000.000.000,00. Dengan demikian terdapat pelampauan penerimaan Rp6.663.703.186,00 atau 66,64 persen.

Pelampauan realisasi penerimaan retribusi tersebut, didukung berbagai upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak;
- Pelaksanaan pelayanan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya.

n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp190.482.946.007,00 atau 119,20 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp159.800.000.500,00. Dengan demikian terdapat pelampauan realisasi penerimaan Rp30.682.945.507,00 atau 19,20 persen.

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana disajikan pada tabel 3.9.

TABEL 3.9
Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Pelayanan Ketatakotaan	67.779.000.000,00	97.543.966.677,00	29.764.966.677,00	143,91
2	Pelayanan Pengawasan Pembangunan Kota	68.000.000.000,00	95.530.997.426,00	27.530.997.426,00	140,49
	JUMLAH	135.779.000.000,00	193.074.964.103,00	57.295.964.103,00	142,20

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Pelampauan realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditempuh dengan berbagai upaya antara lain;

- Penyederhanaan proses administrasi kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan melalui percepatan proses pelayanan;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang persyaratan permohonan IMB;
- Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah kotamadya dan menindak tegas pemilik bangunan yang membangun tanpa memiliki izin;

o. Retribusi Izin Undang-undang Gangguan

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Gangguan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.415.378.621,00 atau 121,98 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.800.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terdapat pelampauan penerimaan Rp615.378.621,00 atau 21,98 persen.

Tercapainya target realisasi penerimaan Retribusi Izin Gangguan yaitu dengan dilakukan berbagai upaya, antara lain:

- Peningkatan pendataan tempat usaha secara terus menerus;

- Dilaksanakannya pelayanan keliling ke lokasi padat usaha dengan menggunakan sistem jemput bola;
- Peningkatan pemeriksaan pada tempat-tempat usaha baik yang sudah memiliki izin, maupun yang belum memiliki izin Undang-Undang Gangguan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp131.448.689.490,00 atau 99,83 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 Rp.132.335.966.854,00. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp8.457.426.304.964,81 maka terlihat kontribusi Bagian Laba Usaha Daerah mencapai 1,55 persen. Realisasi pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Penegelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 3.10

TABEL 3.10
Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Berlebih (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5(4-3)	6(4:3)
1	Perusahaan Daerah (PD)	30.837.790.764,00	31.742.175.745,00	904.384.981,00	102,93
2	PT. Patungan	98.482.251.090,00	96.667.463.397,00	(1.814.787.693,00)	98,16
3	Badan Pengelola	750.000.000,00	550.000.000,00	(200.000.000,00)	73,33
4	Royalty	-	245.000.000,00	-	-

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Berlebih (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5(4-3)	6(4:3)
5	Sewa Asset Daerah	525.000.000,00	351.250.000,00	(173.750.000,00)	66,90
6	Kerja sama Asset Daerah	1.740.925.000,00	1.892.800.348,00	151.875.348,00	108,72
JUMLAH		132.335.966.854,00	131.448.689.490,00	(887.277.364,00)	99,33

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing – masing objek dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD)

Pendapatan bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp30.837.790.764,00 adapun realisasinya sebesar Rp31.742.175.745,00 atau 102,93 persen. Pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat realisasi bagian laba ini dapat melampaui target sebesar Rp904.384.981,00 atau 2,93 persen. Kontribusi Perusahaan Daerah pada Tahun Anggaran 2006 apabila dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan maka Kontribusinya mencapai 24,15 persen. Rincian lebih lanjut dapat digambarkan pada tabel 3.11 dibawah ini.

TABEL 3.11
Realisasi Pendapatan Bagian Laba Usaha
Perusahaan Milik Daerah (PD)
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PDAM Jaya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
2	PD. Dharma Jaya	489.605.000,00	403.099.256,00	(86.505.744.,00)	82,33
3	PD. Pasar Jaya	24.018.271.219,00	25.599.635.666,00	1.581.364.447)	106,58

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
4	PD. Pemb. Sarana Jaya	1.329.914.545,00	1.329.914.545,00	-	100,00
5	PD. PAL Jaya	2.000.000.000,00	1.409.526.278,00	(590.473.722,48)	70,48
	Jumlah	30.837.790.764,00	31.742.175.745,00	904.384.981,00	102,93

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan penerimaan dari Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) adalah sebagai berikut :

01) PD. Air Minum Jaya

Dalam APBD Tahun Anggaran 2006 PD. Air Minum Jaya diproyeksikan Rp. 3.000.000.000,00 adapun realisasi setorannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp. 3.000.000.000,00. Dengan demikian pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 kontribusi PDAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat mencapai target sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Kontribusi PAD ini bukan dari bagian laba tetapi merupakan komitmen PDAM Jaya sebagaimana tertuang dalam "Financial Projection" tertuang perjanjian kerja sama dengan mitra swasta.

02) PD. Dharma Jaya

Rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dari Perusahaan Daerah ini Rp 489.605.000,00 adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp403.099.256,00 atau 82,33 persen. Realisasi penerimaan yang diperoleh dari PD. Dharma Jaya tidak mencapai target Rp.86.505.744,00 atau 17,67,hal ini terjadi karena kontribusi PD.Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada realisasi pencapaian laba bersih.

03) PD. Pasar Jaya

Proyeksi penerimaan bagian laba PD. Pasar Jaya dalam APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 24.018.271.219,00 namun realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun anggaran 2006 mencapai Rp.25.599.635.666,00 dengan demikian terlihat adanya pelampauan target penerimaan sebesar Rp.1.581.364.447,00 atau

6,58 persen. Penerimaan ini Merupakan Kontribusi PD Pasar Jaya berdasarkan perolehan laba setelah dikurangi pajak untuk Tahun Buku 2005 .

04) PD. Pembangunan Sarana Jaya

Penerimaan yang berasal dari bagian laba PD. Pembangunan Sarana Jaya pada Tahun Anggaran 2006 di proyeksikan sebesar Rp. 1.329.914.545,00 atau 100 persen.

05) PD. Pengelolaan Air Limbah Jaya

Penerimaan PD. Pengelolaan Air Limbah Jaya pada Tahun Anggaran 2006 di proyeksikan sebesar Rp.2.000.0000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.409.526.278,00 pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, kontribusi PD PAL Jaya turun dari Target yang ditetapkan Rp.590.473.722,00 atau 29,52 persen. Realisasi pendapatan yang diperoleh dari PD. Pal Jaya jika dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (PD) adalah 4,44 persen.

2. Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga PT. Patungan

Realisasi bagian laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga/PT. Patungan pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 96.667.463.397,00 atau 98,16 persen dari diproyeksikan yang ditetapkan sebesar Rp98.482.251.090,00,00. Kontribusi Realisasi Penyertaan Modal ini pada Tahun Anggaran 2006 tidak mencapai target Rp.1.814.787.693,00 atau 1,84 persen. Kontribusi yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga adalah 73,35 persen dari seluruh pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dapat di lihat pada tabel 3.12

TABEL 3.12
Tabel Realisasi Pendapatan Penyertaan Modal Daerah
pada Pihak Ketiga (PT. Patungan)
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Pembangunan Jaya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100
2	PT. Food Station Cipinang	1.500.000.000,00	608.442.720,00	(891.557.280,00)	40,56
3	PT. JIEP	4.800.000.000,00	4.152.707.100,00	(647.292.900,00)	86,51
4	PT. Delta Jakarta	1.778.781.000,00	2.942.809.800,00	1.164.028.800,00	165,44
5	PT. Bumi Grafika Jaya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
6	PT. Pembangunan Jaya Ancol	35.136.000.000,00	35.135.999.939,00	(61,00)	100,00
7	PT. Ratax Armada	264.749.000,00	264.769.000,00	20.000,00	100,01
8	PT. Rheem Indonesia	400.000.000,00	550.000.000,00	150.000.000,00	137,50
9	PT. Kawasan Berikat Nusantara	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	(100.000.000,00)	90,91
10	PT. Alumindo Perkasa	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00
11	PT. Jaya Nur Sukses	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
12	PT. Asuransi Bangun Askrida	2.246.771.090,00	2.246.771.090,00	-	100,00
13	PT. Jakarta Propertindo	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	100,00
14	PT. Bank DKI Jakarta	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	-	100,00
15	PT. Jakarta Tourisindo	800.000.000,00	800.000.000,00	-	100,00
16	PT. Rumah Sakit Haji	392.700.000,00	-	(392.700.000,00)	-
17	PT. RS. Cengkareng	866.250.000,00	10.685.785,00	(855.564.215,00)	1,23
18	PT. RS. Pasar Rebo	500.000.000,00	58.277.963,00	(441.722.037,00)	11,65
	Jumlah	98.482.251.090,00	96.667.463.397,00	(1.814.787.693,00)	98,16

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan realisasi penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga/PT Patungan adalah sebagai berikut :

1) PT. Pembangunan Jaya

Pada Tahun Anggaran 2006 penerimaan deviden PT. Pembangunan Jaya diestimasikan sebesar Rp.1.500.000.000,00 yang merupakan deviden untuk kinerja tahun buku 2005. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau mencapai 100 persen.

2) PT. Food Station Cipinang

Realisasi penerimaan deviden PT. Food Station Cipinang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.608.442.720,00 atau 40,56 persen dari rencana yang ditetapkan Rp1.500.000.000,00. Dengan demikian pada Tahun Anggaran 2006 kontribusi PT.Food Station Cipinang tidak tercapai Rp. 891.557.280,00 atau 59,44 persen.

3) PT. Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP)

Penerimaan Deviden PT. JIEP ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 Rp.4.800.000.000,00. Adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.4.152.707.100,00 atau 86,81 persen. Kontribusi dari PT. JIEP terhadap PAD tidak mencapai target Rp.647.292.900,00 atau 13,49 persen.

4) PT. Delta Jakarta

Penerimaan deviden PT. Delta Jakarta Tbk Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan Rp. 1.778.781.000,00,00 realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp. 2.942.809.800,00 atau 165,54 persen. Realisasi penerimaan deviden yang diperoleh PT. Delta Jakarta dapat melampaui target Rp.1.164.028.800,00 atau 65,44 persen.

5) PT. Bumi Grafika Jaya

Proyeksi penerimaan deviden PT. Bumi Grafika Jaya pada APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.50.000.000,00. Adapun realisasinya mencapai Rp50.000.000,00 atau 100 persen.

6) PT. Pembangunan Jaya Ancol

Dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2006 penerimaan deviden PT Pembangunan Jaya Ancol diproyeksikan sebesar Rp.35.136.000.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Rp.35.135.999.939,00 atau 100 persen. Kontribusi PAD dari pendapatan PT. Pembangunan Jaya Ancol terhadap pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebesar 36,34 persen.

7) PT. Ratax Armada

Proyeksi penerimaan deviden PT. Ratax Armada dalam APBD Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan Rp. 264.749.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.264.769.000,00 atau 100,01 persen. Dengan demikian kontribusi PT. Ratax Armada terhadap pendapatan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebesar 0,27 persen.

8) PT. Rheem Indonesia

Proyeksi penerimaan deviden PT. Rheem Indonesia dalam APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan Rp. 400.000.000,00. Adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.550.000.000,00 atau 137,50 persen. Dengan demikian terdapat pelampauan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.150.000.000,00 atau 37,50 persen. Kontribusi PT. Rheem Indonesia terhadap penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga menjadi 0,57 persen.

9) PT. Kawasan Berikat Nusantara

Proyeksi penerimaan deviden PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) pada APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan Rp.1.100.000.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.1.000.000.000,00 atau 90,91 persen. Kontribusi PAD dari PT. Kawasan Berikat Nusantara sebesar 1,03 persen terhadap kelompok pendapatan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

10) PT. Alakasa Industrindo Tbk d/h PT Alumindo Perkasa

Pada APBD Tahun Anggaran 2006 proyeksi penerimaan deviden PT. Alakasa Industrindo Tbk Rp.47.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.47.000.000,00 atau 100 persen. Dengan demikian kontribusi PT. Alakasa Industrindo Tbk sebesar 0,05 persen terhadap kelompok pendapatan penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

11) PT. Jaya Nur Sukses

Realisasi penerimaan PT. Jaya Nur Sukses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.100.000.000,00, realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 atau 100 persen.

12) PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pada APBD Tahun Anggaran 2006 proyeksi penerimaan deviden PT. Asuransi Bangun Askrida Tbk ditetapkan sebesar Rp.2.246.771.090,00. Realisasi setoran deviden sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp.2.246.771.090,00 atau 100 persen. Kontribusi PT. Asuransi Bangun Askrida terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan jumlah kelompok pendapatan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga adalah sebesar 2,32 persen.

13) PT. Jakarta Proptindo

Pada APBD Tahun Anggaran 200 pembagian deviden dari PT. Jakarta Proptindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diproyeksikan sebesar Rp. 8.000.000.000,00. realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.8.000.000.000,00 atau 100 persen.

14) PT. Bank DKI Jakarta

Proyeksi penerimaan PT. Bank DKI Jakarta pada APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan sebesar Rp.39.000.000.000,00. realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 39.000.000.000,00 atau mencapai 100 persen. Apabila realisasi penerimaan yang diperoleh PT Bank DKI ini dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga maka terlihat kontribusi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 40,34 persen.

3.Badan Pengelola (BP)

Pada Tahun Anggaran 2006 Penerimaan Badan Pengelola diproyeksikan sebesar Rp.750.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 550.000.000,00 atau 73,33 persen. Realisasi penerimaan Badan Pengelola pada Tahun Anggaran

2006 tidak mencapai target Rp200.000.000,00 atau 26,67 persen. Adapun kontribusi penerimaan dari Badan Pengelola kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0.42 persen apabila dibandingkan dengan penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lebih lanjut rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.13

TABEL 3.13
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada
Badan Pengelola (BP) Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	BP. THR Lokasari	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
2	BPLIP Pulogadung	600.000.000,00	400.000.000,00	(200.000.000)	66,67
	JUMLAH	750.000.000,00	550.000.000,00	200.000.000,00	73,33

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Selanjutnya penjelasan realisasi penerimaan Badan Pengelola sebagai berikut :

1) BP. THR Lokasari

Penerimaan pembagian Laba BP THR Lokasari pada Tahun Anggaran 2006 di proyeksikan sebesar Rp.150.000.000,00 adapun realisasinya sesuai dengan target yaitu sebesar Rp.150.000.000,00 atau 100 persen.

2) BPLIP Pulogadung

Penerimaan dari pembagian laba BPLIP Pulogadung pada Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp. 600.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 400.000.000,00 atau mencapai 66,67 persen. Dengan demikian target realisasi yang tidak dapat dicapai sebesar Rp.200.000.000,00 atau 33,33 persen.

4. Sewa Aset Daerah

Rencana penerimaan Sewa Aset Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan sebesar Rp.525.000.000,00 adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.351.250.000,00 atau 66,90 persen. Dengan

demikian terlihat bahwa realisasi pendapatan tersebut tidak mencapai target sebesar Rp.173.750.000,00. atau 33,10 persen.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Sewa Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 3.14

TABEL 3.14
Tabel Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
pada Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Eks Unit Batu Bata Putih II	-	-	-	-
2	Eks Komplek Unit Aloca	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-
3	Eks Toko Tastra Jaya	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-
4	EKS Tanah Unit Kaban/Tn. Tata Hidayat	-	-	-	-
5	PD. Undagi Klender	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	-
6	Tanah Kav No.I C2 (PT. Jaya Nur S)	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-
7	Tanah Kav. Blok III A.A No 9 & 10	75.000.000,00	78.750.000,00	3.750.000,00	105,00
8	Tanah Kav. Blok II J.14/PD. Parwita Jaya	-	-	-	-
9	Pompa Bensin Tebet DB-539 Tebet	-	-	-	-
10	Rudin. Pejaten (PD. Pem. Sarana Jaya)	-	240.000.000,00	240.000.000,00	-
11	Eks Toko Pradipta	65.000.000,00	32.500.000,00	(32.500.000,00)	50,00
	JUMLAH	525.000.000,00	351.250.000,00	(173.750.000,00)	66,90

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

5. Kerja Sama Aset Daerah

Penerimaan Kerja Sama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp.1.740.925.000,00. adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.892.800.348,00 atau 108,72 persen. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi Kerjasama aset ini, dapat melampaui target penerimaan Rp.151.875.348,00 atau 8,72 persen. Dengan demikian kontribusi PAD yang diperoleh dari Kerjasama Aset Daerah adalah sebesar 1,44 persen terhadap Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Rincian lebih lanjut penerimaan Kerjasama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2006 dapat terlihat pada tabel 3.15

Tabel 3.15
Realisasi Pendapatan
Penyertaan Modal Daerah pada Kerja Sama Aset
Daerah Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Langgeng Ayom Lestari	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
2	Yayasan Nawami Bhakti	35.000.000,00	39.474.923,00	4.474.923,00	112,79
3	PT. Rama Krishtira Perkasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
4	PT. Dharma Alumas Sakti	76.325.000,00	76.325.425,00	425,00	100,00
5	PT. Jaya Real Property	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
6	PT. Rointa Eka Jaya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
7	PT. Wahana Cipta Sejahtera	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
8	PT. AGB Tuna	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
9	PT. Pesona Marga M	229.600.000,00	0,00	(229.600.000,00)	0,00
10	Yayasan Dharma BM.	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
11	PT.Hotel Cikini Realty	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	JUMLAH	1.740.925.000,00	1.892.800.348,00	151.875.348,00	108,72

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

1.2.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.399.206.101.639,81 atau 153,27 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp912.928.004.294,00. Dengan demikian pada

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terjadi pelampauan target penerimaan Rp486.278.097.345,81 atau 53,27 persen .

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya mencapai Rp8.457.213.596.714,81 maka terlihat kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD mencapai 16,54 persen.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 3.16

TABEL 3.16
Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah pada
Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	54.500.000.000,00	17.711.713.541,00	(36.788.286.459,00)	32,50
▪ Penerimaan Jasa Giro	89.000.000.000,00	100.098.683.587,81	11.098.683.587,81	112,47
▪ Penerimaan Bunga Deposito	268.000.000.000,00	306.345.705.591,00	38.345.705.591,00	114,31
▪ Sumbangan Pihak Ketiga	34.000.000.000,00	31.013.857.601,00	(2.986.142.399,00)	91,22
▪ TPTGR	3.500.000.000,00	7.570.381.248,00	4.070.381.248,00	216,30
▪ Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	-	256.577.441,00	256.577.441,00	-
▪ Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	1.495.211.918,00	1.295.211.918,00	747,6
▪ Angsuran Cicilan Rumah	1.920.000.000,00	3.462.526.014,00	1.542.526.014,00	180,34
▪ Rupa-rupa Pendapatan	345.751.558.656,00	247.401.226.609,08	(98.350.332.047,00)	71,55
▪ Sewa	20.500.000.000,00	8.984.913.218,00	(11.515.086.782,00)	43,83
▪ Pengembalian	62.507.200.400,00	460.650.200.773,00	398.143.000.373,00	736,96
▪ Kontra Pos	1.213.450.000,00	214.427.812.348,00	213.214.362.348,00	17.670
Jumlah	912.928.004.294,00	1.399.418.809.889,81	486.490.805.595,81	116,38

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 200, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

Realisasi hasil Penjualan Barang Milik Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp17.711.713.541,00 atau 32,50 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp54.500.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasinya tidak mencapai target Rp36.788.286.459,00 atau 67,50 persen.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah dalam Tahun Anggaran 2006 diperoleh dari upaya antara lain :

- Penjualan jalan atau sarana, sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- Penjualan inventaris/barang bekas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang usia pemakaiannya bertambah karena telah dihapuskan seperti kendaraan bermotor, bangunan gedung dan inventaris kantor.
- Penerimaan dari hasil penjualan *brandgang* penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan membayar biaya kompensasi kepada Pemda DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 3.17

TABEL 3.17
Realisasi pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Penjualan Jalan/Sarana	43.500.000.000,00	10.878.094.975,00	(32.621.905.025,00)	25,01
2.	Penjualan Inventaris/Barang Bekas	6.000.000.000,00	3.834.188.316,00	(2.165.811.684,00)	63,90
3.	Penjualan Brandgang	5.000.000.000,00	2.999.430.250,00	(2.000.569.750,00)	59,99
	Jumlah	54.500.000.000,00	17.711.713.541,00	(36.788.286.459,00)	32,50

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

b. Jasa Giro

Realisasi penerimaan Jasa Giro sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp100.098.683.587,81 atau 112,47 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp89.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD

Tahun Anggaran 2006 terlihat adanya pelampauan target penerimaan Rp36.788.286.459,00 atau 12,47 persen.

Pelampauan realisasi pendapatan tersebut bersumber dari :

- Hasil optimalisasi penempatan dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang disimpan di Bank Pemerintah yaitu pada Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BRI dan , Bank BNI;
- Jasa Giro yang berasal dari Giro Pemerintah Daerah (KPKD) dan Jasa Giro para Pemegang Kas;

c. Bunga Deposito

Bunga Deposito sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006, realisasinya mencapai Rp306.345.705.591,00 atau 114,31 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp268.000.000.000,00. Sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terjadi pelampauan penerimaan Rp38.345.705.591,00 atau 14,31 persen.

Adapun realisasi pendapatan Bunga Deposito bersumber dari penempatan atas dana yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang disimpan pada bank-bank pemerintah seperti Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI.

d. Angsuran Cicilan Rumah

Realisasi penerimaan Angsuran Cicilan Rumah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.462.526.014,00 atau 180,34 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.920.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terjadi pelampauan target penerimaan Rp1.542.526.014,00 atau 80,34 persen.

Pencapaian target realisasi penerimaan Angsuran Cicilan Rumah diupayakan dari:

- Cicilan uang muka rumah susun Rp451.210.728,00;
- Sewa beli rumah susun Rp2.990.337.786,00;
- Sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli Rp20.977.500,00

e. Rupa-rupa Pendapatan

Realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp247.188.518.359,00 atau 71,49 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp345.751.558.656,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan tidak mencapai target sebesar Rp98.350.332.047,00 atau 28,45 persen.

Selanjutnya realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 4.21

TABEL 3.18
Realisasi penerimaan Rupa-Rupa Pendapatan pada
Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Dinas Tenaga Kerja/Premi Asuransi	2.500.000.000,00	2.724.009.827,00	224.009.827,00	108,96
2	Dinas Pertambangan	-	512.696.278,00	512.696.278,00	-
3	TM Ragunan	379.010.000,00	703.648.501,00	324.638.501,00	185,65
4	Jaminan untuk Pemasangan Reklame	-	1.096.630.676,00	1.096.630.676,00	-
5	Hasil Lelang Titik Reklame	40.000.000.000,00	21.792.365.151,00	(18.207.634.879,00)	54,48
6	Asuransi Kesehatan	-	295.000,00	295.000,00	-
7	RSUD Budhi Asih	6.434.100.000,00	5.831.819.400,00	(602.280.600)	90,64
8	RSUD Koja	375.327.000,00	-	(375.327.000,00)	-
9	RSUD Tarakan	581.793.000,00	2.536.500,00	(579.256.500,00)	0,44
10	RSUD Duren Sawit	35.000.000,00	12.569.775,00	(22.430.225,00)	35,91
11	Puskesmas	18.381.130.000,00	19.048.242.652,00	667.112.652,00	103,63
12	Biaya Penutupan galian	1.000.000.000,00	2.075.891.846,00	1.075.891.846,00	207,59
13	Sumbangan Perum Jasa Raharja	2.500.000.000,00	5.044.751.950,00	2.722.664.520,00	201,79
14	Fasos/Fasum	9.204.537.000,00	6.481.872.480,00	(2.722.664.520,00)	70,42
15	Biaya penyelesaian desimal	-	1,15	1,15	-
16	Eks. Kanwil Deperindang	3.150.000.000,00	2.386.885.423,00	(763.114.577,00)	75,77
17	Sewa Rusun Sederhana Cipinang Muara	-	147.177.000,00	147.177.000,00	-
18	Kompensasi Pemb. Menara Telekomunikasi	7.200.000.000,00	90.405.000,00	(7.109.595.000,00)	1,26
19	Sewa Rusun Sederhana Flamboyan	-	195.620.000,00	195.620.000,00	-
20	Sewa Rusun Sederhana Penjaringan	-	207.144.000,00	207.144.000,00	-

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
21	Sewa Rusun Sederhana Pulo Jahe	-	81.596.000,00	81.596.000,00	-
22	Penerimaan Pembayaran Air PDAM Rusunawa	160.000.000,00	446.672.183,00	286.672.183,00	279,17
23	Eks. Kanwil Dephub	2.441.810.000,00	602.473.200,00	(1.839.336.800,00)	24,67
24	Eks. Kanwil Depnaker	-	500.000,00	500.000,00	-
25	RSB Tambora Jakarta Pusat	-	227.253.319,00	227.253.319,00	-
26	RSB Cipinang Besar Utara Jakarta Timur	-	54.582.870,00	54.582.870,00	-
27	RSB Karang Anyar Jakarta Pusat	-	137.791.800,00	137.791.800,00	-
28	BP Trans Jakarta (Bus Way)	205.000.000.000,00	130.514.012.500,00	74.485.987.500,00	63,67
29	PT. Nakia Dwipardha	-	446.919.320,00	446.919.320,00	-
30	PT.Suwar Andhika Wahana Ujjindo	-	87.744.880,00	87.744.880,00	-
31	Hibah BPPN	46.408.851.656,00	46.408.851,656,85	0,85	100,00
32	Jaminan Pek. Dinas PJU & SJU	-	15.344.400,00	15.344.400,00	-
33	Jaminan Penawaran	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-
34	Jaminan Pelaksanaan	-	8.718.050,00	8.718.050,00	-
35	Penyetoran Kembali				
	Jumlah	345.751.558.656,00	247.401.226.609,00	(98.350.332.047,00)	71,55

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

2. Bagian Dana Perimbangan

Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 bagian penerimaan daerah dari Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, terdiri dari Penerimaan SDA sektor Perikanan, SDA sektor Minyak Bumi dan SDA sektor Gas Alam, serta Dana Alokasi Umum.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. Realisasi penerimaan daerah atas Dana Perimbangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp6.515.284.274.637,00 atau 97,81 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp5.764.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp145.715.725.363,00 atau 2,19 persen.

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah yang jumlahnya mencapai Rp15.327.795.967.748,00 maka kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 42,50 persen.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan tersebut bersumber dari :

- Bagi Hasil Pajak realisasinya mencapai Rp5.533.851.713.065,00 atau 96,01 persen;
- Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya mencapai Rp212.940.461.571,00 atau 170,35 persen;
- Dana Alokasi Umum realisasinya mencapai Rp768.492.100.000,00 atau 99,55 persen.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 3.19

TABEL 3.19
Realisasi pendapatan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
I.	Bagi Hasil Pajak	5.746.000.000.000,00	5.533.851.713.066,00	(230.148.286.934,00)	96,01
	▪ Pajak Bumi dan Bangunan	1.186.857.793.132,00	1.271.065.048.631,00	84.207.255.499,00	107,09
	▪ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.337.972.437.358,00	996.192.141.680,00	(371.780.295.678,00)	72,21
	▪ Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.064.000.000.000,00	3.072.665.317.903,00	8.665.317.903,00	100,28
	▪ Pendapatan Biaya Pemungutan PBB	101.497.756.662,00	115.705.707.455,00	14.207950.793,00	113,99-

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
II.	▪ Penerimaan PBB bagi Pemerintah Pusat yang diserahkan kembali	11.644.450.206,00	102.092.977.947,00	90.448.527.741,00	876,75-
	▪ Penerimaan BPHTB bagi Pemerintah Pusat yang diserahkan kembali	-	7.043.514.470,00	7.043.514.470,00	-
	▪ Penerimaan Insentif PBB bagi Pempus. u/ DATI II	50.000.000.000,00	-	(50.000.000.000,00)	-
	▪ Penerimaan BPHTB bagi Pempus. Yg diserahkan kembali	12.027.562.642,00	6.130.519.450,00	(5.897.043.192,00)	50,97
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	125.000.000.000,00	212.940.461.571,00	87.940.461.571,00	170,53
	▪ Pendapatan SDA Sektor Perikanan	1.900.000.000,00-	1.548.177.954,00	(351.822.046,00)	81,48-
	▪ Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi	114.600.000.000,00	198.681.116.079,00	84.081.116.079,00	173,37
	▪ Pendapatan SDA Sektor Gas Alam	8.500.000.000-	12.711.167.538,00	4.211.167.538,00	149,54-
	▪ Pemberian Hak Atas Tanah Negara (BPN)	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	772.000.000.000,00	768.492.100.000,00	(3.507.900.000,00)	
III.	• Dana Pembangunan Daerah	-	768.492.100.000,00	768.492.100.000,00	-
	• Dana Rutin Daerah	772.000.000.000,00	-	(772.000.000.000,00)	
	JUMLAH	6.661.000.000.000,00	6.515.284.274.637,00	(145.715.725.363,00)	97,81

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Bagian Dana Perimbangan, pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

I. Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp5.533.851.713.066,00 atau 96,01 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp5.764.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terjadi target yang tidak dapat dicapai Rp230.148.286.934,00,00 atau 3,99 persen.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana Perimbangan, maka kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan sangat signifikan yaitu mencapai 84,93 persen.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp1.271.065.048.631,00 atau 107,09 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.186.857.793.132.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terjadi pelampauan target penerimaan Rp84.207.255.499,00 atau 7,09 persen.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditempuh berbagai upaya yang intensif, antara lain :

- Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- Pemutakhiran data objek dan subjek PBB;
- Peningkatan sistem pelayanan pembayaran melalui **“payment on line system”** di beberapa bank, sebagai tempat pembayaran PBB di 5 (lima) wilayah Kotamadya.
- Pemberian hadiah dan penghargaan kepada RT/RW yang berprestasi dalam membantu pelaksanaan pemungutan PBB.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagian daerah dari penerimaan BPHTB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp966.192.141.680,00 atau 72,21 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.337.972.437.358,00,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, target realisasi yang tidak dapat dicapai sebesar Rp371.780.295.678,00 atau 27,79 persen.

Walaupun Realisasi penerimaan BPHTB tersebut tidak mencapai target, langkah dan upaya yang dilakukan yaitu: peningkatan koordinasi dan kerja sama pengawasan terhadap setiap transaksi jual beli tanah dan bangunan antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pelayanan PBB, dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara; serta pemberian penghargaan dan hadiah kepada PPAT yang berprestasi dalam pemungutan BPHTB di 5 (lima) wilayah Kotamadya.

c. Pajak Penghasilan Perorangan (PPh)

Bagian daerah Provinsi DKI Jakarta dari penerimaan PPh realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.072.665.317.903,00 atau 100,28 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp3.064.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terdapat pelampauan target penerimaan PPh mencapai Rp8.665.317.903,00 atau 0,28 persen.

Walaupun PPh ini merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat, namun tetap diupayakan peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PPh, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan upaya tersebut telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2002 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-21/Pj/2004 tentang Koordinasi Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan Jakarta ditunjuk sebagai Pilot Proyek di seluruh Indonesia.

II. Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp212.940.461.571,00 atau 170,35 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp125.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak terdapat pelampauan target penerimaan Rp87.940.461.571,00 atau 70,35 persen.

Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Bukan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356-K/80/Men/2004 tentang Penetapan Dana Perhitungan Bagian Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun 2005 yang bersumber dari :

- Penerimaan SDA Sektor Perikanan realisasinya Rp1.909.902.586,00

- Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi realisasinya Rp128.002.833.863,00
- Penerimaan SDA Sektor Gas Alam realisasinya Rp8.533.226.505,00

III. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp768.492.100.000,00 atau 99,55 persen, dari proyeksi yang telah ditetapkan Rp772.000.000.000,00. realisasi DAU pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, tidak tercapai target penerimaannya Rp.3.507.900.000,00 atau 2,19 persen Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan, maka terlihat kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan mencapai 11,79 persen. Realisasi penerimaan DAU ditetapkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005, dan SE DJA Nomor 03/A/2004 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2005.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005 mencapai Rp109.058.000.000,00 atau 100,00 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp109.058.000.000,00. Pendapatan ini merupakan Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 626/PMK.02/2004 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2005 kepada Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota.

1.3 Permasalahan dan Solusi

1.3.1 Permasalahan

Dalam pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya yang berkaitan dengan upaya tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah, terdapat beberapa permasalahan untuk pajak Kendaraan Bermotor BBN-KB, kondisi pertumbuhan jumlah kendaraan negatif, menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif, disamping konsumsi otomotif tidak menjadi obyek pilihan utama bagi masyarakat dan menurunnya produksi dalam negeri pada sektor otomotif.

Sedangkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel disebabkan; menurunnya jumlah hunian kamar hotel bintang lima dan hotel bintang lima berlian sebagai dampak berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara sebagai pengguna jasa hotel dan tidak menjadi objek pilihan utama bagi sebagian masyarakat.

Selain itu, tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebabkan permasalahan sebagai berikut :

- Pajak ini bersifat regulasi sehingga pemungutan pajaknya lebih diarahkan kepada pengaturan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
- Adanya pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, seperti menjamurnya bisnis pencucian kendaraan yang tidak diikuti dengan pengaturan kebijakan tentang pemungutan pajaknya.

Pada bagian ini, permasalahan yang dialami terhadap target realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak tercapai antara lain disebabkan **pelayanan kesehatan dari poliklinik spesialis tidak dapat dibuka setiap hari di Puskesmas Swadana**, sehingga berdampak kepada penurunan realisasi pendapatan.

1.3.2 Solusi

Solusi yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk dapat mengatasi permasalahan meliputi hal-hal sebagai berikut untuk mencapai target realisasi penerimaan PKB BBN-KB berbagai langkah dan upaya dilakukan secara optimal, antara lain :

- Penyampaian Surat pemberitahuan (Super) PKB secara intensif.

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait maupun pihak swasta seperti Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), pengusaha/pemilik showroom dan Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor dan Gaikindo.
- Peningkatan pendataan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di kawasan tertentu.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak, seperti pelayanan samsat keliling.
- Penelitian dan pendataan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang.
- Koordinasi pengawasan pembayaran PKB dilakukan lebih intensif melalui operasi/razia bekerja sama dengan pihak kepolisian.
- Peningkatan pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan nilai jual kendaraan bermotor;
- Peningkatan survey dilapangan dan pengumpulan data lainnya untuk menentukan Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta;
- Peningkatan pengawasan pembayaran BBN-I (kendaraan baru) yang tidak dibayar melalui modus ganti nama, ganti nomor chasis dan lainnya.

Untuk meningkatkan realisasi Pajak Hotel, sesuai yang dilakukan Pemerintah Provinsi meliputi :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa pajak hotel;
- Penagihan secara intensif atas tunggakan Pajak Hotel termasuk penagihan dengan surat paksa;
- Pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan di lapangan, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar;

- Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam upaya solusi pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berbagai langkah dan upaya dilakukan meliputi :

- Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan terhadap titik-titik sumur air bawah tanah bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar(belum mempunyai NPWPD);
- Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Peningkatan kegiatan survey/observasi di lapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak.

Selanjutnya dalam upaya mengatasi permasalahan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir Retribusi Pengisian Kendaraan Bermotor, Retribusi terus dilakukan seperti :

- Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan perparkiran.
- Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Survey potensi parkir yang intensif sebagai tolok ukur pengawasan.

Untuk mengatasi permasalahan target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak tercapai, berbagai upaya terus dilakukan seperti : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; dan Peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan umum bekerja sama dengan instansi terkait.

Sementara itu, solusi permasalahan tidak tercapai target penerimaan Retribusi Terminal, berbagai upaya dilakukan secara intensif seperti : Peningkatan

pembinaan kepada Wajib Retribusi; Peningkatan pemantauan di terminal-terminal; dan Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal.

Mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian terget realisasi retribusi kebersihan antara lain dilakukan : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui intensifikasi jangka waktu pelayanan serta Penempatan pos pelayanan ditempat-tempat tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Pelayanan untuk konsumen rumah tinggal dilayani dengan kendaraan tangki kecil berkapasitas 3 m³ oleh masing-masing Suku Dinas Kebersihan Kotamadya,
- Pelayanan untuk konsumen industri dilayani dengan kendaraan besar berkapasitas 6 m³ oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi RCH yang tidak mencapai target ditempuh dengan upaya-upaya antara lain Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan ternak potong di rumah potong hewan, Peningkatan pengawasan di lapangan, serta Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam upaya mengatasi permasalahan pada Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak mencapai target, dilakukan solusi : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi; Peningkatan pelayanan keolahragaan kepada masyarakat; serta Peningkatan pemantauan dan penyuluhan tempat rekreasi dan olah raga secara periodik kepada masyarakat.

Langkah dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi ini, secara intensif antara lain; dengan melakukan Peningkatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

2.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana diuraikan dalam pola baru APBD, disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (*performance-based budgeting*). Kemudian pengelompokan belanja dirumuskan kedalam struktur pola baru yaitu dengan pendekatan bidang, fungsi, program, kegiatan dan rincian kegiatan. Sesuai Renstrada 2002-2007 struktur program terbagi kedalam 8 (delapan) bidang pembangunan yaitu bidang hukum, ketentraman, ketertiban umum dan kesatuan bangsa; bidang pemerintahan; bidang ekonomi; bidang pendidikan dan kesehatan; bidang kependudukan dan ketenagakerjaan; bidang sosial dan budaya; bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bidang sarana dan prasarana Kota. Kedelapan bidang tersebut terdiri dari 32 fungsi dan 107 program.

2.2 Target dan Realisasi Belanja

2.2.1 Belanja Daerah Menurut Bidang Pembangunan

TABEL 3.20
Realisasi Belanja Daerah menurut Bidang Pembangunan
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No.	BIDANG PEMBANGUNAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Hukum Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa	677.167.891.197,00	609.482.507.786,00	90,00
2	Pemerintahan	7.351.252.815.255,00	6.335.788.676.424,00	86,19
3	Ekonomi	717.292.963.178,00	605.945.260.481,00	84,48
4	Pendidikan dan Kesehatan	2.420.432.077.998,00	2.166.420.536.363,00	89,51
5	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	209.157.458.496,00	184.958.670.039,00	88,43
6	Sosial dan Budaya	795.308.923.007,00	645.502.361.997,00	81,16
7	Sumberdaya Alam dan Lingk.Hidup	1.197.593.409.376,00	953.738.739.437,00	79,64
8	Sarana dan Prasarana Kota	4.804.145.924.013,00	3.680.347.148.771,00	76,61
	Jumlah	18.172.351.462.520,00	15.182.183.901.298,00	83,55

2.2.2 Belanja Daerah Menurut Kelompok Dan Jenis Belanja

Tabel 3.21
Realisasi Belanja Daerah Menurut Kelompok dan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No.	KELOMPOK/JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	APARATUR	5.894.215.675.797,00	5.037.500.669.171,00	85,47
I	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	3.611.616.901.891,00	3.189.003.166.710,00	88,30
	1. Belanja Pegawai	2.527.812.295.832,00	2.365.509.269.193,00	93,58
	2. Belanja Barang dan Jasa	950.126.849.176,00	718.584.642.725,00	75,63
	3. Belanja Perjalanan Dinas	7.879.600.000,00	4.564.670.410,00	57,93
	4. Belanja Pemeliharaan	125.798.156.883,00	100.344.584.382,00	79,77
II	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1.232.738.213.444,00	1.000.273.277.169,00	81,14
	1. Belanja Pegawai	548.072.273.363,00	475.897.324.841,00	86,83
	2. Belanja Barang dan Jasa	539.523.988.520,00	414.625.557.728,00	76,85
	3. Belanja Perjalanan Dinas	27.546.757.000,00	21.904.257.485,00	79,52
	4. Belanja Pemeliharaan	117.595.194.561,00	87.846.137.115,00	74,70
III	BELANJA MODAL	1.049.860.560.462,00	848.224.225.292,00	80,79
	PELAYANAN PUBLIK	12.278.135.786.723,00	10.144.683.232.127,00	82,62
I	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	2.744.863.199.798,00	2.650.032.375.058,00	96,55
	1. Belanja Pegawai	2.576.075.628.327,00	2.508.158.973.814,00	97,36
	2. Belanja Barang dan Jasa	130.029.952.802,00	109.477.025.670,00	84,19
	3. Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
	4. Belanja Pemeliharaan	38.757.618.669,00	32.396.375.574,00	83,59
II	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	4.385.574.418.138,00	3.848.821.542.674,00	87,76
	1. Belanja Pegawai	853.385.273.285,00	784.819.356.878,00	91,97
	2. Belanja Barang dan Jasa	2.570.789.170.464,00	2.208.710.266.964,00	85,92
	3. Belanja Perjalanan Dinas	17.192.640.200,00	12.003.576.069,00	69,82
	4. Belanja Pemeliharaan	944.207.334.189,00	843.288.342.763,00	89,31
III	BELANJA MODAL	4.778.351.486.464,00	3.366.061.303.817,00	70,44
IV	BELANJA BANTUAN KEU	293.633.682.323,00	278.773.541.578,00	94,94
V	BELANJA TIDAK TERSANGKA	75.713.000.000,00	994.469.000,00	1,31
	Jumlah	18.172.351.462.520,00	15.182.183.901.298,00	83,55

Sementara itu menurut jenis belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)

No.	JENIS	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI %	REALISASI	
				(Rp)	(%)
I	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	6.356.480.101.689,00	34,98	5.839.035.541.768	91,86
	1. Belanja Pegawai	5.103.887.924.159,00	80,29	4.873.668.243.007,00	83,47
	2. Belanja Barang dan Jasa	1.080.156.801.978,00	16,99	828.061.668.395,00	14,18
	3. Belanja Perjalanan Dinas	7.879.600.000,00	0,12	4.564.670.410,00	0,08
	4. Belanja Pemeliharaan	164.555.775.552,00	2,59	132.740.959.956,00	2,27
II	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	5.618.312.631.582,00	30,92	4.849.094.819.843,00	86,31
	1. Belanja Pegawai	1.401.457.546.648,00	24,94	1.260.716.681.719,00	26,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	3.110.313.158.984,00	55,36	2.623.335.824.692,00	54,10
	3. Belanja Perjalanan Dinas	447.39.397.200,00	0,80	33.907.833.554,00	0,70
	4. Belanja Pemeliharaan	1.061.802.528.750,00	18,90	931.134.479.878,00	19,20
III	BELANJA MODAL	5.828.212.046.926,00	32,07	4.214.285.529.109,00	72,31
IV	BELANJA BANTUAN KEU	293.633.682.323,00	1,62	278.773.541.578,00	94,94
V	BELANJA TIDAK TERSANGKA	75.713.000.000,00	0,42	994.469.000,00	1,31
	Jumlah	18172.351.462.520,00	100,00	15.182.183.901.298,00	83,55

a. Belanja Administrasi Umum

Pada Tahun Anggaran 2006, Belanja Administrasi Umum dialokasikan sebesar Rp6.356.480.101.689,00 atau 34,98 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp5.839.035.541.768,00 atau 91,86 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp517.444.559.921

Belanja Pegawai dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp5.103.887.924.159,00 atau 80,29 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.873.668.243.007,00 atau 83,47 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp230.219.681.152,00

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.080.156.801.978,00 atau 16,99 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp828.061.668.395,00 atau 14,18 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp252.092.133.583,00.

Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp7.879.600.000,00 atau 0,12 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.564.670.410,00 atau 0,08 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.314.929.590,00.

Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp164.555.775.552,00 atau 2,59 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp132.740.959.956,00 atau 2,27 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp31.814.815.596,00.

b. Belanja Operasi Dan Pemeliharaan

Kelompok Belanja Operasi Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp5.618.312.631.582,00 atau 24,94 persen dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.849.094.819.843,00 atau 86,31 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp769.217.811.739,00.

Belanja Pegawai dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp1.401.457.546.648,00 atau 24,94 persen dari total kelompok Belanja Operasi Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp1.260.716.681.719,00 atau 26,00 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp140.740.864.929,00.

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp3.110.313.158.984,00 atau 55,36 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp2.623.335.824.692,00 atau 54,10 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp486.977.334.292,00.

Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp44.739.397.200,00 atau 0,80 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp33.907.833.554,00 atau 0,70 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.831.563.646,00.

Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp1.061.802.528.750,00 atau 18,90 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp931.134.479.878,00 atau 19,20 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp130.668.048.872,00.

c. Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp5.828.212.046.926,00 atau 32,07 persen dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.214.285.529.109,00 atau 27,76 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.613.926.517.817,00.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria :

- Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan.

Obyek belanja transfer adalah organisasi sosial, organisasi profesi dan organisasi lainnya seperti biaya operasional KPUD, BP Trans Jakarta, bantuan Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, Yayasan Jantung Anak Indonesia dan Bantuan Masjid Al Mujahidin.

Kelompok Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp293.633.682.323,00 atau 1,62 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.278.773.541.578,00 atau 1,84 persen.

e. Belanja Tidak Tersangka

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah. Belanja Tidak Tersangka juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar Rp75.713.000.000,00 atau 0,42 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp994.469.000,00 atau 0,01 persen. Rendahnya realisasi menunjukkan kinerja perencanaan keuangan dimana pengeluaran dalam Belanja Tidak Tersangka hanya digunakan untuk hal-hal mendesak yang memerlukan penanganan segera.

2.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2006 sampai dengan akhir Desember 2006 (triwulan IV), terdapat beberapa permasalahan utama belanja daerah yang dapat dikemukakan antara lain; **Pertama**, terlambatnya pengesahan APBD sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap kemungkinan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2006 yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan/rincian kegiatan sehingga tingkat penyerapan anggaran menjadi rendah. **Kedua** perlu adanya penyesuaian belanja pegawai dan TAL, **Ketiga** adanya beberapa kelompok pendapatan yang diproyeksikan tidak mencapai target. dan **Keempat**, masih terdapatnya kesalahan dalam penulisan/input kode rekening, volume dan satuan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), sehingga perlu adanya revisi dalam rangka penyesuaian, yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan, bahkan ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka solusi harus dilakukan adalah **Pertama**, pengesahan APBD dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. **Kedua** perlu ada sistem penghitungan gaji yang valid. **Ketiga**, perlu adanya penyesuaian pendapatan akibat beberapa kelompok pendapatan diproyeksikan tidak mencapai target.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemda Provinsi DKI Jakarta masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2007, dengan demikian laporan disajikan berdasar pembidangan berdasar Renstrada tersebut yang memuat rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan solusinya sebagai berikut :

1. Bidang Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

1.1 Fungsi Hukum

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyusun, menata, mengembangkan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, dengan melaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.1.1 Program Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Hasil yang dicapai pada tahun 2006, setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian, pada tahun 2006 terdapat 8 produk hukum yang tidak sesuai lagi dan dilakukan menyempurnakan 6 Perda serta dibutuhkan tambahan produk hukum baru sebanyak 6 Raperda dan 5 Peraturan Gubernur. Oleh sebab itu, pada tahun 2006 telah diselesaikan evaluasi dan pengkajian terhadap : (1) Pejanjian Kerjasama Penggunaan Usahaan Lahan d Kawasan BPLIP ropinsi DKI Jakarta; (2) Peraturan Perundangpundangan tentang Pengendalian Penataan Bangunan di Bawah Jaringan Tegangan Tinggi dan Jalan Layang; (3) Perjanjian Kerjasama Penggunaan Usahaan di Kawasan THR Lokasari; (4) Perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan SLTPN 56 Jakarta; (5) Peraturan

perundangan tentang penataan pedagang kaki lima; (6) Peraturan perundangan tentang pembangunan menara transmisi di DKI Jakarta; (7) Peraturan perundangan tentang tata cara penerimaan kewajiban dan pemegang SIPPT; (8) Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan rumah sakit milik Daerah.

Disamping itu telah dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang (1) Nomor 5 Tahun 1971 tentang Industri Petasan, (2) Perda Nomor 6 Tahun 1971 tentang Kerajinan Petasan, (3) Perda Nomor 7 Tahun 1971 tentang Peraturan Perlengkapan dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan, (4) Perda Nomor 12 Tahun 1971 tentang Pencegahan Pengotoran Udara, Airdan Lepas Pantai, (5) Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, (6) Perda Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penetapan RSUD Koja, RSUD Tarakan dan RSUD Budhi Asih sebagai unit swadaya daerah, juga ditetapkannya Raperda baru tentang (1) Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum, (2) Ruang Terbuka Hijau, (3) Pelayanan Prima, (4) Program Legislasi Daerah, (5) Peran Serta Masyarakat, (5) Peredaran Pengendalian Minuman Beralkohol, dan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang (1) Pendirian dan Pengembangan Usaha Koperasi, (2) Juklak Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan; (3) Tata Cara Pengadaan Tanah, (4) Pedoman Harga Dasar Air Permukaan; (5) Juklak Pemanfaatan Air Permukaan.

1.1.2 Program Peningkatan Kesadaran Hukum

Hasil yang dicapai pada Tahun 2006 (1) Gema Hukum Ibukota melalui media TV; (2) 750 Pegawai Pemda dalam penyuluhan hukum terpadu; (3) talk show interaktif melalui media radio; (4) 8.000 siswa, dan 8.000 mahasiswa serta 8.000 generasi muda pada kampanye kesadaran hukum pelajar, mahasiswa dan generasi muda akan hak dan kewajibannya dan kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.

1.1.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 (1) koordinasi bantuan hukum dengan 14 instansi peradilan, (2) terinventarisasi dan terevalasinya 45 perkara, (3) terselesaikannya masalah pertanahan atas pengaduan masyarakat sebanyak 590 kasus dari 624 kasus pengaduan masyarakat, sisanya masih dalam proses penyelesaian, dan (4) terselesaikannya 2 perkara perdata dan pidana dari 28 perkara karena masih proses di Pengadilan Negari 15 perkara dan Pengadilan Tinggi 11 perkara.

1.2 Fungsi Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari serta meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana yang sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan melaksanakan 4 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.2.1 Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 (1) terbinaannya 796 orang anggota linmas RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya dan propinsi, (2) terbinanya 990 orang anggota linmas dalam penanggulangan bencana, (3) terselenggaranya diklat pengendalian massa (Dalmas) Pol PP 150 orang, (4) terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait termasuk muspida dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan masyarakat, (5) pemetaan lokasi rawan pelanggaran perda di 40 titik, (6) tersusunna rancangan pedoman pembinaan Linmas tingkat RT/RW sampai dengan Propinsi, (7) tersusunnya prosedur tetap tentang penggunaan senjata api di lingkungan Dinas Tramtib dan Linmas. Disamping itu tahun 2006 dapat menurunkan kejadian tawuran masyarakat dari 46 kasus pada tahun 2005 menjadi 31 kasus pada tahun 2006. Sedangkan rasio petugas tramtib baru mencapai 1 : 1.500 yang seharusnya 1 : 1.000.

1.2.2 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Tramtibmas dan Penanggulangan Bencana

Hasil yang dicapai (1) penetapan Instruksi Gubernur Nomor 112 Tahun 2006 tentang Antisipasi situasi musim hujan, (2) penetapan Instruksi Gubernur Nomor 85 Tahun 2006 tentang mitigasi dampak kemarau dan renops penanggulangan banjir 2006/2007, (3) penanggulangan narkoba, (4) penanganan dan evakuasi pengungsi korban bencana di 34 lokasi, (5) terkendalinya penyaluran bantuan korban bencana di 210 lokasi, (6) operasi penyelamatan korban bencana di 54 lokasi bencana. Disamping itu tahun 2006 terjadi penurunan pelanggaran hukum di kalangan masyarakat dari 349.202 kasus pada tahun 2005 menjadi 329.124 kasus pada tahun 2006.

1.2.3 Program Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Hasil yang dicapai dalam peningkatan peralatan meliputi (1) tersedianya mobil water suplay system 10.000 dan 1 unit dan 4.000 liter 9 unit, (2) mobil rescue 1 unit, (3) mobil radio komunikasi 1 unit, (4) penambahan fire jacket 1.377 buah dan fire helmet 530 buah, (5) tersedianya asrama Pegadungan 10 unit dan asrama Jagakarsa 10 unit (6) pembangunan hidrant di 65 titik. kemudian dalam peningkatan keterampilan dan kemampuan aparat meliputi, (1) meningkatkan kemampuan dan keterampilan 100 orang petugas pemadam kebakaran, (2) pemeriksaan pada 222 bangunan tinggi, 396 bangunan menengah dan 4.407 bangunan rendah. Kemudian dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran terdapat peningkatan kepada 141 orang teradap penanggulangan kebakaran, tersuluhnya 5.265 orang tentang penanggulangan kebakaran dan meningkatnya pengetahuan 97 orang tentang bahaya kebakaran.

Disamping itu pada tahun 2006 dapat dipertahankan respon time penanggulangan kebakaran rata-rata 20 menit setiap kejadian, sedangkan waktu pemadaman setiap kejadian relatif lebih cepat.

1.2.4 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Tramtib dan Penanggulangan Bencana

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 (1) tersedianya truk box modifikasi 8 unit, (2) perahu karet dan motor tempel 50 unit, (3) infrastruktur call center induk 1 unit, (4) CERCUIT Closed TV (CCTV) pada ruang publik di 110 titik, (5) kendaraan operasional tramtib kelurahan sebanyak 265 unit, (6) mobil komando sebanyak 25 unit dan alat komunikasi mobil komando, ruang Gubernur dan ruang DPRD, (7) penanganan krisis penanggulangan gejolak masa, bencana, (8) sosialisasi crisis center.

1.3 Fungsi Kesatuan Bangsa

Fungsi ini dimaksudkan untuk membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokrasi dan berwawasan kebangsaan, serta membina hubungan antar golongan, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dengan melaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.3.1 Program Pemantapan Integrasi Bangsa, dan HAM

Hasil yang dicapai (1) terlaksananya pemantapan pengembangan nilai-nilai demokrasi bagi ormas, LSM dan tokoh masyarakat kepada 425 orang, (2) sosialisasi implementasi kebebasan berserikat dan berpendapat bagi ormas, LSM dan tokoh masyarakat 225 orang (3) sosialisasi kebijakan politik bagi ormas, tokoh masyarakat dan LSM 300 orang, (4) sosialisasi HAM bagi pimpinan dan kader organisasi keagamaan dan etnis, guru SD/SLTP/SLTA 300 orang, (3) pemantapan operasional deteksi dini bagi 280 orang, (4) peningkatan pemahaman peran tokoh agama, tokoh suku etnis dalam memperkuat kerukunan hidup beragama 720 orang, (5)

pembauran bagi lembaga sosial kemasyarakatan dalam memperkuat kerukunan hidup antar suku/etnis 400 orang, (6) aktualisasi nilai pembauran bagi lembaga pendidikan 400 orang, (7) aktualisasi ketahanan nasional 400 orang, (8) aktualisasi nilai kewaspadaan nasional 400 orang, (9) aktualisasi nilai bela negara 320 orang.

1.3.2 Program Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan

Hasil yang dicapai (1) dialogis interaktif antara pemerintah dan partai politik di provinsi DKI Jakarta 400 orang, (2) temu ramah pimpinan partai politik 300 orang, komunikasi infrastruktur politik 300 orang, (3) aktualisasi kemitraan pimpinan organisasi kemasyarakatan dan LSM 300 orang, (4) sarasehan membangun politik bagi pengurus parpol 400 orang, (5) dialog interaktif dalam rangka mediasi tokoh masyarakat dan penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat 500 orang.

2. Bidang Pemerintahan

2.1 Fungsi Pemerintahan Umum

Fungsi Pemerintahan Umum dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah dan sistem pemerintahan daerah dengan melaksanakan 9 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program Pengembangan Otonomi Daerah

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta terumuskannya kelembagaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004; terumuskannya pola kemitraan lembaga legislatif dan eksekutif serta terumuskannya rekomendasi keberadaan Dekel dan Dekot dalam kaitannya perubahan UU Nomor 34 Tahun 1999; terlaksananya inventarisasi kewenangan dan ditetapkannya

mekanisme pelimpahan wewenang di Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub 46 Tahun 2006 serta terfasilitasinya pelaksanaan tugas pembantuan; terlaksananya penyediaan LCD bagi 267 kelurahan; dan terlaksananya koordinasi peningkatan manajemen pelayanan publik pada 6 Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

2.1.2 Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya sosialisasi implementasi otonomi daerah bagi 1400 masyarakat dan mahasiswa; pengembangan aplikasi sistem pelaporan dan pelayanan pada 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan; tersusunnya 2 Pergub untuk penataan wilayah yaitu berkaitan dengan penetapan koordinat batas wilayah Kotamadya/Kecamatan/Kelurahan serta penataan dan penetapan batas kelurahan; terlaksananya workshop pemerintahan bagi 140 orang serta terlaksananya pemantauan dan pendayagunaan kader pemerintahan.

2.1.3 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya sosialisasi penataan taman Persija, rehab gedung kantor lurah dan camat; terlaksananya koordinasi penanganan kasus dan sengketa, terlaksananya koordinasi dan operasional pelayanan satu atap/pelayanan prima; terlaksananya pengadaan mebeulair kantor dan terlaksananya pembinaan pengurus barang dan pemegang khusus barang; terlaksananya monitoring, koordinasi dan evaluasi program bangun praja; terlaksananya pembinaan kinerja dan disiplin pegawai; terlaksananya dialog interaktif penataan kaki lima; terlaksananya operasional pengelolaan keuangan; terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kompleks Walikota; terlaksananya koordinasi penyaluran raskin dan gakin.

2.1.4 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya koordinasi dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan; terlaksananya

pengembangan wawasan staf; terlaksananya koordinasi penanganan kasus dan sengketa, terlaksananya koordinasi dan operasional pelayanan satu atap/pelayanan prima; terlaksananya koordinasi penyaluran raskin dan gakin; terlaksananya dialog interaktif pedagang kaki lima; terlaksananya monitoring, koordinasi dan evaluasi program bangun praja; terlaksananya pembinaan peningkatan pelayanan publik kecamatan dan kelurahan; terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kompleks Walikota; terlaksananya dialog interaktif dan terlaksananya pelayanan informasi melalui media online.

2.1.5 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya koordinasi dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan; terlaksananya pengembangan wawasan pegawai; terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kompleks Walikota; terlaksananya pembangunan dan rehab gedung kantor Camat dan Lurah; terlaksananya koordinasi dan operasional pelayanan satu atap/pelayanan prima; terlaksananya pelayanan informasi melalui media online; terlaksananya dialog interaktif penataan kaki lima; terlaksananya monitoring, koordinasi dan evaluasi program bangun praja; terlaksananya koordinasi penyaluran raskin dan gakin.

2.1.6 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya rehab gedung kantor, terlaksananya pengadaan tanah untuk RSUD Jakarta Selatan; terlaksananya pembinaan dan peningkatan administrasi keuangan bagi PKC; terlaksananya pembenahan dan penataan arsip Setkodya, dan pemeliharaan gedung kantor kompleks Walikota; terlaksananya koordinasi penanganan kasus dan sengketa, terlaksananya koordinasi dan operasional pelayanan satu atap/pelayanan prima; terlaksananya pengembangan wawasan pegawai; terlaksananya monitoring, koordinasi dan evaluasi program bangun praja; terlaksananya dialog interaktif

pedagang kaki lima; terlaksananya dialog interaktif melalui radio dan dialog aspirasi masyarakat; terlaksananya koordinasi penyaluran raskin dan gakin.

2.1.7 Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya dialog interaktif pedagang kaki lima; terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kompleks Walikota, terlaksananya pembinaan petugas Satminkal; terlaksananya koordinasi dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan; terlaksananya monitoring, koordinasi dan evaluasi program bangun praja; pembangunan dan rehan gedung kantor Camat dan Lurah; terlaksananya koordinasi penyaluran raskin dan gakin; terlaksananya dialog interaktif melalui radio dan dialog aspirasi masyarakat; terlaksananya koordinasi penanganan kasus dan sengketa, terlaksananya koordinasi dan operasional pelayanan satu atap/pelayanan prima; terlaksananya pengembangan wawasan bagi pegawai.

2.1.8 Program Pengembangan Pemerintahan Kepulauan Seribu

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya peningkatan administrasi kepegawaian; terlaksananya pemeliharaan kebersihan 5 lokasi TPU yaitu TPU Pulau Kelapa, TPU Pulau Tidung, TPU Pulau Lancang, TPU Pulau Untung Jawa, TPU Pulau Harapan; terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor; terlaksananya patroli laut dan operasi yang bersifat khusus;

2.1.9 Program Penataan Administrasi Pertanahan

Hasil yang dicapai (1) koordinasi pensertifikatan tanah, (2) Inventory hak tanah dalam IMB; (3) pengendalian, monitoring, pelaporan dan dokumentasi pengadaan tanah di lima wilayah kotamadya, (4) Diklat penguasaan penggunaan GIS, (5) diklat penguasaan penggunaan web site (6) inventarisasi dan klarifikasi peraturan perundang-undangan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah (7) penyuluhan/sosialisasi peraturan

pengelolaan tanah untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum di lima wilayah kotamadya, (8) penyusunan data base tanah-tanah bermasalah dilima wilayah.

2.2 Fungsi Aparatur

Fungsi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan administrasi kepegawaian, kemampuan dan ketrampilan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menambah/menata struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif melalui 4 program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

2.2.1 Program Pengembangan SDM Aparatur

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain tersusunnya 14 Pergub berkaitan dengan peraturan kepegawaian, tersusunnya 100 buku dan 150 CD himpunan peraturan kepegawaian; terlaksananya uji kompetensi bagi 264 pejabat Pemda DKI Jakarta serta tersusunnya CBHRM bagi Dinas Dukcapil, Dispenda dan P2B; tersusunnya pola pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemda DKI Jakarta serta termonitornya pengembangan 5.342 pejabat fungsional; serta terlaksananya bimbingan, pembinaan dan pelatihan keagamaan bagi pegawai.

2.2.2 Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terlaksananya pengembangan sistem digitalisasi data kepegawaian serta tertatanya 5000 map data kepegawaian; terlaksananya proses kenaikan pangkat 14.627 pegawai tepat waktu serta terseleksinya 1.315 pegawai yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah; terseleksinya 285 PTT/CPNS sebagai pegawai Pemda DKI Jakarta; terlaksananya ujicoba standar penilaian kinerja pada 28 unit kerja serta pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai pada 61 unit kerja; terlaksananya pemberian SK pensiun dan hak lainnya kepada 3.466 pegawai secara terpadu dan tepat waktu, pemberian

penghargaan masa kerja kepada 8.127 pegawai serta pemberian penghargaan satya lencana karya satya kepada 2.558 pegawai.

2.2.3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain terpenuhinya pegawai yang memiliki kompetensi kepemimpinan sebagai pejabat struktural; terpenuhinya pegawai yang memiliki keterampilan operasional komputer perkantoran; terpenuhinya pegawai yang mengikuti diklat bahasa asing; terpenuhinya pegawai yang mempunyai kemampuan manajemen sekolah; terpenuhinya pegawai yang mempunyai kemampuan teknis administratif; terpenuhinya pegawai yang mempunyai kemampuan fungsional perencanaan pembangunan daerah; terpenuhinya pegawai yang mempunyai kemampuan teknis substantif; serta tersusunnya renstra Kantor Diklat.

2.2.4 Program Penataan` Organisasi dan Ketatalaksanaan

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, antara lain tersusunnya 3 Raperda yaitu Raperda (1) Penyelenggaraan Para Sekolah dan Sekolah, (2) Penyelenggaraan Kursus-Kursus di DK Jakarta, (3) Prosedur Pelayanan Masyarakat pada Dinas Perumahan; terlaksananya pengkajian penyusunan Raperda Pelayanan Publik di lingkungan Pemda DKI Jakarta; penyusunan prosedur pelayanan publik pada Kantor Margasatwa dan Kantor Perpumda; penataan ruang kerja pada 4 unit organisasi yaitu Dispenda, BPM PKUD, Kantor Kasda, dan Kantor Pemakaman Umum; penyusunan analisa jabatan pada 6 unit organisasi yaitu BPM PKUD, Kantor Pelayanan Pemakaman, DPU, Dinas Pertamanan, Dinas Perumahan, Dinas P2B; penyusunan analisa jabatan nonstruktural pada 11 unit organisasi yaitu Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Keuangan, Biro KAKDA, Biro Adwil, Biro Humas, Biro Perlengkapan, Biro ASP, Biro Adm. Perekonomian, Biro Adkesmas, Biro Umum.

Sedangkan kegiatan pembinaan administrasi kelembagaan tidak dapat direalisasikan karena beberapa peraturan yang menjadi pedoman penataan kelembagaan perangkat daerah belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.3 Fungsi Perencanaan dan Pengawasan

Fungsi Perencanaan dan Pengawasan dimaksudkan untuk menyusun sistem perencanaan dan pengawasan daerah yang komprehensif, mampu merumuskan pikiran seluruh elemen masyarakat (stakeholders) dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan peran penelitian dan pengembangan. Pada Tahun Anggaran 2006, Fungsi Perencanaan dan Pengawasan mendapat alokasi Belanja untuk melaksanakan 4 Program. Adapun penjelasan masing-masing program sebagai berikut:

2.3.1 Program Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain, tersusunnya pedoman perencanaan berupa masterplan dan rencana aksi fungsi-fungsi bidang ekonomi, bidang kesmas, bidang tapratur dan bidang SPKLH. Tersusunnya draft rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025 dan draft rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), tersedianya laporan monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.

2.3.2 Program Penelitian dan Pengembangan

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain, Tersusunnya agenda isu penelitian jangka panjang dan fasilitasi kegiatan Dewan Riset.

2.3.3 Program Peningkatan Pengawasan Fungsional

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : tersedianya laporan hasil pengawasan/pemeriksaan reguler dan evaluasi tindak lanjutnya terhadap 84 unit kerja, dan tertanganinya 82 kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta terlaksananya 8 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Fungsional Pengawasan, antara lain Diklat

Laboratorium Investigasi, Diklat Bisnis dan Perbankan, Diklat Teknis Administrasi Pertanahan.

2.3.4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 (1) memfasilitasi terhadap penawaran pelatihan pegawai ke luar negeri; (2) memfasilitasi dalam rangka kerja sama teknik dan jasa ekonomi; (3) koordinasi partisipasi kota Jakarta dalam even-even tahun 2006, (4) Asia-pasifik City Summit Urumqi RRC Council dan Executive Bureau UCLG World; (5) koordinasi Pemberangkatan ke kota-kota Sister City; (6) penerimaan delegasi kota-kota Sister City dan Calon Sister City.

2.4 Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah

Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan penataan, pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan daerah untuk mendukung aktifitas ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan dukungan kemajuan teknologi serta mengembangkan sistem administrasi dan pengelolaan aset-aset daerah untuk menjaga, memelihara dan melindungi semua kekayaan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2006 fungsi keuangan daerah mendapat alokasi belanja yang dipergunakan untuk membiayai 4 program.

Adapun penjelasan dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

2.4.1 Program Peningkatan Perbendaharaan Daerah

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain terciptanya Sistem penatausahaan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang tertib, transparan dan efektif, serta tersusunnya data dan informasi keuangan daerah.

2.4.2 Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain terlaksananya Manajemen Keuangan Daerah, Tersusunnya neraca Keuangan Daerah,

tersusunnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, terlaksananya administrasi Pengesahan dokumen SPJ, tersusunnya bahan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD, terlaksananya pemantauan likuiditas kas terhadap ketersediaan Dana Daerah, Tersusunnya Sistem pelaporan Akuntansi Keuangan Daerah, serta terlaksananya sistem monitoring keuangan daerah.

2.4.3 Program Peningkatan Penerimaan Daerah

Adapun hasil yang dicapai dari program ini antara lain terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah melalui media cetak dan elektronik, peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat yang terkait dengan pendapatan daerah, Terlaksananya perbaikan Sarana Gedung Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Samsat Timur dan Samsat Barat, Tersedianya sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sarana penunjang intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil pajak, Terwujudnya kegiatan pengawasan pemungutan pendapatan daerah, Terciptanya peningkatan kegiatan tertib administrasi dan sistem informasi pendapatan daerah, Terintegrasinya sistem informasi pajak daerah (Dipenda) dengan sistem informasi penerimaan (KPKD) dengan lima wilayah kodya, Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah, dan terlaksananya pengadaan jaringan komputerisasi Gedung Kantor Samsat Pusat-Utara, Terwujudnya peningkatan penagihan terhadap tunggakan pendapatan daerah.

2.4.4 Program Peningkatan Administrasi dan pengelolaan Aset Daerah

Adapun hasil yang dicapai dari program ini antara lain tersusunnya Neraca Daerah dari kegiatan pengadaan barang, tersusunnya draft Raperda Fasos/Fasum, terselenggaranya operasional Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA-GIS), tersusunnya kajian sewa lahan dan nilai strategis reklame di DKI Jakarta, terselenggaranya sosialisasi aset daerah dan terlaksananya pensertifikatan tanah dan pembuatan IMB gedung aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masing-masing sebanyak 50 lokasi,.

2.5 Fungsi Sistem Informasi

Fungsi sistem informasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan sistem informasi, teknologi informasi dan geo informasi dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah serta meningkatkan kemampuan penyediaan data-data pembangunan secara terpadu melalui usaha pembangunan sistem statistik, sistem data elektronik daerah serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih baik. Selain itu juga untuk meningkatkan sistem kehumasan dan protokol dalam rangka mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat luas.

Pada penetapan anggaran Tahun 2006 fungsi ini untuk melaksanakan 5 Program sebagai berikut :

2.5.1 Program Pengembangan Statistik Daerah

Pada program ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas data statistik dari seluruh aspek sosial, ekonomi dan budaya yang dapat digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan DKI Jakarta. Kegiatan antara lain sensus dan survei, pengumpulan data berjenjang dari kantor dinas terkait, pengolahan dan penyajian informasi data, analisis data serta prediksi masa yang akan datang berdasarkan data yang terkumpul.

2.5.2 Program Pengembangan Teknologi Informasi

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain Terciptanya sistem informasi sektoral bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan, Terwujudnya implementasi public service analytic berupa konsep pengintegrasian sistem-sistem penanggulangan bencana dan potensi sistem informasi yang terkait dengan penanggulangan bencana, Terlaksananya pengembangan sistem pendapatan daerah terpadu, Terlaksananya sistem informasi e-procurement, Tersusunnya hasil evaluasi dan desain aplikasi finansial terpadu, Terintegrasinya aplikasi kependudukan, tersedianya jaringan WAN terpadu dinas teknis dan kecamatan masing-masing pada 30 lokasi dan 172 lokasi, terbangunnya jaringan data kelurahan pada 171 kelurahan.

2.5.3 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi

Hasil yang dicapai (1) tersusunnya Master Plan Kearsipan Daerah, (2) penyelamatan/pelestarian arsip/dokumen negara era Kabinet Gotong royong dan Kabinet Persatuan Nasional, (3) penggalian arsip statis konvensional, (4) penataan arsip in aktif, (5) diklat kearsipan in aktif dan statis, (6) bimbingan dan pembekalan kearsipan pejabat fungsional, (7) pemasyarakatan kearsipan kepada organisasi profesi dan tokoh masyarakat, (8) pengelolaan arsip/dokumen yang akan disusutkan, dan (9) perekaman arsip dan dokumen daerah.

2.5.4 Program Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan

Hasil yang dicapai (1) publikasi acara/kegiatan Pemprov DKI Jakarta, (2) sosialisasi pemberdayaan perempuan melalui media massa, (3) pemuatan advetorial, sponsor atikel dan rubrik khusus, (4) penerbitan majalah media jaya, (5) pelayanan informasi melalui media on line warta DKI Jakarta (berita Jakarta.Com).

2.5.5 Program Pemetaan dan Informasi Pertanahan

Hasil yang dicapai (1) pengukuran leveling titik Jaring Kontrol Geodesi (JKG) dan Jaring Kontrol Geodesi Utama (JKGU) sebagai peta WEB GIS, (2) pembuatan filling system peta dasar TM 3 derajat, (3) pengambilan data primer foto udara 1 : 20.000, (4) pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) pada masing-masing wilayah dan (5) pengembangan pelayanan data spasial berbasis web.

3. Bidang Ekonomi

3.1 Fungsi Pariwisata

Fungsi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan gerak roda perekonomian daerah melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui Pengembangan Produk Pariwisata, Pengembangan Pasar

Pariwisata serta Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata. Fungsi Pariwisata pada tahun 2006 mempunyai 3 program.

Program-program yang telah dilaksanakan pada fungsi pariwisata adalah sebagai berikut :

3.1.1 Program Pengembangan Produk Pariwisata

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 telah terselenggara atraksi kesenian budaya di Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII dan di Sangkrini Jaya Raya TMII 11 kali, terselenggaranya Adikarya Wisata sebanyak 1 kali, terselenggaranya Atraksi Pariwisata Unggulan sebanyak 10 event, terselenggaranya kegiatan Jak Jazz Festival 1 kali, terselenggaranya pemilihan Abang dan Nene Jakarta Tahun 2006 sebanyak 36 Finalis, terselenggaranya Enjoy Jakarta Golf Festival 2006, Enjoy Jakarta Entertainment Festival, Enjoy Jakarta Shopping Festival, Enjoy Jakarta Marine Festival, Enjoy Jakarta Dining Festival sebanyak 1 kali, tersedianya Master Plan kebijakan sektor pariwisata DKI Jakarta, terlaksananya penyusunan RIPPDA Tahap II sebanyak 1 Kegiatan, terlaksananya penataan estetika lingkungan koridor Pasar Baru seluas 450 M2, terlaksananya desain dan pembangunan gerbang PIK Pulogadung seluas 450 M2.

3.1.2 Program Pengembangan Pasar Pariwisata

Setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2006, telah tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk buletin, brosur, video serta media internet, yaitu Pencetakan guide book to Jakarta sebanyak 26.758.000 buku, pencetakan brosur Kenalilah Jakarta sebanyak 43.111 eksemplar, pengadaan CD promosi Enjoy Jakarta sebanyak 25.129 keping, terselenggaranya Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik di 12 kota dalam negeri dan luar negeri sebanyak 234 insertion, terlaksananya pencetakan poster welcome to Asia Campaign sebanyak 3.000 lembar.

Sedangkan mengenai kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, terdapat peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara, yaitu Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Tahun 2005 sebanyak

1.168.656 orang dan pada Tahun 2006 sebanyak 1.219.132 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 5,1 % dan Kunjungan Wisatawan Nusantara pada Tahun 2005 sebanyak 11.746.250 orang dan pada Tahun 2006 sebanyak 12.777.571 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 8,8 %.

Adapun Penerimaan retribusi penginapan/akomodasi dan ruang pertemuan/rapat Graha Wisata Kuningan; akomodasi sebesar Rp.306.095.000,-, ruang rapat sebesar Rp.331.345.000,-. Untuk Graha Wisata TMII, akomodasi sebesar Rp.289.370.000,- ruang rapat sebesar Rp.302.120.000,-. Sedangkan Graha Wisata Ragunan, akomodasi sebesar Rp.661.200.000,- ruang rapat sebesar Rp.673.300.000,-.

Pada tahun 2006, terdapat peningkatan jumlah devisa sektor pariwisata, yaitu Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sebesar Rp.1.069.992.060.096,- dan penerimaan Retribusi Kepariwisataaan sebesar Rp.2.306.265.000,-

3.1.3 Program Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006, terdapat peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, yaitu : Penggantian AC central Ruang Pamer Anjungan DKI Jakarta TMII sebanyak 2 Unit.

Sedangkan mengenai ketrampilan dan kemampuan SDM Pariwisata pada tahun 2006, telah Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan Bidang Pramuwisata Muda/Madya sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan Bidang Waiter/Waitress sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan Bidang Receptionist sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan Bidang Bartender sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan Bidang Pengemudi Angkutan Wisata sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan Bidang Head Wisata sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan Bidang Juru Masak sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi kepariwisataan

Bidang Room Boy sebanyak 40 orang, Terselenggaranya pelatihan bagi instruktur industri pariwisata Bidang Usaha Akomodasi sebanyak 100 orang, Terselenggaranya pelatihan bagi instruktur industri pariwisata Bidang Usaha Perjalanan sebanyak 100 orang, Terselenggaranya Diklat teknis kepariwisataan bagi pegawai Dinas Pariwisata sebanyak 15 orang.

3.2 Fungsi Industri dan Perdagangan

Fungsi Industri dan Perdagangan diarahkan untuk menjadikan industri yang mampu menyerap lapangan kerja, teknologi ramah lingkungan, meningkatkan nilai tambah industri serta berorientasi ekspor. Sementara perdagangan di DKI Jakarta diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan penekanan pada kepuasan pelanggan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan, Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan, Penataan Jaringan distribusi Produk Industri dan Perdagangan, Pengembangan Ekspor.

Fungsi Industri dan Perdagangan dilaksanakan untuk membiayai 4 (empat) program, sebagai berikut :

3.2.1 Program Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006, terdapat peningkatan nilai tambah sektor industri dan perdagangan, yaitu : Terlaksananya pelatihan persiapan sertifikasi ISO 9001-2000 perusahaan ILMEA sebanyak 25 perusahaan, Tersedianya prototype dan desain IPAL bengkel dan percetakan sebanyak 1 paket, Terlaksananya penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) industri makanan dan minuman sebanyak 1 paket.

Sedangkan untuk usaha industri ramah lingkungan, telah Terlaksananya monitoring dan evaluasi perusahaan industri dan perdagangan yang mempunyai kontribusi limbah ke kali Ciliwung dalam rangka program kali bersih sebanyak 1 kegiatan, Terlaksananya dialog interaktif lintas sektoral berkaitan dengan pengusaha industri dan perdagangan dalam rangka pengelolaan lingkungan sebanyak 1 kegiatan, Terlaksananya

pemasyarakatan tentang penerapan modul penanganan limbah industri Cat, electroplating di wilayah DKI Jakarta sebanyak 45 orang.

3.2.2 Program Penataan dan Pengembangan Produksi Industri dan Perdagangan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006, makin kokohnya pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya manusia dan sumber daya potensial lainnya, yaitu : Terjalannya kemitraan industri besar, kecil industri hulu dan hilir sebanyak 100 orang, Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi bengkel, pelaksanaan, pemeriksaan, emisi dan perawatan kendaraan bermotor di 5 wilayah DKI Jakarta sebanyak 5 kali, Tersusunnya pedoman pengembangan industri non polusi hemat air dan berteknologi sebanyak 1 kegiatan.

Terdapat peningkatan kualitas produk industri dan perdagangan, yaitu : Terlaksananya penerapan fasilitator dan penerapan Gugus Kendali Mutu pada ILMEA sebanyak 25 perusahaan, Terlaksananya Pelatihan persiapan sertifikasi ISO 9001-2000 Perusahaan ILMEA sebanyak 25 perusahaan, Terfasilitasinya Sertifikasi produk SNI wajib lingkup ILMEA sebanyak 25 perusahaan.

Terdapat peningkatan keanekaragaman produk industri, yaitu : Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi bengkel kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 sebanyak 80 orang, Terlaksananya Pelatihan peningkatan kemampuan desain pakaian jadi SDM industri Garment sebanyak 30 orang

3.2.3 Program Penataan Jaringan Distribusi Industri dan Perdagangan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006, terdapat peningkatan keragaman basis produksi dan distribusi yang berdaya saing global yaitu Terselenggaranya penerapan cara produksi kosmetik yang baik (CPKB) industri kosmetik sebanyak 1 kegiatan, Terlaksananya pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi industri makanan dan minuman sebanyak 75 perusahaan, Peningkatan pasar produk industri dan jaringan distribusinya dengan terlaksananya pengembangan kerjasama

supply bahan baku, barang jadi (pemasaran) lintas daerah 5 provinsi sebanyak 5 kali, Terlaksananya pengembangan kemitraan antara Asosiasi/Kadin sektor Indag sebanyak 15 orang.

3.2.4 Program Pengembangan Ekspor

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006, telah terciptanya struktur usaha perdagangan yang lebih sehat, yaitu : Terlaksananya pendaftaran merk dagang bagi hasil produksi kerajinan di DKI Jakarta sebanyak 150 item, Terwujudnya mekanisme pasar yang kuat, Terlaksananya Temu Usaha industri furniture berorientasi ekspor sebanyak 100 orang, Terlaksananya Temu Usaha industri makanan dan minuman sebanyak 100 orang, Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar internasional , Terlaksananya publikasi industri dan perdagangan melalui media elektronik sebanyak 1 kali, Tersusunnya informasi potensi industri dan perdagangan melalui media interaktif sebanyak 1 kali, Terselenggaranya jaringan dan pemasaran produk industri yang seimbang dan proporsional, dengan partisipasi UKM yang lebih luas, Terlaksananya promosi & pameran produksi dalam negeri sebanyak 1 kali, Terlaksananya partisipasi pameran Gift Item & Toys Fair Hongkong sebanyak 3 pengusaha, Terlaksananya partisipasi pameran Naning di Shanghai China sebanyak 3`pengusaha.

Disamping itu juga terdapat peningkatan sumbangan ekspor terhadap perolehan devisa dan PDRB, yaitu : Realisasi total ekspor DKI Jakarta tahun 2005 senilai 26.958.167.000 U\$, sedangkan Realisasi total ekspor DKI Jakarta tahun 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 senilai 24.586.972.000 U\$ dan Sumbangan total nilai ekspor DKI Jakarta terhadap total nilai ekspor Indonesia tahun 2005 sebesar 41,05%.

3.3 Fungsi Pengembangan Usaha Daerah

Fungsi Pengembangan Usaha Daerah diarahkan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha daerah sehingga mampu berkembang dan bersaing secara sehat di era globalisasi sebagai sumber penerimaan daerah.

Untuk mencapai kebijakan dimaksud, maka diperlukan strategi mengoptimalkan penataan dan restrukturisasi usaha daerah dalam rangka memperbaiki kinerja dan profesionalisme pengelolaan usaha daerah, sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan produktif serta mampu bersaing secara sehat di era globalisasi serta meningkatkan kualitas dan informasi pelayanan investasi disertai dengan iklim investasi yang kondusif, sehingga swasta mampu berkembang dalam era pasar bebas, mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, melalui pelaksanaan 3 program.

Program-program yang telah dilaksanakan pada Fungsi Pengembangan Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

3.3.1 Program Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT, Patungan)

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 masih diperlukan peningkatan kinerja PD/BUMD/PT. Patungan, oleh karena itu pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan yang mendorong pada peningkatan SDM, berupa pemilihan kepengurusan BUMD yang profesional sebanyak 20 orang melalui fit and proper test, terbinanya kepengurusan BUMD dalam rangka meningkatkan keahlian dan profesionalisme sebanyak 100 orang, terlaksananya bimbingan untuk meningkatkan keahlian teknis pada SDM BUMD sebanyak 100 orang, terlaksananya bimbingan untuk meningkatkan keahlian teknis pada SDM BUMD sebanyak 100 orang, terlaksananya pelatihan tenaga satuan pengendali intern pada BUMD sebanyak 100 orang.

Adapun kegiatan yang mendorong peningkatan kinerja BUMD antara lain : ditindak lanjutnya hasil audit usaha daerah sebanyak 30 BUMD, tersedianya hasil analisa dan evaluasi program & kerja pada 30 BUMD, tersusunnya draft Raperda tentang pembentukan Sub Holding Company dan draft Raperda tentang pebentukan BUMD bidang energi.

Dengan adanya peningkatan kinerja BUMD, dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sumber PD/BUMD/PT Patungan, antara lain Setoran PAD BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

meningkat dari sebesar Rp. 100.138.352.847,22 pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp 128.059.879.541,00. pada tahun 2006, serta setoran retribusi parkir dari BP. Perparkiran berdasarkan realisasi pendapatan meningkat dari sebesar Rp. 14.414.763.350 pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 17.586.134.207,00 pada tahun 2006.

3.3.2 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain

Setelah dilakukan evaluasi, untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal dan usaha lain, pada tahun 2006 telah dilakukan penelitian usaha-usaha potensial, promosi penanaman modal, peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan penanaman modal, hasilnya antara lain : tersedianya peta kawasan unggulan/blue print investasi dan tersusunnya Rencana strategis pengembangan penanaman modal di DKI Jakarta 2007-2012, terlaksananya keikutsertaan BPM-PKUD pada pameran investasi di luar negeri sebanyak 15 event dan dalam negeri sebanyak 10 event, terlaksananya forum investasi dalam rangka informasi investasi dan memulihkan iklim investasi dalam dunia usaha di DKI Jakarta, tersedianya data dan informasi investasi yang akurat dan up to date.

Sedangkan mengenai investor dan investasi, setelah dilakukan evaluasi pada tahun 2006, terdapat peningkatan jumlah investor dan nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta yang memacu Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, yaitu : Jumlah investor meningkat dari 817 perusahaan pada tahun 2005 menjadi 827 perusahaan pada tahun 2006 dan persetujuan investasi pada periode Januari s/d Desember 2005 investasi PMA di Jakarta adalah sebesar US\$ 2,624,156,360 dengan jumlah proyek 794, sedangkan persetujuan investasi pada periode Januari s/d Desember 2006 investasi PMA di Jakarta adalah sebesar US\$ 1.415.662.716 dengan jumlah proyek 807 serta persetujuan investasi pada periode Januari s/d Desember 2005 investasi PMDN adalah sebesar Rp. 3.792.133.520.000,00 dengan jumlah proyek 23, persetujuan investasi pada periode Januari s/d Desember 2006 investasi PMDN adalah sebesar Rp1.980.143.230.000,00.

Penurunan investasi baik PMA maupun PMDN disebabkan karena adanya gangguan alam yang terjadi di Indonesia, sehingga berdampak pada investasi di DKI Jakarta. Selain itu karena belum selesainya pembahasan perundang-undangan tentang penanaman modal ditingkat pusat, yang selanjutnya berpengaruh pada pembahasan Perda tentang penanaman modal ditingkat daerah. Karena belum adanya kejelasan hukum tentang penanaman modal, maka banyak investor yang ragu-ragu untuk berinvestasi khususnya di DKI Jakarta.

3.3.3 Program Pemberdayaan Aset Daerah

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat peningkatan jumlah aset daerah yang termanfaatkan yaitu Terevaluasinya pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah dari 2 (dua) perjanjian kerjasama pada tahun 2005 menjadi 3 perjanjian kerjasama pada tahun 2006, terdapat peningkatan PAD yang disumbangkan dari hasil pemanfaatan 32 aset yang dikerjasamakan sebesar Rp3.067.125.000,00 pada tahun 2005, menjadi Rp3.750.925.425,00. (terdiri dari Rp. 2.489.050.348,00 yang sudah disetor dan Rp1.261.875.077,00 yang masih menjadi kewajiban pihak swasta/ sebagai piutang).

3.4 Fungsi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Fungsi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing sektor Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi perekonomian perkotaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan usaha skala mikro yang sehat dan dinamis berlandaskan sistem ekonomi partisipatif dalam rangka mengurangi kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ekonomi serta menata usaha kaki lima. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha di bidang koperasi adalah dengan cara memperluas dan mengembangkan usaha koperasi, memperluas kesempatan berusaha bagi koperasi dan memperkuat kelembagaan koperasi agar menjadi koperasi sebagai gerakan masyarakat. Program-program yang telah dilaksanakan

pada fungsi usaha kecil, menengah dan koperasi sebanyak 4 program sebagai berikut:

3.4.1 Program Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 masih terdapat banyak lokasi usaha skala mikro/PKL yang tidak tertata dan harus direlokasi karena tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan Pemda DKI seperti pembangunan jalur Bus Way yang harus bebas dari PKL. Oleh sebab itu pada tahun 2006 telah diselesaikan penetapan lokasi sementara usaha skala mikro/PKL melalui Keputusan Gubernur, Pembangunan One Village One Produk 1 (satu) kawasan di Pondok Rangan Jakarta Timur dan pembuatan fitting out/interior Gedung Pusat Promosi UKM di Waduk Melati untuk menunjang sarana dan prasarana display produk UKM, merenovasi 4 lokasi binaan (LOKBIN) penampungan usaha PKL di Bintaro, Muria Dalam, Palmerah dan Makasar serta pengadaan genzet dan instalasi pada gedung pusat ikan hias UKM Johar Baru untuk menunjang sarana dan prasarana peralatan listrik ikan hias.

3.4.2 Program Pemberdayaan UKM & Koperasi

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 ternyata masih perlu adanya pemberdayaan UKM dan koperasi melalui peningkatan promosi, pendampingan Koperasi, peningkatan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian UKM. Disamping itu untuk menumbuhkan jiwa kewiraswastaan, telah dilakukan kegiatan Prospek Mandiri Penciptaan Model Pertumbuhan Usaha Baru bagi para sarjana pencari kerja.

Hasil dari program ini antara lain yaitu terselenggaranya gelar pasar rakyat 5 kali, Partisipasi Pameran dan Promosi KUKM 13 event, terselenggaranya Jakarta UKM EXPO di Semanggi Expo, Penilaian Klasifikasi Koperasi Tingkat Provinsi 100 Koperasi, Restrukturisasi 10 KSU di DKI Jakarta, Kajian draft Perda tentang Perkoperasian di DKI Jakarta, Peningkatan Pelayanan Badan Hukum Koperasi, Penilaian UKM

Berprestasi 20 UKM, terjalinnya kerjasama UKM antar Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Makassar, Gorontalo, Jambi, Bengkulu, dan Padang.

3.4.3 Program Pengembangan Kewirausahaan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 masih perlu adanya peningkatan kualitas KUKM yang handal dan profesional sehingga mampu bersaing dipasaran nasional dan internasional serta menumbuhkan jiwa wirausaha yang tinggi. Oleh sebab itu pada tahun 2006 dilaksanakan kerjasama KKMB dengan beberapa Perguruan Tinggi dan Asosiasi seperti IWAPI dan KADIN, dalam rangka pengembangan permodalan KUKM; dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Usaha sebanyak 100 orang; diklat Koperasi sebanyak 75 orang dan Diklat Kewirausahaan dan Manajemen sebanyak 100 orang.

3.4.4 Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 masih perlu adanya pengembangan KSP/USP dan akses permodalan bagi KUKM, peningkatan permodalan serta harus adanya pengawasan dan pengendalian usaha skala mikro. Oleh sebab itu pada tahun 2006 dilaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP sebanyak 100 koperasi, Peningkatan Produktifitas dan Audit Ekstren Koperasi sebanyak 23 Koperasi, Lokakarya Kebijakan Program Bantuan Permodalan oleh Pemerintah/Swasta kepada pelaku usaha bagi koperasi & UKM. Pada program ini ada 1(satu) kegiatan Peningkatan Permodalan KUKM yang tidak bisa dilaksanakan yaitu tentang Pembentukan Jakarta Mikro Financing dengan nilai anggaran Rp. 5.000.000.000,00 hal ini disebabkan karena anggaran APBD yang terdapat di SKPD tidak dapat digunakan sebagai dana bergulir atau sebagai jaminan bank.

3.5 Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok usaha peternakan, perikanan dan

meningkatkan sumber daya hasil laut dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang ditempuh pada fungsi ini antara lain adalah meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil ternak, mengawasi peredaran daging, BAH (Bahan Asal Hewan) dan HBAH (Hasil Bahan Asal Hewan) sehingga ketersediaan hasil ternak selalui terpenuhi, tercukupi dan dapat dikonsumsi secara aman dengan harga terjangkau. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Program Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat pelaksanaan pengendalian penyakit hewan ternak dan peliharaan yang dapat menular, peningkatan produksi komoditi ikan, telur dan daging, pembinaan bagi kelompok tani/nelayan khususnya terhadap teknologi baru, peningkatan kesehatan hewan dan ikan, pengembangan budidaya ikan, pengembangan kawasan pelabuhan dan pendaratan ikan. Oleh sebab itu, pada tahun 2006 telah dilaksanakan pemberian vaksinasi Rabies sebanyak 15.747 ekor, Anthrax sebanyak 6.203 ekor, Brucellosis sebanyak 1.397 ekor, SE sebanyak 850 ekor, dan Avian Influenza/ Flu Burung sebanyak 119.087 ekor, pemeriksaan laboratories spesimen hewan sebanyak 11.263 spesimen, realisasi produksi Daging sebesar 123.656 ton, Telur sebanyak 540 ton, Susu sebanyak 5.267 ton, Ikan Hias sebanyak 52.444.637 ekor, Ikan Laut sebanyak 141.791 ton, Ikan Air Tawar sebanyak 7.176 ton, dan Benih Ikan Konsumsi sebanyak 14.405.737 ekor, serta penebaran benih ikan di perairan umum sebanyak 1.253.640 ekor, pembinaan kelompok tani sebanyak 95 orang dalam penerapan teknologi pengolahan hasil ternak/ ikan, pelatihan navigasi penangkapan ikan kepada 385 orang nelayan, penerbitan Sertifikat Mutu Ekspor sebanyak 8.469 buah dengan volume ekspor sebesar 27.342 ton senilai \$226.923.840,00.

3.5.2 Program Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat pelaksanaan pengendalian hewan ternak/ikan yang masuk ke DKI Jakarta, distribusi ketersediaan jumlah produksi hewan ternak dan ikan untuk konsumsi, pengendalian atas ijin usaha dibidang peternakan dan perikanan, penerapan manajemen mutu sesuai SNI Oleh sebab itu, pada tahun 2006 telah dilaksanakan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies sebanyak 697 ekor, pengendalian ijin usaha di bidang perikanan yang terdiri dari 579 buah Tanda Daftar Usaha Perikanan, 209 buah Ijin Usaha Perikanan, dan 398 buah Surat Penangkap Ikan, serta pengujian sampel komoditi hasil perikanan dalam penerapan sistem manajemen mutu SNI sebanyak 9.866 sampel. Disamping itu juga terpenuhinya ketersediaan pangan hasil ternak sebanyak 1.976 ton per hari dan hasil ikan sebanyak 400 ton per hari.

3.5.3 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 perlu dilakukan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya laut Oleh sebab itu, pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengendalian sumberdaya kelautan yaitu pemeliharaan kawasan fish shelter sebanyak 208 buah dan 5 kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

3.6 Fungsi Pertanian Dan Kehutanan

Fungsi Pertanian dan Kehutanan diarahkan untuk menciptakan pola pertanian perkotaan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi tinggi, Menciptakan ketersediaan pangan dan gizi yang cukup dengan harga terjangkau, meningkatkan daya dukung lingkungan melalui penghijauan, konservasi hutan lindung dan hutan kota serta meningkatkan pengendalian penggunaan/konsumsi kayu. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Program Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat peningkatan produksi, pemasaran pertanian dan kehutanan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, peningkatan kualitas dan olahan hasil hutan dengan menambah ruang pelayanan pengeringan kayu sebesar 36 m² dan pengadaan mesin pengolah kayu sebanyak 6 unit, serta pengendalian peredaran hasil hutan, yang meliputi, jumlah produksi buah sebesar 17.086 ton, jumlah produksi sayuran sebesar 2.158 ton, jumlah produksi anggrek dan tanaman hias sebesar 211.073 tangkai, jumlah produksi bibit buah-buahan sebanyak 36.402 pohon, jumlah ketersediaan pangan (buah dan sayur) sebesar 20.075 ton, kaitannya dengan mutu produk terdapat peningkatan pengujian mutu produk hasil olahan pertanian berupa bir pletok dan wornas sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, peningkatan pelayanan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu sebesar 424.302 m³, serta penurunan penanganan kasus ilegal logging sebanyak 4 kasus.

3.6.2 Program Pengembangan Hutan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat peningkatan penanaman pohon melalui penghijauan, peningkatan rehabilitasi kawasan hutan lindung, pengembangan kawasan hutan kota, serta pelestarian sumberdaya hayati dan satwa. Hasil yang dicapai antara lain adalah penanaman pohon penghijauan sebanyak 22.500 di 42 kelurahan, penanaman pohon di kawasan hutan kota sebanyak 4000 pohon, penanaman pohon di kawasan agrowisata P. Tidung Kecil sebanyak 3000 pohon, peningkatan sarana dan prasarana di Agrowisata Cilangkap seluas 19,5 Ha, peningkatan sarana dan prasarana di 18 kebun bibit, rehabilitasi mangrove di kawasan hutan lindung Angke Kapuk seluas 1,5 Ha, dan kawasan Tol Sedyatmo seluas 1,5 Ha serta penanaman mangrove di P. Rambut sebanyak 20.000 pohon. Hal yang terkait dengan konservasi sumberdaya hayati dan satwa adalah terpeliharanya ruang terbuka hijau

seluas 40 Ha dan satwa langka di kawasan Taman Margasatwa, terbangunnya kandang komodo sebanyak 1 buah, terbangunnya kandang buaya sebanyak 1 buah, dan peningkatan jumlah kelahiran satwa sebanyak 470 ekor.

4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

4.1 Fungsi Pendidikan

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Propinsi DKI Jakarta menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melaksanakan 5 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.1.1 Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar

Sekian miliar digunakan untuk membayar gaji guru, operasional sekolah, rehab gedung sekolah, pemeliharaan gedung dan sebagainya → 2.500 SD/SMP/SMA/K berjalan dengan baik dan menghasilkan sekian ribu lulusan SD/SMP/SMA/K

Sekian miliar digunakan untuk membiayai sertifikasi guru, pelatihan guru, penyetaraan guru dan sebagainya → kualitas 20.000 guru SD/SMP/SMA/K meningkat

Sekian miliar digunakan untuk membiayai bea siswa, imbal swadaya dan sebagainya → menurunkan angka putus sekolah → meningkatkan APK murni

Sekian miliar digunakan untuk membiayai sarana prasarana, alat peraga, buku sekolah, matras dsb → meningkatkan lingkungan sekolah → proses belajar mengajar menjadi lebih baik

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah meningkatnya APK SD/MI 120,40% dan APM SD/MI 99%, serta APK SMP/MTs 105,33% dan APM SMP/MTs 95% artinya Provinsi DKI Jakarta telah mencapai Tuntas Paripurna Program Wajib Belajar 9 Tahun melalui kegiatan berfungsinya

Perda Sisdikda Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang, penyempurnaan mekanisme pembiayaan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan penyerapan operasional sekolah bagi siswa SD/MI Negeri 97,65% dan SMP/MTs Negeri 97,40% dalam rangka mewujudkan sekolah gratis dan tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun, pengelolaan sarana akses terhadap informasi layanan Pendidikan Dasar melalui Website untuk 2.988 SD dan 856 SMP, meningkatnya peran serta Dewan Pendidikan/Komite Sekolah dalam pengambilan kebijakan pendidikan di sekolah, meningkatnya mutu lulusan SD/MI dari 94,78% menjadi 96,93% dan SMP/MTs dari 99,65% menjadi 99,84%, meningkatnya kualitas Pendidikan Guru SDN/SMPN dari D3 ke Strata-1 dari 500 orang Guru menjadi 1560 orang Guru, sertifikasi Kompetensi Guru SDN/SMPN tingkat provinsi dan nasional, meningkatnya sarana-prasarana sekolah, rehabilitasi total dan berat, serta pengadaan meubiler pengganti.

4.1.2 Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah menurunnya Angka Buta Aksara menjadi 1,2% serta menurunnya Angka Putus Sekolah melalui Pendidikan Luar Sekolah dan Pra Sekolah dengan pelaksanaan program Kejar Paket A, B, dan C sampai dengan Ujian Nasional Paket A, B, dan C Tahun 2006 sebanyak 2.900 orang terdiri Kejar Paket A dari 522 menjadi 710 orang, Kejar Paket B dari 3301 menjadi 5489 orang, dan Kejar Paket C dari 10.309 menjadi 17.933 orang, terlatihnya pengembangan Kompetensi Tutor dari 574 orang menjadi 1.008 orang, meningkatnya kualitas sarana-prasarana PKBM dari 137 PKBM menjadi 202 PKBM, meningkatnya pendidikan kesetaraan bagi Anak Jalanan dari Kesetaraan SLTP (program Paket B) dari 100 orang menjadi 200 orang, meningkatnya kuantitas dan kualitas manajemen pendidikan nonformal melalui pengelolaan kelembagaan dan peran serta mitra Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) dari 15 Kelompok Usaha menjadi 50 Kelompok Usaha, meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan luar biasa, meningkatnya mutu dan

relevansi lulusan pendidikan luar biasa untuk SDLB dari 313 siswa menjadi 598 siswa, SMPLB dari 226 menjadi 402 siswa.

4.1.3 Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah **meningkatnya APK SMU/SMK/MA menjadi 81,53% dan meningkatnya nilai UN (SMU/SMK) rata-rata menjadi 7,3** melalui program Penerimaan Siswa Baru (PSB) sistem *online* pada 176 sekolah, inisiasi wajib belajar 12 tahun bagi siswa SMA/SMK dari 1050 orang menjadi 1.612 orang siswa, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dengan penambahan 30 RKB, pembangunan Unit Gedung sebanyak 5 sekolah, pembangunan 3 ruang Laboratorium, tersedianya peralatan praktik pada 42 sekolah kejuruan, dan meubel pengganti di 75 SMA/SMK, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan tenaga pendidikan melalui peningkatan proporsi guru SMA/SMK yang berpendidikan S1 dari 26.025 menjadi 26.073 orang, pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru SMA/SMK dari 4.500 orang menjadi 5.500 orang, sertifikasi Alih Fungsi Guru SMA/SMK dari 650 orang menjadi 600 orang, fasilitas sumber dan bahan belajar melalui penyusunan model CBT (Competency Based Training) 10 program keahlian SMK yang diikuti 525 orang, meningkatnya peran masyarakat dan DU/DI dalam penyelenggaraan pendidikan, kualitas manajemen pendidikan melalui pengembangan rintisan sekolah *Science Center* di 17 sekolah, pengembangan model manajemen sekolah program Akselerasi di 5 sekolah unggulan, pemberdayaan MGMP baru dalam 18 Mata Pelajaran, meningkatnya pembinaan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler melalui lomba Kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Nasional XIV Tahun 2006, dan pembinaan kegiatan Karya Ilmiah Remaja (KIR), serta pembentukan Tim Olimpiade Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas.

4.1.4 Program Pengendalian dan Informasi Perguruan Tinggi

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah [meningkatnya sarana akses pendidikan tinggi dan pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah melalui](#) kajian Iptek dan perannya dalam pembangunan berupa kompetensi hasil riset teknologi di 100 perguruan tinggi swasta, pelaksanaan rencana strategis bidang penelitian dan pengembangan perguruan tinggi berupa pembekalan Teknopreneurship dan Agripreneurship mahasiswa pada 200 perguruan tinggi swasta, serta pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan 100 perguruan tinggi. Hasil evaluasi kegiatan dan pencapaian program untuk tahun 2006 telah selesai 100 persen.

4.1.5 Program Pengembangan

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah [meningkatnya jumlah dan jenis bahan Perpustakaan Daerah dengan meningkatnya koleksi/bahan pustaka dari 7.266 judul \(22.026 exemplar\) menjadi 13.881 judul \(51.467 exemplar\),](#) menjadi 13.881 judul (51.467 exemplar), meningkatnya Minat Baca masyarakat dengan terbentuknya Perpustakaan Pemukiman dari 30 perpustakaan menjadi 130 perpustakaan, dan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 55.000 orang menjadi 65.353 orang (kenaikan 119%), meningkatnya Layanan Perpustakaan melalui pengembangan TBM (Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Permukiman) dengan apresiasi Hanjaba, bedah uku, pameran, story-telling, talkshow, serta Abnon Buku. Hasil evaluasi kegiatan dan pencapaian program untuk tahun 2006 telah selesai 100 persen.

4.2 Fungsi Kesehatan

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif pada masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dibidang kesehatan; meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui dukungan sarana, prasarana dan SDM

bidang kesehatan yang lebih baik; meningkatkan kecepatan dan kesiapan dalam memberikan penanganan keadaan darurat, dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada serta SDM bidang kesehatan, tanpa melihat dari golongan mana masyarakat yang membutuhkan pelayanan; dan perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan dengan melaksanakan 4 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

4.2.1 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain: meningkatnya Case Detection Rate TBC (BTA +) menjadi 70% dan capaian 81%, meningkatnya Angka Kesembuhan Pengobatan Cure Rate TBC 85%, Meningkatnya prosentase cakupan BIAS menjadi 90% dan capaian 94%, meningkatnya prosentase darah PMI yang dilakukan screening HIV/AIDS dengan sasaran 100% (penanggulangan penyakit menular) → dari rmsekian ribu pasien TBC, termonitor sekian ribu pasien → angka drop out pengobatan menjadi turun → angka penularan menurun. tersedianya puskesmas yang mampu melayani kasus narkoba (25%) dengan sasaran 22,72% (10 puskesmas) dan capaian 70%, meningkatnya screening penyakit tidak menular utama (50%) dengan sasaran 39 KLP Peduli dan capaian 100 KLP Peduli, meningkatnya koordinasi penanggulangan kesehatan mental secara lintas sektoral dari sasaran 3 kali dan capaian 4 kali, meningkatnya respon time penyakit potensial KLB berbasis RS dengan median 24 jam dengan sasaran 80% dan capaian 94%, meningkatnya respon time penyakit potensial KLB berbasis masyarakat dengan median 24 jam dengan sasaran 100% dan capaian 100%, meningkatnya angka bebas jentik nyamuk aedes agypti dengan sasaran >95% dan capaian 97%, meningkatnya jumlah keluarga menghuni rumah sehat menjadi 60%, meningkatnya jumlah sekolah sehat dengan sasaran 56% dan capaian 60%, meningkatnya jumlah sarana kesehatan sehat menjadi 50% dan capaian 51%, meningkatnya tempat-tempat umum lainnya sehat menjadi 74% dan capaian 75%, meningkatnya industri kecil sehat menjadi 15%, peningkatan RW dengan jumantik menjadi 40% dan capaian 41%, meningkatnya RW dengan Posko PSN DBD aktif 50% dan capaian 52%.

meningkatnya sekolah dengan PSN DBD aktif 50% dan capaian 51%, dan meningkatnya koordinasi program kesehatan lingkungan secara lintas sektoral dengan sasaran 100%.

4.2.2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain: meningkatnya puskesmas Kecamatan dengan Cost Recovery > 50% dan capaian 60%, meningkatnya prosentase puskesmas melaksanakan QA (ISO 9001-2000) menjadi 20%, meningkatnya jumlah puskesmas dengan pelayanan RB menjadi 90%, Meningkatnya kepuasan pelanggan external Puskesmas menjadi 70 %, Bertambahnya jumlah puskesmas kecamatan yang melaksanakan MTBS menjadi 6%, bertambahnya Puskesmas kecamatan yang mampu PONED menjadi 10%, meningkatnya RSUD dengan cost recovery >70% menjadi 40%, meningkatnya jumlah Rumah Sakit melaksanakan QA (ISO 9001-2000 atau Depkes) menjadi 50%, meningkatnya RS dengan BOR > 60% menjadi 20%, meningkatnya RS dengan LOS < 5 hari menjadi 90%, meningkatnya RSUD dengan net death rate < 25% menjadi 60%, meningkatnya RS dengan jumlah bed kls 3 sesuai standar Depkes menjadi 93%, dan meningkatnya jumlah puskesmas memenuhi standar 80% obat generik menjadi 60%, Meningkatnya industri rumah tangga yang berizin dimonitor sesuai standar menjadi 30%.

4.2.3 Program Penanganan Gawat Darurat dan bencana

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain: meningkatnya resptime ambulance < 20 menit masyarakat tidak mampu menjadi 20 menit, terlaksananya pembuatan public safety center di 5 wilayah dengan sasaran 42%, tersusunnya informasi gadar dan bencana yang dibutuhkan menjadi 80%, serta tersedianya sistem dan pedoman pelayanan gadar dan bencana.

4.2.4 Program Perbaikan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain: terlaksananya tahapan perencanaan dilaksanakan (100%), tersedianya dokumen perencanaan, Tersusunnya Perda tentang Sistem kesehatan Prov. DKI Jakarta, tersedianya dokumen pengendalian dan penilaian, tersedianya dokumen indikator pencapaian program, tersedianya provincial health account, tersedianya dokumen kebijakan pembiayaan kesehatan, penilaian kepuasan pelanggan di RSUD menjadi 100%, media promosi kesehatan untuk program prioritas menjadi 100%, pelayanan kesehatan ikut dalam jejaring promkes menjadi 100%, dan meningkatnya kelompok Lansia per puskesmas menjadi 80% dengan sasaran 40% dan capaian 63%.

5. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

5.1 Fungsi Kependudukan

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui upaya pengendalian urbanisasi, pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program KB serta pelayanan kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil dengan melaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung fungsi ini adalah sebagai berikut :

5.1.1 Program Pengendalian Kependudukan

Adapun hasil yang telah dicapai dalam program ini antara lain terselenggaranya penyuluhan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB di Posyandu sebanyak 12 kegiatan (682 orang), terselenggaranya pembinaan kelompok akseptor melalui pendampingan tingkat kelurahan sebanyak 12 kegiatan di 267 kelurahan, terselenggaranya operasional pelayanan KB

dengan berbagai metode (operasi wanita, operasi pria, pemasangan IUD dan pelayanan implant) sebanyak 16.980 akseptor, serta terselenggaranya pelayanan KB terpadu TMKK di tingkat kecamatan, kotamadya dan provinsi sebanyak 8 kegiatan.

Selain itu, juga telah dilaksanakan koordinasi pemulangan urbanisasi dalam wadah Badan Koordinasi Pemulangan Urbanisasi (Bakopur), penyusunan peta demografi Provinsi DKI Jakarta, operasi bina kependudukan (biduk) pendatang WNA,serta penyuluhan kependudukan melalui media cetak dan elektronik.

5.1.2 Program pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 adalah pemutakhiran data kependudukan (P4B), Pendidikan dan Pelatihan komuterisasi aplikasi kependudukan sebanyak 40 orang, Pendidikan dan Pelatihan sidik jari sebanyak 40 orang, penyediaan mobile file sebanyak 8 unit, koordinasi dan monitoring pencatatan perkawinan luar balai, Backup data registrasi akta catatan sipil, penyediaan perangkat keras dan lunak Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), pemeliharaan operasionalisasi aplikasi SIMDUK, pengembangan sidik jari (finger scan), Integrasi SUMDUK dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK), serta tersedianya perangkat dokumentasi akta catatan sipil.

5.2 Fungsi Ketenagakerjaan

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta agar terampil dan mahir, mampu menyelesaikan tugas-tugas ketenagakerjaan secara handal dan profesional sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, pembangunan fungsi ketenagakerjaan ini juga dimaksudkan untuk menekan dan mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

5.2.1 Program Pengembangan Kesempatan Kerja

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan baik di dalam maupun di luar negeri dari 10.221 orang pada tahun 2005 menjadi 14.057 orang pada tahun 2006, jumlah wirausahawan baru mencapai 326 orang, jumlah transmigran asal DKI Jakarta mencapai 790 KK (2.445 jiwa), dan tersedianya data lowongan kerja dan pencari kerja.

5.2.2 Program Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja

Pada tahun 2006, setelah dilakukan evaluasi terdapat terselesaikan jumlah kasus perselisihan hubungan kerja mencapai 441 kasus, peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan peningkatan jumlah perusahaan yang telah melaksanakan peraturan perundang-undangan Bidang K3 dan Bidang Norma Kerja dari 492 perusahaan pada tahun 2005 menjadi 644 perusahaan pada tahun 2006.

5.2.3 Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja pada BLK / BLKD Provinsi DKI Jakarta dari 2.632 orang pada tahun 2005 menjadi sebanyak 2.780 orang pada tahun 2006.

6. Bidang Sosial dan Budaya

6.1 Fungsi Keagamaan

Fungsi ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana harmonis dan saling menghormati dengan menyempurnakan kualitas pelaksanaan ibadah menurut syariat agamanya masing-masing serta meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

6.1.1 Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama, bertujuan

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama dari Tingkat RT/RW sampai Tingkat Provinsi, peningkatan kerukunan umat beragama; serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keagamaan.

6.1.2 Program Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan

Adapun hasil yang telah dicapai pada Program ini antara lain terlaksananya bimbingan dan pelatihan manajemen pengurusan tempat-tempat ibadah; dan terlaksananya pembuatan peta penyebaran tempat ibadah, pembinaan manasik haji bagi masyarakat dan jamaah haji, penyampaian informasi haji daerah, penyetoran BPIH, pembinaan petugas haji daerah.

6.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pilar-pilar sosial masyarakat, meningkatkan SDM dan fasilitas sarana prasarana kesejahteraan sosial dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan anak terlantar, dan memantapkan penanganan PMKS, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

6.2.1 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat penyediaan bantuan yang berkesinambungan untuk Panti Sosial Tresna Werda dan Panti Sosial Asuhan Anak serta Asuhan Keluarga, penyusunan kebijakan PMKS dan pemberdayaan sosial masyarakat, peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak, remaja, keluarga dan lanjut usia dan penyandang cacat,

pengurangan masalah tuna sosial, peningkatan pelayanan terhadap korban bencana dan musibah lainnya, orang terlantar dan korban tindak kekerasan, serta tersusunnya pedoman pelayanan kesejahteraan sosial.

6.2.2 Program Peningkatan Peran Serta Sosial Masyarakat

Setelah dievaluasi, hasil yang telah dicapai pada program ini adalah peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesejahteraan sosial.

Hasil yang sudah dicapai pada program ini antara lain : terlaksananya pelatihan kader perspektif gender; terlaksananya pengembangan dan penguatan lintas sektor pemberdayaan pilar-pilar sosial; terlaksananya penguatan jejaring kerja pemerintah, masy. Dan stakeholder lainnya berdasarkan issue sosial; terlaksananya kemitraan orsos, pokja kesuma dan BKKS; terlaksananya koordinasi informasi kesos; terlaksananya pelatihan PSM tingkat penguatan; terlaksananya penguatan dan pemberdayaan TKSM; terlaksananya peningkatan solidaritas kesetiakawanan sosial;

6.2.3 Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman

Hasil evaluasi, pada tahun 2006 terdapat penambahan areal pemakaman seluas 39.500 m² dan penambahan tanah siap pakai seluas 34.638 m², terlayannya pemakaman jenazah terlantar sebanyak 1.271 jenazah, pelayanan pemakaman sebanyak 31.936 jenazah atau 0,27% dari jumlah penduduk, serta tersedianya petak makam siap pakai sebanyak 7.631 petak makam.

Selain itu juga dilaksanakan urugan tanah TPU; Pembangunan/pemasangan papan blok, patok Blad, plaket makam; penanaman pohon pelindung TPU; perumputan areal pemakaman; penanaman tanaman hias; rehab kantor TPU; pembangunan/pemasangan papan transparansi, pengumuman; pembangunan/pemasangan papan penertiban; penyusunan masterplan TPU di Provinsi DKI Jakarta; penomoran sistem koordinat (4

lokasi TPU); penyusunan rencana penggunaan tanah makam di TPU-TPU DKI; inventarisasi tertib administrasi dokumen tanah TPU; pengendalian penerimaan retribusi pemakaman dalam PAD; Pemb. Dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan peraturan pemakaman; kegiatan penyuluhan pemakaman melalui media cetak dan elektronik; pelayanan angkutan dan perawatan jenazah terlantar dari TKP ke RSCM; Pengadaan ramuan jenazah terlantar/tunawan; pengadaan kain kafan jenazah terlantar/tunawan; dan pengadaan peti jenazah terlantar/tunawan.

6.3 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan prakarsa serta partisipasi masyarakat sebagai sumber daya insani pembangunan dalam upaya pemerataan pelaksanaan pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik serta terciptanya masyarakat Jakarta sebagai warga kota yang mandiri dan sejahtera. Melalui fungsi ini diharapkan masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya melalui pemanfaatan potensi yang ada padanya agar mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasinya. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

6.3.1 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terselenggaranya upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui promosi dan pengembangan jaringan usaha konsultan keuangan mitra bank (KKMB) di 267 kelurahan, peningkatan akses pembangunan masyarakat dalam pilot project daur ulang sampah di tingkat RW, pemberdayaan masyarakat dalam penyiapan instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga (TTG ramah lingkungan) di 6 wilayah, terselenggaranya bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat terhadap

keamanan di lingkungan permukiman sebanyak 480 orang dari 56 kelurahan, pembangunan fasilitas sosial melalui program manunggal karya jaya sebanyak 40 lokasi di 6 wilayah, terelenggaranya pemetaan daerah rawan di 267 kelurahan, serta terbinanya nilai-nilai gotong royong sebanyak 267 orang.

6.3.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Setelah dilakukan evaluasi, pada tahun 2006 terdapat peningkatan jumlah alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dari Rp676.150.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp723.370.324.783 pada tahun 2006.

6.3.3 Program Pemberdayaan Perempuan

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersusunnya profil statistik dan indikator gender melibatkan 120 orang dari instansi terkait, terselenggaranya pelatihan peningkatan kemampuan lembaga dan individu terhadap 100 organisasi LSM peduli perempuan, tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap 170 orang aparat, masyarakat dan LSM.

6.4 Fungsi Pelestarian Budaya Dan Permuseuman

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, dan melakukan pembinaan dan pengembangan museum dan peninggalan cagar budaya/sejarah yang dapat diharapkan berpotensi untuk pengembangan pariwisata daerah. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

6.4.1 Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terselenggaranya perlindungan dan pengembangan seni budaya Betawi yang diperkaya sebagai sumber daya pengembangan pariwisata daerah serta bertambahnya lokasi penyediaan kesenian budaya Betawi di DKI Jakarta.

6.4.2 Program Pengembangan Museum dan Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya/Sejarah

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain peningkatan sistem informasi seni budaya dan permuseuman, jumlah kelompok pencinta budaya dan seni, serta kelompok arsitektur budaya, peningkatan angka kunjungan museum dari 729.634 orang pada tahun 2005 menjadi 816.404 orang pada tahun 2006, penambahan keragaman obyek wisata yang berbasis seni, budaya dan peninggalan sejarah, meningkatnya publikasi kebudayaan dan permuseuman serta meningkatnya kualitas dan profesionalisme para seniman, budayawan, pemerhati seni, pengelola/pemilik benda cagar budaya.

6.4.3 Program Pengawasan Pemugaran

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersedianya data yang akurat terhadap kondisi lingkungan pemugaran, dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan seni budaya dan permuseuman sebanyak 216 bangunan cagar budaya dan 7 museum.

6.5 Fungsi Olahraga dan Kepemudaan

Fungsi olah raga dan kepemudaan ditujukan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan dan mengorganisasikan dirinya sebagai wahana pendewasaan untuk melindungi seluruh generasi muda dari bahaya destruktif. Disamping itu juga meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan pemasaran olah raga secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-

lembaga, pendidikan olah raga dan pembinaan pramuka. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

6.5.1 Program Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain peningkatan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan kualitas remaja dalam rangka menjadikan generasi muda yang mandiri dan tangguh serta meningkatkan rasa nasionalisme, peningkatan jumlah anggota pramuka sebanyak 65.816 siaga, 40.068 penggalang dan 7.476 penegak, serta terselenggaranya pengembangan fungsi 29 gelanggang remaja kecamatan dan 5 gelanggang remaja kotamadya.

6.5.2 Program Peningkatan Prestasi Olahraga.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terbinanya 53 cabang olahraga prestasi, terselenggaranya kejuaraan basket ball sister city dan Jakarta Inetnasional 10 K, terselenggaranya kejuaraan/investasi olahraga tingkat lokal 18 kegiatan, tingkat nasional 7 kegiatan dan tingkat internasional 3 kegiatan, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebanyak 41 lokasi dan rehabilitasi 47 lokasi sarana olahraga.

6.5.3 Program Pembinaan Olahraga Masyarakat

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terlaksananya program pemassalan dan pembibitan 29 cabang olah raga unggulan dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga masyarakat.

7. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

7.1 Fungsi Sumber Daya Alam

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil tambang dan energi guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta mengendalikan penggunaan air tanah oleh instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Untuk mewujudkan kegiatan prioritas dimaksud, telah dilaksanakan 2 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

7.1.1 Program Pengembangan Sumber Daya Pertambangan dan Energi

Hasil yang telah dicapai pada kegiatan prioritas program ini adalah tersedianya BBM solar 25 genset PLTD untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Seribu dengan jam operasional 18 – 22 jam per hari untuk rumah (..... jam/hari tahun 2005). Sedangkan pembangunan pipa gas busway dan pembangunan kabel bawah laut pada Perubahan APBD 2006 mengalami perubahan sehingga tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan pembangunan pipa gas dilaksanakan oleh investor sedangkan pembangunan kabel bawah laut ditunda karena terkendala pada proses persiapan pelaksanaan sehingga akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2007.

Dengan tersedianya BBM solar untuk genset PLTD di Kepulauan Seribu, masyarakat kepulauan Seribu dapat menikmati listrik yang merupakan kebutuhan dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosialnya.

Sedangkan adanya ketersediaan jaringan pipa gas busway dapat menyediakan bahan bakar gas untuk busway koridor II dan III khususnya dan angkutan publik lainnya. Dengan demikian pencemaran udara di DKI Jakarta dapat berkurang.

7.1.2 Program Pengembangan Sumber Air Tanah

Adapun hasil yang telah dicapai pada kegiatan prioritas program ini terkendalinya pelayanan permohonan pemboran dan pemanfaatan air bawah tanah (jumlah m3 air tanah yang disedot dengan ijin baru/kapasitas maksimal air bawah tanah yang dapat dibor) melalui proses perijinan yang sesuai standarisasi dan optimalisasi perijinan (penelitian, analisa, evaluasi data) serta terlaksananya pemeriksaan/pengawasan dan pembinaan kegiatan pemboran dan pemanfaatan air bawah tanah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi air bawah tanah telah dilaksanakan studi dampak

resiko dewatering, studi kualitas air tanah di lima wilayah DKI Jakarta dan pengembangan model air bawah tanah berbasis digital.

Dengan adanya optimalisasi perijinan, pemeriksaan dan penertiban maka pemanfaatan air bawah tanah dapat terkendali walaupun tidak maksimal karena sampai saat ini kebutuhan masyarakat akan air bersih belum dapat terpenuhi oleh jaringan pipa air bersih. Dengan demikian untuk penghematan air bawah tanah terutama **air tanah dalam** perlu diperluas jaringan pipa air bersih dan sumber-sumber air permukaan sebagai bahan baku air bersih. Selain itu juga perlu ditetapkan harga air/m³ lebih mahal dari air bersih jaringan pipa, terutama untuk pengambilan air tanah dengan kapasitas besar. Disamping itu sebagai upaya konservasi air tanah masih diperlukan sumur resapan, injection well maupun reservoir air bawah tanah. Dengan adanya studi dampak dewatering dari pembangunan basement gedung, kualitas air tanah dan modeling air bawah tanah dapat menjadi bahan kebijakan yang dituangkan dalam rencana tindak untuk diimplementasikan.

7.2 Fungsi Lingkungan Hidup

Dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi laut sebagai sumber daya ekonomi, transportasi dan pariwisata, fungsi sungai/kali sebagai sumber daya ekonomi dan pariwisata, peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan fungsi sungai dan laut serta terkendalinya emisi gas pencemar udara, terkendalinya pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan swasta akan pentingnya lingkungan hidup, terlaksananya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, ruang interaksi publik dan taman kota.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud telah dilaksanakan 4 program sebagai berikut :

7.2.1 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah Terlaksananya pemantauan kualitas laut serta sistem deteksi dini kualitas perairan teluk

Jakarta 12 citra dan terlaksananya pemantauan kualitas air sungai, air tanah, air waduk 2 kali setahun. Terlaksananya peningkatan eko wisata Ciliwung dengan kegiatan arung jeram, kader lingkungan dan kampung ramah lingkungan di sekitar sungai Ciliwung. Sedangkan hasil yang dicapai untuk pengendalian emisi gas pencemar udara adalah berkurangnya beban emisi kendaraan bermotor bukan kendaraan umum sebesar 92 %, meningkatnya mobil penumpang pribadi memenuhi baku mutu emisi sebanyak 24.830 buah dan berkurangnya emisi gas buang dari sumber tidak bergerak sebesar 50%. serta terlaksananya penerapan kawasan dilarang merokok.

Dengan terlaksananya pemantauan kualitas air laut, air sungai, air tanah, air waduk dan kualitas udara dapat menjadi data untuk mengenali kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencemari lingkungan sehingga dapat diambil tindakan antara lain melalui uji emisi, program PBLL, Proper, Penetapan kawasan dilarang merokok (KDM) dan lainnya. Dengan demikian pencemaran air maupun udara dapat dikurangi dan dampak ekonomi akibat kesehatan masyarakat terganggu dapat dikurangi.

7.2.2 Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain meningkatnya pengawasan terhadap pengendalian dampak melalui penilaian dokumen AMDAL sebanyak 358 pemakrassa kegiatan, meningkatnya penuntasan kasus dan sengketa lingkungan hidup sebanyak 19 kasus serta terlaksananya pengadaan sarana apung pemantauan lingkungan laut sedangkan untuk pengadaan laboratorium apung tidak terlaksana namun diharapkan pada tahun berikutnya dapat dilaksanakan karena pengoperasian sarana apung tergantung pada tersedianya laboratorium apung tersebut, serta peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan swasta melalui kegiatan sosialisasi, kemitraan, green school, pameran-pameran, pelayanan informasi.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran kota

serta adanya penegakan hukum lingkungan maka kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan masyarakat dapat diminimalkan.

Permasalahannya untuk merubah sikap / perilaku masyarakat agar peduli dan ikut serta dalam pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan tidak mudah dan perlu pendampingan sosialisasi terus menerus ditingkat RT, kantor, sekolah dsb. Akan lebih baik pemahaman tersebut dimulai sejak usia dini atau anak masuk sekolah. Untuk itu diharapkan pemahaman tentang lingkungan hidup (teori maupun praktikal) secara khusus dapat masuk kedalam kurikulum sekolah.

7.2.3 Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Adapun hasil yang dicapai adalah tersusunnya rencana konseptual dan panduan pengembangan pertamanan; tersedianya tanaman hias, pohon pelindung, dan tanaman produktif dari 4 lokasi kebon bibit; meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan ruang interaksi publik di 3 lokasi; penataan tanaman di 2 jalur median jalan, penataan jalur hijau di 3 tepian kali, penataan tanaman di 7 Fly Over (seperti di FO Grogol, FO Sudirman, FO Karet, FO Lebak Bulus, FO Kalibata, dan FO Pondok Kopi), penataan 3 taman di Lapangan Banteng, Taman Persija Menteng, dan penataan Taman Ismail Marzuki; penataan pedestrian di 4 lokasi seluas 16.429,92 M2 di jalur jalan Jenderal Sudirman; penataan kawasan kota tua; serta tertatanya jalur hijau pada 4 koridor busway; sedangkan untuk tersedianya lahan RTH dan terbangunnya taman di permukiman padat penduduk seluas 16.037 m2 belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena status kepemilikan tanah yang belum jelas serta tidak adanya kesepakatan harga dalam pembebasan lahan.

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan program penataan dan pengembangan RTH adalah selain menambah keindahan kota, semakin meningkatnya luasan ruang hijau akan berdampak pada mengurangi tingkat polusi udara, menurunkan suhu kota, serta semakin tersedianya ruang interaksi public.

Permasalahan yang dirasakan dalam pengelolaan RTH adalah semakin sulitnya mencari lahan yang dapat dibebaskan untuk ruang terbuka hijau, walaupun ada pada umumnya pemilik lahan akan meminta harga diatas Nilai Jual Obyek Pajak. Selain itu lahan-lahan terbuka hijau yang berada dalam penguasaan masyarakat selama ini tidak dimasukkan sebagai potensi lahan terbuka hijau sehingga luasan terbuka hijau dinilai kurang memadai.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut dapat ditempuh upaya mengoptimalkan lahan milik pemerintah yang ada sehingga dapat menambah luasan ruang terbuka. Selain itu lahan-lahan terbuka milik masyarakat dapat dimanfaatkan dan dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dengan memberikan insentif bagi pemilik lahan sebagai kompensasi atas pemanfaatan lahan miliknya untuk kepentingan umum.

7.2.4 Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan

Adapun hasil yang dicapai melalui: pembangunan air mancur di 2 lokasi yaitu Air Mancur Kepala Negara Halim dan Islamic Center; perancangan teknis instalasi air mancur, penataan, penghijauan taman; pembangunan instalasi pencahayaan taman; pelatihan di bidang pertamanan; serta penggalangan kemitraan pengusaha/swasta.

Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program ini adalah semakin meningkatnya keserasian dan keindahan taman kota, bertambahnya taman kota yang dapat dimanfaatkan public dan penempatan ornament dan street furniture yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan kemampuan kebun bibit dalam menyediakan jumlah dan jenis tanaman yang dibutuhkan masyarakat. Untuk memecahkan masalah ini dapat ditempuh melalui optimalisasi lahan dan metoda pembibitan sehingga dapat meningkatkan kemampuan produksi kebun bibit. Selain itu

dengan melibatkan partisipasi masyarakat maka hal tersebut dapat pula meningkatkan kemampuan penyediaan bibit dan pohon.

7.3 Fungsi Kebersihan

Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kebersihan serta tersedianya lokasi TPA (Tempat Pemusnahan Akhir) dan pengolahan sampah dengan teknologi penanganan yang tepat guna dan ramah Lingkungan .

Adapun rincian hasil masing-masing program adalah sebagai berikut:

7.3.1 Peningkatan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah terlaksananya swastanisasi kebersihan di 28 kelurahan dan Monas, Terlaksananya pemadatan sampah rata – rata 1500 ton/hari dan pengangkutan sampah ke TPA Bantar Gebang sebesar rata – rata 5.700 ton/hari. Terlaksananya modifikasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor di IPAK Duri Kosambi dan Pulogebang.

Selain program prioritas juga terdapat program dedicated penyediaan pengolahan sampah dengan teknologi waste to energi incinerator namun pada tahun 2006 baru dalam tahap persiapan sosialisasi.

Sedangkan untuk penyediaan lokasi TPST di Marunda pada perubahan APBD 2006 mengalami perubahan/ditiadakan anggarannya sehingga tidak dilaksanakan. Namun mengingat sebagai indikator Renstrada 2002-2007 yang harus dipenuhi diharapkan pada tahun 2007 dapat disediakan.

Dengan terangkut dan termusnahkannya sampah dari kota Jakarta maka kebutuhan masyarakat untuk pembuangan sampah terlayani, kebersihan kota Jakarta terjaga dan kesehatan masyarakat juga terlindungi.

Permasalahannya sampai saat ini untuk Standar Pelayanan Minimum pengelolaan sampah dan Hasil Review Masterplan Pengelolaan Sampah belum dibakukan dalam bentuk perundang-undangan. Untuk lebih efektif dan efisien sistem pelayanan dan pengelolaan persampahan kota Jakarta maka perlu dibakukan dalam perundang-undangan (Perda, Pergub)

7.3.2 Program Peningkatan pelayanan kebersihan

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui penayangan filler kebersihan di 11 stasiun televisi, 3 media cetak, lomba lingkungan bersih, gerakan kebersihan di lokasi rawan sampah, dialog interaktif, penyuluhan dan sosialisasi kebersihan dan 3 R kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, P2WKSS, tokoh masyarakat, pengusaha. Terlaksananya penyapuan pada jalan – jalan protokol, jalan utama dan tempat fasilitas umum.

Bertambahnya sarana penanggulangan sampah truck compactor besar sebanyak 20 unit, truck compactor kecil sebanyak 43 unit, TPS Indoor waste composting station dan refused collector vehicle sebanyak 10 unit.

Dengan meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan maka masyarakat ikut menjaga kebersihan kota. Permasalahannya walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi, kampanye, lomba kebersihan, iklan layanan kebersihan dan sebagainya namun kesadaran masyarakat masih belum sesuai sebagaimana diharapkan. Untuk merubah sikap/prilaku memerlukan sosialisasi yang terus menerus dan waktu yang lama. Disamping itu agar Perda Nomor 5 tahun 1998 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih ditegakkan lagi terutama untuk sanksi bagi masyarakat yang tidak mengindahkan kebersihan dan diberlakukannya retribusi untuk pelayanan sampah sebagaimana prinsip "Polluter Pay Principle" bahwa setiap orang harus membayar polusi yang dihasilkannya.

8. Bidang Sarana dan Prasarana Kota

8.1 Fungsi Kelengkapan Kota

Dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum serta jaringan utilitas, pelayanan air bersih, dan pelayanan air limbah yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 4 program sebagai berikut :

8.1.1 Program pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas

Adapun hasil yang telah dicapai pada kegiatan prioritas program ini antara lain adalah dilaksanakannya penataan jaringan utilitas di kawasan Medan Merdeka. Sedangkan untuk pembangunan Ducting System di JL. HR Rasuna Said yang sedianya akan mulai dilaksanakan pada tahun 2006, belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena masih belum diselesaikannya kajian mengenai AMDAL, sosialisasi yang lebih intensif antara pengguna jaringan utilitas, serta mekanisme penggunaan dan pengelolaan sarana utilitas terpadu. Untuk itu, program ini masih perlu dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang

8.1.2 Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum

Adapun hasil yang telah dicapai pada kegiatan prioritas program ini antara lain adalah bertambahnya jumlah titik lampu penerangan jalan jalan jalan arteri, kolektor, lokal, pedestrian & persimpangan, flyover & underpass, ruang terbuka, penunjang transportasi, pencahayaan gedung, Tempat Ibadah & Sarana Olahraga, bantaran kali dan event–event hari besar daerah, nasional maupun keagamaan sebanyak 6.800 titik lampu, meningkatnya kualitas titik lampu di jalan dan tempat umum pada daerah-daerah rawan kriminalitas dan tempat umum lainnya sebanyak 1.800 titik lampu, serta, penerangan pada 4 koridor busway sebanyak 3.000 titik lampu guna menunjang kelancaran transportasi massal untuk masyarakat. Disamping adanya peningkatan respon time terhadap laporan pengaduan masyarakat atas gangguan penerangan jalan dan tempat umum dari 7 hari menjadi 3 hari.

Manfaat dari program Pengembangan Pelayanan Air Limbah ini adalah penurunan tingkat pencemaran air tanah dan air permukaan, terutama pada kawasan yang telah dilayani oleh instalasi pengolahan air limbah.

8.1.3 Program Pengembangan Pelayanan Air Limbah

Adapun hasil yang telah dicapai pada kegiatan prioritas program ini antara lain adalah pengembangan IPAL di 2 lokasi permukiman yaitu peningkatan

IPAL Malakasari dan pembebasan lahan dalam rangka pembangunan IPAL Pondok Kelapa. Disamping itu dilaksanakan peningkatan IPAL di 7 lokasi kantor pemerintahan dan dinas teknis, serta pemulihan pencemaran di 2 lokasi waduk, yaitu Waduk Melati dan Waduk Tomang.

8.1.4 Program Pengembangan Pelayanan Air Bersih

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pemulihan pencemaran air dan prasarana air limbah di DKI Jakarta.

8.2 Fungsi Tata Air

Dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya. Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 2 program sebagai berikut.

8.2.1 Program Pengendalian Banjir

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah terbangunnya sistem pengendali banjir berupa rumah pompa, pompa dan pintu air yang fungsinya untuk mengendalikan genangan di titik-titik kawasan rawan genangan di Jakarta. Untuk menjaga kebersihan saluran, telah dibangun saringan sampah di Waduk Sunter dan Waduk Pulo Mas. Sedangkan untuk kegiatan Dedicated Banjir Kanal Timur, telah dibebaskan lahan untuk pembangunan Banjir Kanal Timur seluas 57,8 ha, tertatanya kawasan Kali Angke pada segmen Jembatan PIK sampai dengan Saluran Gendong Muara Angke sepanjang 900 m, serta Penurapan Banjir Kanal Barat pada segmen KS Tubun – Tomang sepanjang 1400 m. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan serta operasional sarana prasana pengendali banjir seperti rumah pompa, pompa, pintu air.

Manfaat yang bisa diberikan dari program ini adalah menurunnya tingkat genangan dan terkendalnya banjir di kawasan banjir dan genangan di DKI Jakarta pada musim hujan sehingga kerugian yang diderita dapat

diminimalisir sekecil mungkin. Sebagai gambaran kejadian Baji yang terjadi di awal 2007, khususnya di kawasan yang dilalui oleh Banjir Kanal Barat (BKB) yang telah diturap dengan sheet pile relative lebih terlindungi dibandingkan dengan yang belum. Untuk itu dimasa yang akan datang, penurapan BKB beserta saluran dan sungai yang lainnya masuk perlu dilaksanakan.

8.2.2 Program Peningkatan Drainase Kota

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah, terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan 5 lokasi waduk, yaitu Waduk Sunter Hulu, Cimanggis, Cilangkap, Rawalindung dan Rawabadung yang berfungsi sebagai sarana prasarana drainase kota; dan terlaksananya pemeliharaan/pengerukan saluran-saluran penghubung dan mikro/permukiman sebagai sarana dan prasarana drainase di 5 wilayah kota.

Manfaat yang bisa diberikan dari Program Peningkatan Drainase Kota adalah mengalirnya air buangan rumah tangga dan aliran air hujan lokal baik di kawasan yang dapat mengalirkan air secara gravitasi maupun daerah yang menggunakan system polder, sehingga kegiatan sehari-hari serta aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan secara normal.

8.3 Fungsi Perhubungan

Arah dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kota pada fungsi perhubungan adalah meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana perhubungan dalam memberikan pelayanan dan daya dukung kota. Strategi fungsi perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kota besar seperti kemacetan lalu lintas, rendahnya pelayanan angkutan umum, rendahnya pelayanan untuk pejalan kaki dan lain lain.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

8.3.1 Program Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan

Hasil yang telah dicapai adalah terlaksananya perbaikan darurat ringan dan ringan (tutup lubang) di 5 wilayah DKI Jakarta, tersedianya lahan jalan untuk jalan dan jembatan pada busway koridor 4, 5, 6 dan 7 dan terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada busway koridor 4, 5, 6 dan 7, terselesaikannya pembangunan 2 underpass (UP. Kebayoran Lama dan Pasar Minggu) serta dimulainya pembangunan 1 Underpass (UP. KA Angkasa) dan terselesaikannya pembangunan 2 Flyover (FO. Martadinata, FO Roxy) serta dimulainya pembangunan 1 Flyover (FO. Yos Sudarso – Kelapa Gading), terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan (arteri, kolektor dan lokal), tersedianya lahan untuk jalan dan jembatan arteri/kolektor dan lokal, tersedianya fasilitas trotoar, tersedianya excavator standar dan terpeliharanya alat-alat besar.

Adapun outcome program ini adalah meningkatnya kualitas jalan di daerah permukiman, tersedianya jalan arteri untuk kawasan permukiman dan perdagangan, dan meningkatnya fasilitas trotoar untuk pejalan kaki.

8.3.2 Program Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

Hasil yang telah dicapai adalah terkendalinya dan terawasinya arus lalu lintas dan angkutan umum, tersedianya fasilitas penyeberangan orang, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, terpeliharanya rambu-rambu, marka jalan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku, terawatnya dan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor agar mendapatkan hasil uji yang akurat dan memperpanjang umur pemakaian, terpeliharanya dan terkendalinya kebersihan, taman dan bangunan di terminal bus, bertambahnya dan terpeliharanya peralatan pemantau, observasi dan pengawas frekuensi.

Adapun outcome program ini adalah menurunnya tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, bertambahnya sarana pengaturan lalu lintas, meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum, serta terkendalinya penggunaan frekuensi radio dan tertatanya jaringan pos secara baik.

8.3.3 Program Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum

Hasil yang telah dicapai adalah tersedianya angkutan umum busway koridor 4, 5, 6 dan 7, Tersedinya Pool Busway, Tersedianya bus sekolah, Terjadwalnya kepastian keberangkatan serta terpeliharanya kapal penyeberangan ke Kepulauan Seribu.

Adapun outcome program ini adalah tersedianya angkutan umum massal, meningkatnya kedisiplinan awak angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, tersedianya angkutan penumpang dan barang dari dan ke kepulauan seribu.

8.4 Fungsi Perumahan dan Permukiman

Fungsi ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, sehingga tersedia kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 3 program. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

8.4.1 Program Pengembangan Perumahan

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain melalui terbangunnya rumah susun sebanyak 2.897 unit berupa rumah susun sewa dan dikelola dengan nilai subsidi yang tepat dan menjangkau target sasaran pada Kapuk Muara, Marunda, Jatirawasari, Pondok Bambu, Karet Tengsin dan Pulo Jahe; tersedianya kebijakan lahan perkotaan (urban land policy), serta tersusunnya perencanaan kawasan permukiman sehat di 5 wilayah dan kabupaten administrasi Kep. 1000; sedangkan tersedianya lahan rusun di 8 lokasi seluas 179.527 m2 belum dapat dilaksanakan dimana menghadapi kendala dalam pembebasan tanah yakni status kepemilikan tanah serta kesepakatan harga, seperti: pembebasan tanah lokasi rusun Cilincing, pembebasan tanah lokasi rusun Komarudin, pembebasan tanah lokasi

rusun Cakung Timur, pembebasan tanah lokasi pembebasan tanah lokasi rusun Pulo Gebang, pembebasan tanah lokasi PIK Pulo Gadung, dan pembebasan tanah lokasi Jl Bekasi Timur Km.

Outcome dominant pada program ini adalah; bertambahnya ketersediaan perumahan khususnya rumah susun sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau.

8.4.2 Program Pengembangan Lingkungan Permukiman

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah :perbaikan sarana dan prasarana permukiman kumuh pada 663 lokasi di 5 wilayah kotamadya seluas 346.954 m²; tersosialisasinya tertib penghunian rusun melalui sinetron maupun pembuatan video dokumenter; tersusunnya Raperda perumahan dan permukiman serta perawatan rumah susun di beberapa lokasi, terselesaikannya sengketa penghunian serta perkara perumahan di PTUN dan Pengadilan Negeri sebanyak 18 perkara, serta terkelola dan terawatnya rumah.

Outcome dominan pada program ini adalah; semakin tertatanya lingkungan permukiman.

8.4.3 Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah tersusunnya program permukiman, terkelolanya barak penampungan, terlaksananya pameran PRJ, Prokasih, Hari Air, Hari Bumi dan Hari Habitat, serta terciptanya tata tertib penghunian rusun sewa-beli.

Outcome dominan pada program ini adalah semakin meningkatnya jumlah fasilitas pemukiman yang layak.

8.5 Fungsi Tata Ruang

Dimaksud untuk mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif, berdasarkan prinsip adil, efisiensi dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 4 program sebagai berikut :

8.5.1 Program Perencanaan Ruang

Hasil yang telah dicapai program ini adalah : tersusunnya rencana dan Penarikan Trace Jalur Bus Priority (Koridor 7 dan 8), bertambahnya 2 Seksi DTK Kecamatan dan 1 SDTK yang memperoleh sertifikasi manajemen ISO 9001:2000, tersedianya data dasar perencanaan untuk kebutuhan penataan ruang dan pelayanan masyarakat, tersusunnya Pedoman Implementasi Rencana Tata Ruang, tersosialisasi perencanaan dan pelayanan ketatakotaan melalui berbagai media, tersusunnya konsep Pencapaian Standar Green-Ratio, Water-Ratio, Road-Ratio.

Outcome dari program ini adalah tersedianya arahan dan kebijakan serta pelayanan tata ruang yang menjunjung azas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

8.5.2 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Hasil yang telah dicapai program ini adalah : tersedianya berbagai trace sarana dan prasarna kota, tersedianya pola sebaran beberapa Sarana dan Prasarana Kota, penarikan trace MRT, penyusunan Pedoman Pembuatan Tata Ruang Bawah Tanah.

Outcome dari program ini adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang dan pengendaliannya secara terpadu, serasi, selarah, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan.

8.5.3 Program Penataan dan Pengawasan Bangunan

Hasil yang telah dicapai program ini adalah: terlaksananya pemeriksaan kelayakan bangunan tinggi, bertambahnya sejumlah 5 Seksi Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan yang memperoleh sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2000, terealiasasinya kerjasama dengan PT Pos dalam rangka pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat, tersedianya Data Bangunan 5 Wilayah, penyempurnaan Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2003 dan tersusunnya mekanisme perpanjangan izin mendirikan bangunan serta tersusunnya pedoman tata cara penilaian struktur bangunan, terlaksananya penuntasan tindakan penertiban di

Kecamatan Menteng, terlaksananya penertiban bangunan di 5 Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terekomendasinya Penjatuhan sanksi administratif bagi pemegang SIBP 5 Wilayah Kotamadya, tersosialisasinya ketentuan membangun kepada masyarakat dan pelaku pembangunan di 5 Wilayah.

Outcome dari program ini adalah terwujudnya lingkungan kota yang sehat dan tertata serta mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat.

8.5.4 Program Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis

Hasil yang telah dicapai program ini adalah: tersediannya Kajian Perencanaan Pengembangan Pelabuhan di sepanjang Pantai Utara serta kajian Pola Penyebaran Reklame di Sarana Prasarana Kota.

Outcome dari program ini adalah terpacunya pertumbuhan ekonomi kawasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota Jakarta secara signifikan.

8.6 Fungsi Tata Bangunan

Dimaksudkan untuk menyediakan bangunan gedung pemda dan menata lingkungan yang secara memadai agar dapat terwujud tata ruang yang harmonis, adil dan berkelanjutan.

Diarahkan untuk mewujudkan penataan bangunan gedung pemda yang berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 1 program dengan 52 kegiatan. Adapun program yang telah dilaksanakan adalah **Program Penataan Bangunan dan Gedung Pemda**

Hasil yang dicapai program ini adalah : terbangun dan beroperasinya gedung Blok C dan D Kantor Walikotamadya Jakarta Timur lengkap dengan meubelairnya, meningkatnya kualitas interior dan kulit luar gedung Blok A, serta terbangun dan beroperasinya podium gedung Blok A Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat, lengkap dengan meubelairnya, terbangunnya dan beroperasinya gedung Blok B dan Annex beserta meubelairnya dan terbangunnya Blok C2 Kantor

Walikotamadya Jakarta Barat, terbangunnya dan beroperasinya gedung sayap belakang Kantor Walikotamadya Jakarta Sealatan, lengkap meubelairnya dan interiornya, terbangun dan beroperasinya gedung parkir / Blok T Kantor Walikotamadya Jakarta Barat, terbangun dan beroperasinya Gedung Prasada Sasana Karya Provinsi DKI Jakarta, lengkap dengan meubelairnya, beroperasinya Gedung Blok B dan D Gedung Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta meubelairnya, mulai dibangunnya Gedung DPRD / Blok H dan G Balaikota (Eks. Kantor Dipenda), tertatanya serta meningkatnya kualitas keandalan sarana mekanikal dan elektrikal Tugu Monas, terbangunnya Gedung Sarana Sosial Budaya Islamic Centre.

Outcome program ini adalah terselenggaranya tugas dan kewajiban unit-unit kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara optimal.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasar 8 (delapan) bidang pembangunan, terdapat beberapa program yang menjadi komitmen utama Gubernur atau biasa disebut dengan *dedicated program*.

Berkenaan dengan hal tersebut, diuraikan hasil-hasil pelaksanaan *dedicated program* selama tahun 2006, sebagai berikut :

1. Banjir Kanal Timur, Kebutuhan pembebasan tanah adalah 401,2 ha, diantaranya terdiri dari 101 ha lahan fasum yang merupakan kewajiban pengembang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 73,44%

2. Normalisasi Sungai, Situ dan Saluran, didasarkan pada keinginan kuat Pemda untuk mewujudkan sungai dan situ yang tertata baik dan sehat serta mampu menjalankan fungsinya bagi lingkungan kehidupan kota. Pada tahun 2006 telah dilakukan penataan situ di DKI Jakarta yaitu situ Mangga Bolong, Babakan, Munjul, Sunter Hulu dan Cilangkap, selanjutnya situ di luar DKI Jakarta dilakukan inventarisasi untuk situ Ciawi dan situ Limau. Untuk penanganan sungai/kali pada tahun 2006 akan meliputi 6 lokasi antara lain

Taman Sari, Bekasi Tengah, Kali Cakung lama dan Banglio. Kemudian akan dilakukan perbaikan turap Banjir Kanal Barat pada 3 segmen, dari KS Tubun sampai Tomang dan sebagian segmen PIK hingga Muara Angke serta penataan sistem saluran di kawasan Kebon Sirih dan Medan Merdeka Selatan.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 40,60%

Program ini dilaksanakan guna mengurangi dan menanggulangi ancaman banjir yang sering melanda Jakarta dengan melakukan antara lain pengerukan kali/saluran, pemasangan pompa air, penurapan, pembangunan saluran, revitalisasi waduk dan lain-lain.

Kendala yang menghambat pelaksanaan program ini antara lain :

- ✓ Terdapatnya jaringan utilitas, sarana dan pohon pelindung yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan terutama pengerukan Pengerukan dan Perbaikan Turap Kali Sunter PA Pulo Gedung ke Hilir, dan Pembangunan Saluran & Waduk Kapuk Muara Penjaringan Junction.
 - ✓ Kegiatan yang dilaksanakan Sudin PU Tata Air Jakarta Utara terdapat rincian kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sama sekali atau tidak dapat direalisasikan sampai tuntas yaitu :
 - Perluasan Waduk Marunda, dikarenakan SK Gubernur tentang penguasaan lahan belum diterbitkan.
 - Pembangunan Saluran Beton Pegangsaan Dua, tidak bisa diselesaikan tepat waktu
 - Pembangunan Saluran Beton Jalan Remaja II RT 014/04, dikarenakan adanya kesalahan lokasi.
3. Pelabuhan Laut, didasarkan pada kebutuhan akan sarana transportasi yang memadai bagi warga Jakarta dan diversifikasi sumber penerimaan daerah. Kegiatan ini meliputi pengerukan dan pembangunan dermaga Muara Angke dan koordinasi Pelabuhan Muara Angke dan Jakarta serta New Port dengan Pemerintah Pusat.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 46,51%

4. Busway, didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan terhadap tersedianya angkutan massal yang aman, nyaman dan terjangkau sudah sangat mendesak mengingat semakin menurunnya daya dukung dan kondisi lalu lintas di Kota Jakarta. Sesuai pola transportasi makro yang telah direncanakan secara terintegrasi yaitu Busway, Monorail dan Subway, tahun 2003-2004 telah diselesaikan koridor I Busway (Blok M-Kota) dari rencana keseluruhan 15 koridor. Tahun 2005 telah diselesaikan koridor II (Pulo Gadung-Harmoni) dan koridor III (Harmoni-Kali Deres), Tahun 2006 direncanakan pembangunan koridor IV (Pulogadung-HI [Dukuh Atas](#)), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), koridor VI (Warung Jati/Ragunan-Imam Bonjol [Ragunan – Kuningan](#)) dan koridor VII (Kampung Rambutan-Kampung Melayu). Kegiatannya meliputi pembangunan JPO, halte, separator, pool dan ticketing sistem, struktur jalan, simpang, penyusunan AMDAL, trase, penataan taman dan pohon, relokasi utilitas dan penataan lampu PJU, penertiban PKL dan penghuni liar, serta koordinasi penertiban di 5 wilayah. Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 62,20%

Kegiatan yang mengalami hambatan-hambatan sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal antara lain :

- ✓ Kegiatan Penerangan Busway yang bersifat menunjang program busway yang dilaksanakan Dinas PJU & SJU sebesar Rp. 1.666.137.000 tidak terealisasi/tidak jadi dilaksanakan, hal ini terkait dengan tidak dilaksanakannya pembuatan selasar oleh Dinas Perhubungan, yaitu :
 - pelaksanaan pembangunan instalasi lampu penerangan selasar sebagai penunjang busway untuk koridor 4 ([Dukuh Atas](#) - P. Gadung)
 - pembangunan instalasi lampu penerangan selasar sebagai penunjang busway koridor 5 (Kp. Rambutan-Ancol),
 - pembangunan instalasi lampu penerangan selasar sebagai penunjang busway koridor 6 (Warung Jati-Imam Bonjol [Ragunan – Kuningan](#)) dan koridor 7 (Kp. Melayu-Kp. Rambutan).
- ✓ Total kegiatan/rincian kegiatan yang dimatikan/tidak direalisasikan di Dinas Perhubungan mencapai Rp. 47.304.405.000. Untuk program

busway kegiatan yang tidak direalisasikan antara lain kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana dan Kegiatan Lainnya Untuk Menunjang Busway yang terdiri dari beberapa rincian kegiatan antara lain:

- Project Management Busway tidak dilaksanakan karena perlunya Keputusan Gubernur mengenai implementasi anggaran tersebut.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Busway Koridor 3 Seksi 1 (Harmoni - Grogol) tidak dilaksanakan karena masih harus menunggu penyelesaian Fly Over Roxy.
 - Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Feeder Busway tidak dilaksanakan karena overlap dengan perencanaan lain.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Busway Koridor 2 Seksi 1 (Pulogadung - Pedongkelan), belum dapat terealisasi karena masih menunggu pembebasan lahannya dan hal ini telah dikoordinasikan dengan Walikotamadya.
 - Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Busway Koridor 2 Seksi 1 (Pulogadung - Pedongkelan), dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Feeder Busway tidak direalisasikan karena pembangunan fisiknya tidak dilaksanakan.
 - Pembangunan Pool Busway Koridor 6 dan Pembangunan Pool Busway Koridor 4 anggaran dimatikan karena tidak adanya lokasi pool.
- ✓ Busway Koridor II Pulo Gadung - Bermis Tahap Akhir, terdapat 23% lahan merupakan lahan tidak bebas sehingga dana yang tidak terserap diadakan dialihkan untuk kegiatan lain.
 - ✓ Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor Warung Jati - Imam Bonjol [Ragunan – Kuningan](#), lokasi pelebaran lajur reguler, terdapat tanah warga yang belum dibebaskan sepanjang 800 m lebar 6 m di kiri kanan dari TMN Margasatwa-Jl. TB simatupang
 - ✓ Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor Kampung Melayu – Ancol, Lokasi untuk pekerjaan layer hotmix dilajur reguler samping FO senen ke arah Jl. Kramat terdapat PKL

- ✓ Pembangunan dan Peningkatan Busway Koridor Kampung Rambutan - Kampung Melayu, Lokasi pelabaran lajur reguler terdapat tanah yang belum dibebaskan disamping SMA 49 Kramat Jati, adanya warga menuntut ganti rugi tanah seluas 45m2 disamping BNN Cawang, terdapat PKL serta parkir motor pada lokasi Kramat Jati Plasa.
- 5. Mass Rapid Transit (MRT)/Subway, didasarkan pada kebutuhan akan angkutan massal yang cepat dan nyaman, serta terintegrasi dengan pola transportasi lainnya. Untuk tahun 2006 akan dilaksanakan kegiatan traffic management prakonstruksi, pembebasan tanah sekitar terminal Lebak Bulus pembebasan lahan Jl. Tb. Simatupang dan Jl. Fatmawati serta penyempurnaan jalan alternatif pra-konstruksi.
Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 25,00%
- 6. Fly-over dan Underpass (FO/UP) didasarkan pada rencana penyelesaian pembangunan FO Martadinata, FO Roxi, dan UP Kebayoran Lama. Untuk FO/UP yang mendukung jalur kereta api lingkaran Jakarta (loop line) akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2007 (multi year) yang meliputi pembangunan UP Jl. Angkasa Raya/Rel Kereta Api.
Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 37,60%
Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya penyempitan lahan/jalan sehingga perlu membebaskan lahan atau menyesuaikan underpass, serta diperlukannya izin perlintasan dari instansi terkait yang memerlukan waktu yang cukup yaitu dalam pelaksanaan pembangunan (Tahap Awal) Underpass Rel KA Angkasa dan Fly Over Roxy.
- 7. Perumahan, didasarkan pada tujuan untuk menyediakan rumah susun bagi penduduk miskin yang tinggal di bantaran kali dan kolong jalan TOL, buruh dengan penghasilan tetap, pekerja lepas dan karyawan berpenghasilan rendah sebanyak 3.000 unit. Serta perbaikan kampung di 5 kawasan Kotamadya.
Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 72,23%

8. Kaki Lima dan Pembangunan Terminal Agribisnis, dan untuk Kaki Lima kegiatannya berupa perbaikan dan peningkatan kualitas secara komprehensif penanganan pedagang kaki lima yang masih perlu pendalaman lebih cermat. kebutuhan tiga terminal agribisnis di Jabodetabek yang masih perlu koordinasi dan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan Banten.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 70,52%

Penanganan PKL diantaranya dengan melakukan penataan, merehab, merelokasi tempat usaha PKL, penyediaan sarana dan prasarana termasuk pengawasannya. Untuk Tahap Awal Pembangunan Terminal Agribisnis fisiknya dapat diselesaikan 100% dengan output berupa hasil kajian dan laporan hasil survey pusat grosir agro.

Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain :

- ✓ Rehab Lokasi Sementara Usaha PKL di Jl. Inspeksi Tarum Barat, Kali Malang, dengan alokasi anggaran Rp. 600.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena lokasi dimaksud akan terkena rencana pembangunan jalan layang.
 - ✓ Kelengkapan Sarana PKL Di Lokasi Terjadwal dengan anggaran Rp. 300.000.000 tidak dilaksanakan karena ada kesalahan kode rekening dan terlambat diketahui sehingga tidak dilakukan perubahan.
 - ✓ Pembebasan Lahan Untuk Sektor Informal dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan dengan NJOP harga tanah per meter yang mencapai Rp. 7.320.000 sedangkan anggaran yang tersedia Rp. 5.760.000 per meter, sehubungan dengan waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran maka anggaran dikembalikan.
9. Ijo Royo-royo, didasarkan pada kebutuhan pembangunan hutan kota di setiap wilayah Kotamadya yang meliputi taman kota, taman interaktif dan menambah areal terbuka hijau (termasuk pembebasan tanah).
- Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 70,10%

Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain :

- ✓ Relokasi Pedagang Taman Ayodia, Jakarta Selatan sebesar Rp. 500.000.000 tidak dilaksanakan karena belum ada jawaban dari PD Pasar Jaya mengenai lokasi untuk pedagang, mengingat waktu tidak mencukupi maka kegiatan ini tidak dilaksanakan.
- ✓ Penataan Ruang Agung Taman Medan Merdeka Sudut Tenggara, Barat Laut, Timur Laut, Barat Daya, Jakarta Pusat sebesar Rp. 1.200.000.000 direvisi lokasinya ke Lapangan Banteng melalui mekanisme perubahan, tetapi karena waktu tidak mencukupi maka tidak dapat dilaksanakan.
- ✓ Pembebasan Bangunan Taman Waduk Empang Grogol, Jakarta Barat dengan alokasi sebesar Rp. 1.600.000.000 belum dapat dilaksanakan karena belum adanya kejelasan mengenai status kepemilikan bangunan sehingga harus berkoordinasi dulu dengan Walikota Jakarta Barat, sedangkan pekerjaan perencanaannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.430.000 telah diselesaikan.

10. Waste-To-Energy (WTE, meliputi pengadaan tanah di Marunda, penyusunan desain, penyusunan program dan pelaksanaan sosialisasi, persiapan pembangunan, pembangunan WTE tahap I, operasional WTE, serta kegiatan pendukung WTE (transporting).

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 69,77%

11. PPMK, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan sosial ekonominya secara mandiri melalui pengalokasian dana blockgrant. Pada tahun 2002 alokasi dana PPMK sebesar Rp 250 juta per kelurahan, tahun 2003 sebesar Rp 500 juta per kelurahan, tahun 2004 sebesar Rp 700 juta per kelurahan dan tahun 2005 sebesar Rp 1 milyar per kelurahan. Total anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 624,15 milyar. Dengan pertimbangan bahwa jabatan Dekel akan berakhir pada tahun 2006, sehingga perlu dilakukan audit keuangan dan evaluasi menyeluruh terhadap program PPMK tahun 2002-2005 dengan demikian pada tahun 2006 alokasi PPMK setiap Kelurahan rata-rata sebesar Rp 500 juta.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 53,30%

12. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kelurahan, dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan beberapa kewenangannya ke tingkat Kelurahan yang meliputi kebersihan, ketertiban/keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 60,32%

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelurahan pada umumnya karena keterbatasan SDM yang ada sehingga berakibat pada hal-hal lain sebagai berikut :

- ✓ Dalam pengadaan barang/jasa terkendala untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.
- ✓ Kurangnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD terutama proses SKO, SPP dan SPM.
- ✓ Belum adanya/terbentuknya bagian perencanaan karena keterbatasan personel kelurahan hal ini berpengaruh pada kualitas perencanaan yang dihasilkan.

13. Peningkatan kualitas layanan publik Kecamatan, dimaksudkan untuk pendelegasian kewenangan dari Sudin Teknis Kotamadya/Kabupaten ke Pemerintahan Kecamatan di bidang PU Jalan, PU Tata Air, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan dan Penerangan Jalan Umum.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 46,49%

Kendala yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan di kelurahan yaitu antara lain :

- ✓ Belum adanya/terbentuknya bagian perencanaan karena keterbatasan personel kelurahan hal ini berpengaruh pada kualitas perencanaan yang dihasilkan

- ✓ Pelaksanaan di tingkat Kelurahan pada seksi teknis (bidang jalan, tata air, PJU, Kebersihan, Pertamanan), belum ada koordinasi yang kuat antara camat sebagai Pengguna Anggaran dengan Sudin Teknis yang bersangkutan.

14. Pendidikan, meliputi rehab berat dan rehab total gedung SDN/SMPN didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat sejumlah gedung SDN/SMPN yang dikategorikan rusak berat. Pembangunan gedung SMA baru sebesar, dengan pertimbangan daya tampung SMA Negeri saat ini masih sangat terbatas. Pembangunan SMA unggulan, dengan pertimbangan DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan sampai saat ini belum memiliki Sekolah Negeri yang mempunyai fasilitas lengkap seperti Gymnasium, kolam renang, gedung serbaguna dan lain-lain. Pembangunan SMK Kelautan di Kepulauan Seribu, dengan pertimbangan bahwa potensi Kepulauan Seribu yang cukup besar di bidang kebaharian serta sebagian besar penduduknya merupakan nelayan.

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 81,50%

15. Kesehatan, peningkatan pelayanan keluarga miskin melalui Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin).

Hasil evaluasi sampai dengan Desember 2006 adalah realisasi fisiknya rata-rata mencapai 94,90%

Capaian kegiatan yaitu terlaksananya pelayanan JPK Gakin dan Bencana dengan klaim dari 71 Rumah Sakit dan 11 Puskesmas yang terdiri dari :

- ✓ JPK Gakin sebanyak 125.349 orang
- ✓ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 77.553 orang
- ✓ Orang terlantar sebanyak 558 orang
- ✓ Penghuni Panti sebanyak 479 orang
- ✓ Pasien DBD sebanyak 25.531 pasien
- ✓ Gizi buruk sebanyak 905
- ✓ AFP/Polio sebanyak 11 pasien
- ✓ Flu burung sebanyak 11 pasien
- ✓ GED/Kebakaran/Gempa/KDRT sebanyak 149

Masih banyaknya Rumah Sakit yang belum mengajukan klaim karena adanya pasien yang masih dalam perawatan dan menunggu kelengkapan administrasi sebagai syarat klaim.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Dasar hukum dari Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan Sistem dan Prosedur Penugasan Pemerintah kepada Daerah serta Penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten dan atau dari Kotamadya/Kabupaten ke Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugas.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi.

Sesuai mekanisme, pemberi tugas pembantuan tidak secara langsung memerintahkan untuk melaksanakan tugas pembantuan, namun terlebih dahulu memberitahukan secara resmi kepada penerima tugas pembantuan mengenai adanya rencana pemberian tugas pembantuan.

Tugas pembantuan yang diterima oleh Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 sebanyak 20 kegiatan yang tersebar pada 16 SKPD. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1.1 Tugas pembantuan yang berasal dari Departemen Pertanian

1.1.1 Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 2 program dan 2 kegiatan, yaitu:

- a) Program Pengembangan Agribisnis dengan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura, dengan anggaran sebesar Rp2.445.950.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar

Rp2.088.503.897 dengan hasil Perbanyak Benih/Bibit, Pengembangan Proteksi Tanaman, Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan dan Penerapan Teknologi Pengembangan Hortikultura. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemui adanya permasalahan.

- b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman/Perbibitan Ternak dengan anggaran sebesar Rp127.130.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp94.799.165 dengan hasil terlaksananya perbanyak benih sumber tanaman pangan (benih dasar dan benih pokok), Percontohan perbanyak benih sebar di Ciganjur, Forum perbenihan dan pelatihan penangkar benih. Permasalahan yang ditemui adalah volume pupuk kandang sapi yang seharusnya 100 karung tertulis 100 Kg sehingga harga disesuaikan dengan harga per kilo sehingga anggaran tidak terserap seluruhnya, juga masalah terlambatnya pencairan anggaran yang baru diterima pada bulan Agustus serta musim kemarau yang panjang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan.

1.1.2 **Pada Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Pusat**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Daerah Aliran Sungai dengan anggaran sebesar Rp720.823.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp710.213.500 dengan hasil Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 50 ha dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai seluas 675 ha. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemui adanya permasalahan

1.1.3 **Pada Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Selatan**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis dengan anggaran sebesar Rp200.995.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp0 karena anggaran dari Departemen belum cair.

- 1.1.4 **Pada Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Utara**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis dengan anggaran sebesar Rp122.285.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp0 karena DIPA baru turun tanggal 17 Nopember 2006 sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
- 1.1.5 **Pada Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Timur**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis dengan anggaran sebesar Rp217.745.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp197.615.000 dengan hasil terlaksananya penanaman 1.000 pohon, penyulaman 11.000 pohon dan pembuatan sumur resapan.
- 1.1.6 **Pada Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Barat**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis dengan anggaran sebesar Rp392.112.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp0 karena anggaran dari Departemen belum cair.
- 1.1.7 **Pada Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis dengan anggaran sebesar Rp794.773.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.700.869.250 dengan hasil tertanamnya pohon mangrove sebanyak 540 pohon, sumur resapan sebanyak 50 buah dan terbentuknya kelompok Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan) di masing-masing kelurahan. Permasalahan yang dihadapi adalah pengadaan bibit masih dilaksanakan di BPDAS dan bibit tanaman terlalu kecil, disamping itu juga pengiriman tanaman ke lokasi tidak sesuai dengan rencana sehingga dilakukan langkah solusi yaitu besanya bibit tanaman disesuaikan dengan

standart DKI Jakarta yaitu 2 meter dan pengadaannya tidak harus oleh BPDAS serta biaya pengiriman bibit tanaman agar disesuaikan.

1.2 Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.2.1 Pada BPPD Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Kegiatan Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp204.500.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.204.320.000 dengan hasil terlatihnya 25 orang calon pengusaha dalam rangka peningkatan produktifitas dan kemampuan perencanaan usaha serta terlatihnya 5 usaha kecil, terlatihnya 20 orang karyawan sehingga mampu menerapkan 5S Perkantoran dan terlatihnya 20 orang pengusaha kecil sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang baik.

1.2.2 Pada Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, sebanyak 2 program dengan 2 kegiatan, yaitu :

- a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Kegiatan Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp204.500.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp192.200.000 dengan hasil pelatihan kualitas pencari kerja pada 48 orang agar mampu bersaing di pasar kerja dan peningkatan kualitas 60 LLS sesuai standar kompetensi.
- b) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Bantuan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengadaan Pengolahan Data dengan Anggaran sebesar Rp300.000.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp295.235.000 dengan hasil terlaksananya pelayanan Antar Kerja melalui peningkatan efektifitas

Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja pada 200 orang, bantuan kepada 88 orang miskin agar mampu menciptakan lapangan kerja dan berusaha dalam rangka mengurangi pengangguran serta tersedianya satu buah laptop untuk pengolahan data.

1.2.3 Pada Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Kegiatan Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp204.500.00. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp204.082.000 dengan hasil Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan meningkatnya kualitas output lembaga latihan swasta sesuai standar kompetensi.

1.2.4 Pada Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, sebanyak 2 program dengan 2 kegiatan, yaitu :

- a) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Bantuan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Tenaga Kesos Berbasis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp300.000.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp299.575.800 dengan hasil penempatan 200 orang pencari kerja di berbagai perusahaan, berkurangnya pengangguran dengan Padat Karya Produktif di 2 lokasi dan terpenuhinya tenaga kerja trampil melalui teknologi tepat guna pada 10 orang.
- b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Kegiatan Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp204.500.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp204.123.700 dengan hasil terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang trampil untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan sebanyak 48 orang dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pengelola LLS yang proaktif sebanyak 60 orang.

- 1.2.5 **Pada Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan Kegiatan Pembiayaan Lain-lain berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Bantuan Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional dengan Anggaran sebesar Rp400.000.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp400.000.000 dengan hasil terlaksananya pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas informasi pasar kerja dan bursa kerja bagi masyarakat, terserapnya tenaga kerja pengangguran melalui pembuatan kolam ikan di dua lokasi, terserapnya tenaga kerja melalui kelompok usaha sebanyak 15 orang dengan usaha ayam goreng dan tersedianya 1 buah Personal Komputer dan 2 buah laptop.
- 1.2.6 **Pada BLK Pasar Rebo**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Kegiatan Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia berupa Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan Anggaran sebesar Rp542.000.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp541.657.400 dengan hasil pelaksanaan beberapa Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

1.3 Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Kesehatan

Diterima pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Komunitas berupa operasional puskesmas dengan anggaran sebesar Rp2.777.000.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp0 karena revisi DIPA baru turun pada bulan Nopember 2006 (terlambat turun) sehingga tidak bisa dilaksanakan.

1.4 Tugas Pembantuan yang berasal dari Departemen Kelautan dan Perikanan

- 1.4.1 **Pada Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dengan Kegiatan Pengembangan Konservasi

Laut berupa pemberian bantuan sosial dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp1.200.000.000 dengan hasil terselenggaranya pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat.

- 1.4.2 **Pada Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**, sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan, yaitu Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan, dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, berupa pengembangan usaha ekonomi dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000. Adapun realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp0 karena anggaran dari Departemen belum cair.

2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Sesuai dengan Undang-Undang pembentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat kota dan Kabupaten serta Desa Otonom. Lima Kotamadya, 1 Kabupaten dan 267 Kelurahan yang ada di DKI Jakarta semuanya bersifat administrasi. Dengan demikian maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tersebut.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerja Sama Antar Daerah

1.1 Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama antar daerah adalah dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama yang lebih intensif dan saling menguntungkan diwujudkan melalui peningkatan pertukaran informasi, alih teknologi dan pengalaman-pengalaman dari daerah lain

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2006 adalah kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan dengan 8 (delapan) daerah di wilayah Bodetabekjur

1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Untuk pelaksanaan kegiatan diatas telah dialokasikan anggaran Rp24.000.000.000,- dengan masing-masing daerah Rp.3.000.000.000,- dengan rincian penggunaan anggaran Rp2.000.000.000,- untuk bidang pendidikan berupa kegiatan pembangunan gedung sekolah dan Rp1.000.000.000,- untuk bidang kesehatan berupa kegiatan pembangunan puskesmas

Kerja sama bidang pendidikan dan kesehatan ini dilaksanakan melalui program bantuan. Adapun realisasi kegiatan ini mencapai 100%.

1.3 Permasalahan dan Solusi

Dari sisi penyerahan keuangan kepada pihak penerima, tidak ada kendala. Sedangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemanfaatan dana menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

2.1 Kebijakan dan Kegiatan

Optimalisasi pendayagunaan kekayaan daerah melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah serta menunjang program pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu : memanfaatkan asset daerah yang idle, melakukan kerjasama yang win-win solution, mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah, tidak membebani APBD, tidak mengubah status kepemilikan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2006, telah melakukan kerjasama dengan 3 (tiga) PT, yaitu : PT. Hotel Cikini Sejahtera, PT. Wahana Cipta Sejahtera dan PT AGB Tuna.

2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi penerimaan dari kerjasama asset daerah Tahun 2006 yaitu :

- a) PT. Hotel Cikini Sejahtera, pembayaran Goodwill sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- b) PT. Wahana Cipta Sejahtera pembayaran Goodwill sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) atas perjanjian kerjasama Pembangunan Pusat Grosir Cililitan II (PGC II).
- c) PT AGB Tuna, pembayaran kontribusi tahap I sebesar Rp150.000.000 (Seatus lima puluh juta rupiah) atas perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan pabrik es di Muara Angke.

2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga adalah belum menyelesaikan IMB (masih dalam proses), padahal pembangunan sudah berjalan.

Solusi :

Membuat surat teguran agar segera menyelesaikan IMB mengingat pembangunan sudah berjalan.

3. Kordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

3.1 Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan diarahkan pada terwujudnya koordinasi secara efektif dengan instansi vertikal pada berbagai tingkatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah antara lain

- a) Pembekalan Koordinasi Bagi Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas di Provinsi DKI Jakarta
- b) Pembekalan Pelaksanaan Koordinasi Camat, Koramil dan Polsek di Provinsi DKI Jakarta
- c) Operasional Armabar TNI AL
- d) Operasional TNI AU
- e) Operasional POLDA Metro
- f) Operasional Kejati DKI Jakarta
- g) Operasional Pengadilan Tinggi
- h) Operasional Kodam Jaya
- i) Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara

3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a) Terlaksananya koordinasi Muspikel pada 100 kelurahan
- b) Terlaksananya koordinasi Muspika pada 44 kecamatan
- c) Terlaksananya koordinasi dengan Muspida

3.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam pemberian bantuan operasional kepada instansi vertikal dihadapkan pada kendala peraturan pelaksanaan. Sebagai upaya pemecahannya, biaya operasional instansi vertikal dialokasikan pada SKPD terkait.

4. Pembinaan Batas Wilayah

4.1 Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah diarahkan untuk terwujudnya kepastian batas wilayah antar daerah, maupun antar wilayah dalam Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah terpasang.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan batas wilayah antara lain :

- a) Pengadaan patok batas Kecamatan dan Kelurahan TA 2006
- b) Sosialisasi Ketentuan tentang Pengamanan Pilar (Tanda Batas) Kelurahan
- c) Sosialisasi Peta Batas Wilayah Bagi Aparat Wilayah Provinsi DKI Jakarta
- d) Penyusunan SK Gubernur dan Penentuan Titik Koordinat Batas Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
- e) Rapat Koordinasi Perbatasan Daerah
- f) Monitoring dan Evaluasi Tanda Batas Provinsi (Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten)
- g) Kajian Penataan Batas Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
- h) Penyusunan Peraturan Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2001 tentang Batas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Kotamadya Jakarta Utara
- i) Evaluasi Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 979 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pemasangan Tanda Batas Wilayah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
- j) Rapat Koordinasi Penataan Batas Kelurahan yang bermasalah di Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a) Pemasangan patok batas kecamatan sebanyak 170 buah, patok batas kelurahan sebanyak 301 buah.
- b) Terlaksananya sosialisasi pengamanan tanda batas kelurahan kepada 200 perangkat kelurahan dan kecamatan.
- c) Terlaksananya sosialisasi peta batas wilayah kepada aparat 267 kelurahan

- d) Terlaksananya koordinasi perbatasan daerah antara Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
- e) Terlaksananya pemantauan pilar tanda batas dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat.
- f) Terlaksananya koordinasi penataan batas wilayah pada 267 kelurahan.
- g) Tersusunnya pedoman pemasangan tanda patok batas.

4.3 Permasalahan dan Solusi

Adanya perbedaan titik koordinat letak Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menurut UU 34 Tahun 1999 dengan PP 55 Tahun 2001. Untuk penyelesaiannya, Pemerintah Provinsi melakukan upaya untuk memasukkannya dalam proses revisi UU 34 Tahun 1999.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

5.1 Bencana yang terjadi dan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2006 terjadi banjir dengan skala kecil (banjir tahunan), di daerah bantaran kali.

Dalam penanggulangan bencana (banjir) di DKI Jakarta, sebagaimana Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi DKI Jakarta, dikoordinasikan oleh Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP). Satkorlak BPB diketuai oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Sekretaris Kepala Dinas Tramtib dan Linmas.

5.2 Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal)

Tahun 2006 terjadi bencana banjir berskala lokal

5.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana di DKI Jakarta, anggaran bersumber dari APBD. Jumlah anggaran (Lintas Bidang) khusus yang ada pada Dinas Tramtib dan Linmas sebesar Rp25.097.547.000,-

5.4 Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan Bencana

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana banjir, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian penanggulangan bencana;
- b. Menyusun pedoman/protap penanganan bencana;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia;
- d. Melaksanakan pelatihan dan gladi penanganan bencana;
- e. Pembentukan Tim dalam unitnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- f. Melakukan deteksi dini setiap gejala adanya bencana dan memberikan peringatan dini;
- g. Penyusunan Peta Resiko Bencana;
- h. Menyusun daftar alamat dan Telp/Fax?HP para pejabat yang terkait dengan penanganan bencana;
- i. Menyusun mekanisme dan organisasi Posko;
- j. Menyusun rencana kontijensi;
- k. Menyusun sistem peringatan dini;

5.5 Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Berdasar sejarah dan kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta, potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah bencana banjir.

6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Pengertian kawasan khusus menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Dengan berdasar pengertian ini, maka di Provinsi DKI Jakarta tidak ada kawasan yang masuk dalam kategori kawasan khusus.

7. Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum.

7.1 Gangguan ketentraman dan ketertiban diwilayah Provinsi DKI Jakarta

Gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi adalah : pedagang kaki lima, gelandangan, pengemis, WTS/Waris, pengamen, joki three in one, pedagang asongan, anak jalanan, psikotik/orang gila, lap mobil, penyeberang jalan, pelanggar KTP, reklame, spanduk/umbul-umbul, bendera, gerobak, cucian mobil, pemulung, bengkel liar, tambal ban, barang cetakan, parkir liar, narkoba, tawuran, ujuk rasa/demo, miras, judi, VCD porno, bangunan liar, banjir, kebakaran, pohon tumbang.

7.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sesuai Perda 3 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang menangani masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di DKI Jakarta adalah Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta.

7.3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Dinas Tramtib dan Linmas termasuk Suku Dinas lima wilayah kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berjumlah 7.124 pegawai, dengan rincian :

- a. PNS sebanyak = 1.644 pegawai;
- b. Banpol PP sebanyak = 3.461 pegawai;
- c. Linmas sebanyak = 2.686 pegawai.

7.4 Kendala/Masalah dan Penanggulangan

7.4.1 Kendala/Permasalahan

- a. Sangat kompleksnya permasalahan dan belum diimbangi dengan keterpaduan koordinasi antar instansi;
- b. Masih belum maksimalnya mutu SDM anggota Linmas dan Banpol PP serta masih kurangnya kesadaran anggota Linmas di tingkat kelurahan dalam mengikuti pembinaan/pelatihan SDM;

- c. Belum adanya Perda tentang Organisasi Sat.Pol PP berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 120 dalam bidang penegakan perda, Sat-Pol PP hanya memiliki kewenangan melakukan tindakan preventif dan represif non-justisi;
- d. Masih rendahnya disiplin sosial masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik tingkat pusat maupun daerah. Hal ini karena kurangnya sosialisasi peraturan yang ada khususnya Perda 11 Tahun 1988.
- e. Belum adanya sarana sistem jaringan informasi elektronik bidang ketentraman dan ketertiban umum secara on line antar kotamadya/Kabupaten dan provinsi.

7.4.2 Penanggulangan/Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencapai keseragaman persepsi dan tindakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijaksanaan;
- b. Melakukan sosialisasi secara rutin mengenai bencana, terutama bencana banjir dan kekeringan;
- c. Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana operasional dengan dukungan personil yang profesional, arif bijaksana serta tegas dalam mengemban tugas;
- d. Meningkatkan publikasi kepada masyarakat umum baik melalui media massa maupun elektronik mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan ketertiban umum terutama yang menyangkut fasilitas sosial, sarana umum dan prasarana perkotaan serta pemukiman lepas pantai;
- e. Mengotimalkan penertiban sesuai dengan tugas pokok fungsi yang dilaksanakan secara fungsional maupun oleh segenap instansi terkait sesuai batas dan kewenangannya;

7.5 Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Bencana

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan bencana cukup intens. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan ketentraman dan ketertiban melibatkan aparat keamanan melalui koordinasi Muspida.

7.6 Sumber dan Jumlah Anggaran.

Sumber anggaran untuk penanganan masalah ketentraman dan ketertiban berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan jumlah anggaran tahun 2006 adalah sebesar Rp.255.093.402.914,- (setelah perubahan).

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2006 Gubernur Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan sesuai ketentuan pasal 17 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, LKPJ Tahun 2006 ini saya sampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Secara substansi LKPJ Tahun 2006 berbeda dengan LKPJ tahun 2005 karena fokus LKPJ 2006 adalah pada *progress report* realisasi program dan kegiatan serta permasalahan dan solusinya berdasar RKPD Tahun 2006 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategis Daerah 2002-2007. Dengan demikian, gambaran informasi yang disajikan menekankan realisasi program dan kegiatan menurut 8 (delapan) bidang pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Renstrada 2002-2007

Dalam proses pelaksanaan penyelegaraan pemerintahan, terdapat beberapa keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tahun 2006. Namun demikian kita akui dibalik keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, masih perlu upaya-upaya nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai lebih optimal.

Demikian, LKPJ Tahun 2006 ini disampaikan untuk dibahas dan dirumuskan dalam Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berisi catatan ataupun rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.